



POLITEA

Jurnal Kajian Politik Islam

Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi

- ◆ Kontestasi Perempuan Karir dalam Mempertahankan Eksistensi Kesetaraan Pada Ranah Politik Studi Pemikiran Margareth Thatcher
Nufa, Ita Rodiah
- ◆ Akar Teologi - Politik Gerakan Radikalisme Islam dan Terorisme di Indonesia
Ibi Satibi
- ◆ Propaganda Politik Pasca Kebenaran (Posttruth) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancaman Terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer
Abd Hannan
- ◆ Analisis Psikologis Tentang Nalar Politik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Umum
Pahrizal Iqrom
- ◆ The United States and Cino- Pak Strategic Imperative in Afganistan
Nuruddin Nuruddin, Ahmad Efendi
- ◆ Praktik Politik Syekh Zainuddin Perspektif Maqasid Syariah
Ahmad Khaerul Kholidi, Mansyur
- ◆ Political Critique of Axel Honneth's Recognition of Jurgen Habermas Deliberative Democracy
Sukri Sukrie, Ishak Antok



Program Studi
PEMILIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN & STUDI AGAMA
UIN MATARAM

Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, telah mengalami sejarah panjang tentang hubungan antara agama, negara, dan demokrasi. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Konstitusi negara itu menetapkan dasar negara sebagai "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mencerminkan pengakuan atas peran agama dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara agama, negara, dan demokrasi.

Jurnal Politea kali ini akan mengeksplorasi hubungan antara agama, negara, dan demokrasi di Indonesia. Artikel ini akan membahas bagaimana agama telah mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi. Jurnal Politea juga akan membahas peran negara dalam menjaga keseimbangan ini, termasuk upaya-upaya untuk mempromosikan pluralisme dan mengatasi ekstremisme agama.

Selain itu, Jurnal Politea juga akan membahas beberapa isu yang kontroversial terkait hubungan antara agama, negara, dan demokrasi di Indonesia, seperti peran agama dalam politik dan pengaruhnya pada hak asasi manusia. Terakhir, artikel yang diterima seputar tawaran rekomendasi dan solusi yang mungkin untuk membantu Indonesia tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi yang kuat sambil mempertahankan keberagaman agama dan budaya yang kaya di Tahun Politik.

POLITEA

JURNAL POLITIK ISLAM

VOLUME 6 NOMOR 1, JANUARI – JULI 2023

AGAMA, NEGARA DAN DEMOKRASI

DAFTAR ISI

**THE UNITED STATES AND CINO-PAK STRATEGIC IMPERATIVE IN AFGANISTAN
"PENTINGNYA STRATEGI NEGARA-NEGARA PERSERIKATAN DAN CINA-PAKISTAN
DI AFGANISTAN"**

Nuruddin, Ahmad Efendi

1-21

**ANALISIS PSIKOLOGIS TENTANG NALAR POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMILIHAN UMUM**

Pahrizal Iqrom

22-36

PRAKTIK POLITIK SYEKH ZAINUDDIN PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH

Ahmad Khaerul Kholidi, Mansyur

37-50

**PROPAGANDA POLITIK PASCAKEBENARAN (POSTTRUTH) MENJELANG PEMILU 2024
DAN ANCAMANNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA KONTEMPORER**

Abd Hannan

51-82

**POLITICAL CRITIQUE OF AXEL HONNETH'S RECOGNITION OF JURGEN HABERMAS'
DELIBERATIVE DEMOCRACY**

Sukri Sukrie, Ishak Hariyanto Anto

83-97

**KONTESTASI PEREMPUAN KARIR DALAM MEMPERTAHAKAN EKSISTENSI
KESETARAAN PADA RANAH POLITIK STUDI PEMIKIRAN MARGARETH THATCHER**

Nufa, Ita Rodiah

98-114

**AKAR TEOLOGI-POLITIK GERAKAN RADIKALISME ISLAM DAN TERORISME
DI INDONESIA**

Ibi Satibi

115-138

POLITEA : JURNAL POLITIK ISLAM

@2023 Program studi Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram

Pelindung : Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
Pengarah : Prof. Atun Wardatun, Ph.D.
Penanggung Jawab : Dr. Emawati, M. Ag

Editorial

Editor in Chief
Agus Dedi Putrawan, M.S.I

Editorial Secretary
Muh. Alwi Parhanudin, S.Sos., M.S.I
Muhammad Rizky HK. M.A

Section Editor
Agus, M.Si.
Zakaria Ansori, M.Hum.
Abdul karim, S.S., M, Hum,
Ihsan Hamid, MA.Pol.

Copyeditor
Very Wahyudi, M.A.

Layouter
Assazali Sibawaihi, M.HI

Mitra Bestari/ Reviewer

Ahmad Ali Nurdin, Ph.D.
(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Dr. Nurhidayat Sardini, S.Sos., M.Si.
(Universitas Diponegoro Semarang)
Dr. Hilmy Faizi, M. Hum.
(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)
Dr. Kismartini, M.Si.
(Universitas Diponegoro Semarang)
Dr. AinurrahmanHidayat, M.Hum.
(IAIN Madura)
Dr. Muhammad Ansor, MA.
(IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)
Muhtar Haboddin, S.IP., M.A.
(Universitas Brawijaya Malang)
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Muhammad Alkaf, S. Sos., M.S.I.
(IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)
Wahyudi Akmaliah
(PMB-BRIN, Nation University of
Singapore)
Muhammad Said, M.Hum
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Muzayyin Ahyar, M.S.I
(IAIN Samarinda)
Kiki Mikail, MA

Editorial Office
Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB
Email: PPI@uinmataram.ac.id / politeajournal@gmail.com
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/>

THE UNITED STATES AND CINO-PAK STRATEGIC IMPERATIVE IN AFGANISTAN

Pentingnya Strategi Negara-Negara Perserikatan dan Cina-Pakistan di Afganistan

Nuruddin, Ahmad Efendi

Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Andalas
nuruddinmsi@uinmataram.ac.id
fen09duniaindah@gmail.com

Abstract

This study aims to explain the importance of the strategy that must be taken by countries that are directly involved in war, such as the United States and Afghanistan. On the other hand, this strategy should also become an option for dominant countries in the region, such as China and China-Pakistan. This study tries to use Joseph Nye's theories/concepts, namely hard power, soft power and smart power. Soft power and smart power have been proposed for their application to try to end the violence in Afghanistan when the theory/concept of hard power has not succeeded in making Afghanistan peaceful. The methodology used in this study is explanatory-literary research, which tries to decipher the problem of the theme above based on the literature by explaining the relationship between phenomena recorded through various books, journals and reviews and what is widespread in online media. The result is then the need for a new strategy to try to reconcile the conflict/war in Afghanistan to be taken by the countries involved as well as countries that have a dominant role in Afghanistan such as China and Pakistan as the closest (neighboring) countries. The theoretical implication is that Joseph Nye's theory of soft power and smart power provides a promising solution in the future, even though this theory dates back to 2004. While the practical implications are expected that countries involved in the war and countries that have a dominant role can take this theory as their policy choice to end the conflict in Afghanistan.

Key word: United States, Cino-Pak, Strategic Imperative, Afghanistan

Pendahuluan

Pada tahun 2021 lalu Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari Afganistan setelah sekitar 20 tahun berada di sana. United States (NATO) masuk ke Afganistan dalam rangka memburu dan membersihkan kelompok terorisme (Al-qaida) sekaligus berkehendak untuk mendemokratisasi pemerintahan. Dua agenda besar itulah yang menjadi cita-cita Amerika, sehingga kemudian bertahan di sana selama dua dasa warsa.

Cita-cita pertama yaitu membersihkan kelompok Al-qaida dari Afganistan bisa dikatakan tercapai dengan ditemukan dan terbunuhnya ketua Al-qaida sendiri yaitu Osama Bin Laden. Sedangkan cita-cita kedua yaitu berupaya untuk menyelenggarakan



pemerintahan Afganistan sebagai pemerintahan demokratis dapat dikatakan gagal sampai Amerika keluar dari Negara tersebut. Niat hendak menyemaikan pemerintahan demokratis, justru Afganistan terus-menerus dalam kondisi labil karena konflik yang tidak berkesudahan.

Dengan keluarnya United States dari Afganistan dapat menjadi titik tonggak dimulainya konflik baru. Munculnya ISIS-K di tengah-tengah pemerintahan Taliban dapat menjadi bukti berlanjutnya konflik kekerasan. Liputan6.com misalnya menurunkan berita dengan judul 20 orang tewas akibat bom bunuh diri di luar Kemlu Afganistan, yang menggambarkan bagaimana ISIS kembali memperlihatkan taringnya.¹ Peristiwa kekerasan itu terjadi pada tanggal 11 Januari 2023 di Ibu Kota Afganistan (Kabul) di mana kemudian menimbulkan korban.

Sementara diberitakan pula bahwa badan kemanusiaan Italia, Emergency NGO di Kabul mengatakan, mereka merawat lebih dari 40 orang terluka. Di sisi lain korban terus meningkat. Sedangkan para koresponden mengatakan bahwa Taliban cenderung meremehkan jumlah korban dalam insiden semacam itu. Kondisi-kondisi tidak stabilnya Afganistan sebenarnya telah menjadi kekhawtiran dunia internasional.

Padahal rencananya delegasi Cina dijadwalkan hendak mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Afganistan yang di kuasai Taliban pada hari kekerasan itu terjadi. Atas peristiwa bom bunuh diri itu, seorang pejabat senior di kantor perdana menteri Ahmadullah Muttaqi mengonfirmasi bahwa tidak ada orang asing yang hadir di kementerian saat ledakan terjadi. Dari media online Liputan 6.com pula didapatkan informasi bahwa rangkaian ledakan bom telah terjadi puluhan kali yang sebagian besarnya dilakukan oleh ISIS, sejak Amerika keluar meninggalkan Afganistan.

Selanjutnya tulisan ini hendak menawarkan pendekatan penyelesaian konflik lewat teori atau konsep yang dicetuskan oleh *Joseph Nye* yaitu konsep *hard power*, *soft power* dan *smart power*. Penulis mengajukan konsep Nye ini sebagai upaya untuk mencoba memberikan solusi atau tawaran gagasan karena tulisan-tulisan yang ada sejauh ini hanya masih sekedar menceritakan konflik dan jalan penyelesaian yang sifatnya belum menekankan pentingnya gabungan strategi yang ditawarkan Nye di atas. Tulisan Irza

¹ https://www.liputan6.com/global/read/5179960/taliban-minta-organisasi-kerja-sama-islam-tak-campuri-urusan-afghanistan?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Top. Akses tanggal 20 Januari 2023

Hurun'in² dalam jurnal transformasi global vol 3 no 1 misalnya hanya menarasikan kegagalan bina damai konflik Afganistan saja. Pun dengan tulisan Umiyati Haris³ dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin tahun 2016 hanya menuliskan upaya jalan damai dengan memakai pendekatan rekonsiliasi.

Artinya kedua tulisan terdahulu belum mengambil angle dari sisi pentingnya strategi oleh Negara-negara dengan kekuatan menengah sampai adidaya di dalam penyelesaian konflik sipil di Afganistan. Begitu juga dengan tulisan-tulisan lainnya masih belum ada yang menitik dalam bagaimana pentingnya strategi agar konflik berkepanjangan di Afganistan segera usai. Untuk hal itulah tulisan ini mencoba hadir guna memberikan gagasan atau ide agar kiranya perdamaian abadi di Afganistan segera terealisasi. Selain itu tulisan ini mencoba hadir agar pihak-pihak terkait di dunia internasional maupun di kawasan bisa mengambil partisipasi produktif, bukan justru sebaliknya menjadi agen perpanjangan konflik yang sudah kronis. Terakhir juga tulisan ini mencoba hadir guna memberikan penyadaran kepada masyarakat internasional agar Negara-negara besar tidak lagi mengambil posisi ganda yang hendak datang sebagai pahlawan, namun juga datang dengan siasat hitam bagi Afganistan dan kawasan.

Adapun hipotesa/argument yang hendak mau diuji adalah pengaplikasian *strategi hard power* dengan *soft power* yang kemudian melahirkan *smart power* dari *The United States* dan Cina-Pakistan dalam rangka stabilitas Afganistan. Untuk hal itu maka nantinya akan dijabarkan unsur-unsur *hard power* yang sudah dan tengah berjalan. Begitu juga dengan unsur-unsur *soft power*nya. Lalu penggabungan keduanya juga akan coba dideskripsikan untuk kemudian menjadi tawaran solusi bagi kawasan guna mengawal Afganistan menuju daratan yang aman damai bagi masyarakatnya dan dunia internasional pada umumnya

Metodologi

Untuk dapat menguraikan persoalan pentingnya strategi yang harus diambil oleh Amerika bersama sekutu dan Cina-Pakistan sebagai dua Negara paling potensial serta berdekatan, maka tulisan ini mengacu kepada semua keterangan yang berkaitan dengan

² Hurun'in Irza, Tantangan Bina Damai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil Di Afganistan. Jurnal Transformasi Global volume 3, Nomer 1. 2010

³ Haris Umiyati, Penyelesaian Konflik Afganistan-Pakistan: Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, 2016

informasi-informasi terkini mengenai Afganistan. Oleh karena peran media online dalam hal ini memegang posisi yang sangat penting. Lebih jauh dari itu media online juga menyediakan beberapa jurnal internasional, review internasional, maupun data-data studi hubungan internasional yang dilakukan oleh berbagai Fakultas Isipol di Universitas-universitas di Indonesia.

Satu persatu dari keberadaan informasi disortir, diklarifikasi dan diuraikan agar dapat dijadikan acuan. Begitu juga dengan jurnal-jurnal yang ada diteliti secara seksama agar dapat dijadikan landasan bagi memulai mengurasi pentingnya strategi yang hendak diterapkan di Afganistan pasca keluarnya Amerika dan kawan-kawan. Review terkait tema yang relevan dengan tema ini juga menjadi perhatian penulis agar dapat dijadikan rujukan berguna bagi mendapatkan data sekaligus bermanfaat bagi mempertajam daya analisis penulis. Tidak kalah penting posisi dari data-data kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan internasional maupun buku-buku mengenai manajemen konflik internasional ikut menjadi pondasi bagi penulisan tema pentingnya strategi yang perlu diterapkan di Afganistan.

Oleh karena keterangan-keterangan terdahulu di atas maka penelitian ini dapat dikatakan berjenis penelitian kepustakaan –eksplanasi yang menggunakan data-data sekunder sebagai acuan untuk mensintesisnya menjadi bahan jadi. Data-data terserak sekunder yang terpisah-pisah disatukan untuk membangun sebuah kerangka narasi sehingga menjadikannya terpadu utuh sesuai tuntutan tema. Ada proses kreatif yang cukup menantang di dalam merangkaikan data-data yang terpisah. Keberadaan informasi yang terserak di Internet memungkinkan penulis untuk dapat menelusuri sudut-sudut “terjauh” dari ruangan-ruangan yang menyediakan data-data referensi.

Youtube juga sangat membantu penulisan ini sebagai langkah mudah untuk menemukan petunjuk awal mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi. Bagaimana tindak –tanuk Cina misalnya cukup mudah ditemukan dalam situs-situs youtube yang di Cina dikenal dengan nama youkutodou. Dari sini kemudian penulis mencoba menelusri situs-situs yang disebutkan oleh naratornya, sehingga penulis dapat menemukan bukti tertulis dari berbagai informasi terkait tindak-tanduk Cina-Pakistan di dalam menghadapi dunia internasional maupu kawasan sekitar geografis kedua Negara.

Dari usaha mengumpulkan data-data yang terambil dari media online, jurnal dan review internasional, buku-buku terkait seperti *Turbulent Peace (Challenges of Managing International Conflict)*, *Shadow Government of America*, maka kami menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisa studi kasus. Jika selama ini penggunaan hard power tidak juga bisa membuat kondisi Afganistan dan kawasan menjadi tenang dan damai maka diperlukan konsep lain seperti konsep soft power dan atau smart power.

Kasus penggunaan soft power dan smart power misalnya menarik untuk dikedepankan karena memang banyak keberhasilan yang telah diraih oleh dua pendekatan tersebut. Amerika kini juga telah sedang menikmati buah dari perilaku soft powernya di banyak negara-negara di dunia internasional. Keberadaan merebaknya budaya populer seperti penggunaan berbagai merek pakaian, makanan dan minuman, merupakan contoh yang menarik dari soft powernya Amerika. Sebut saja merek makanan siap saji seperti *KFC*, *McDonald* hampir ditemukan merata ada di banyak ibu kota-ibu kota bahkan sampai dipelosok-pelosok negeri banyak Negara-negara di Asia-Afrika dan Eropa.

Belum lagi film-film Amerika yang tersebar merata di seluruh penjuru dunia. Ini memudahkan adanya transformasi Amerikanisasi pada masyarakat dunia. Artinya semakin tinggi intensitas Amerikanisasi di dunia internasional maka kebudayaan Amerika juga diterima semakin tinggi. Penerimaan kebudayaan Amerika akan semakin memberi jalan kepada penghormatan cara-cara Amerika pada skala internasional.

Begitu juga dengan tindakan-tindakan smart power Amerika banyak mendatangkan keuntungan tersendiri bagi Amerika. Keberadaan dari organisasi internasional, Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Amerika yang mampu bersinergi dengan LSM-LSM di banyak Negara di berbagai belahan dunia, merebaknya perusahaan-perusahaan lintas Negara dari Amerika merupakan contoh –contoh bagaimana smart power itu bekerja cukup efektif.

Begitu juga dengan studi kasus penggunaan soft dan smart powernya Cina dapat menjadi pintu masuk untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi penyelesaian konflik berkepanjangan di Afganistan. Cina sebagai Negara super power baru banyak

menorehkan jejak-jejak soft dan smart power di dunia internasional. Baik di belahan bumi Asia maupun Afrika, pengaruh soft power dan smart power Cina dengan mudah dapat diidentifikasi.

Penggunaan smart power oleh Negara-negara besar seperti Amerika dan Cina, perlu dikedepankan bagi Afganistan, karena memang mempunyai tingkat efektivitas yang baik bagi membangun pertahanan dan keamanan internasional. Smart Power yang merupakan hasil dari gabungan antara hard dan soft power kiranya dapat menjadi pintu masuk bagi Afganistan pasca keluarnya United States. Tidak berhenti pada kasus Amerika dan Cina, kasus penggunaan smart power Turki juga menarik dilihat lebih jauh.

Pun dengan keberadaan *smart power* dari negara-negara lain di dunia seperti Korea Selatan maupun Jepang. Stabilitas kedua Negara telah mampu mengantarkan mereka pada penggunaan smart power di dunia internasional. Adanya perusahaan-perusahaan Jepang dan Korea selatan di lintas Negara di dunia menandakan akan kemampuan dua Negara itu menggunakan strategi smart power bagi membujuk banyak Negara untuk dapat mengikuti kehendak mereka.

Fenomena merebaknya budaya Korea Selatan dan Jepang kemudian menjelma nyata di masyarakat. Di Indonesia misalnya fenomena masyarakat jaringan Korea Selatan maupun Jepang cukup memberi warna pada realitas keseharian masyarakat. Dengan adanya budaya populer mereka yang terekspose lewat film dan drama berseri dengan sendirinya telah memberikan keuntungan-keuntungan bagi perusahaan-perusahaan broadcasting Jepang maupun Korea Selatan. Artinya bahwa untuk dapat memberikan bujukan pada suatu Negara lain tidak harus dengan hard power melainkan dapat menggunakan strategi soft power maupun smart power.

Dalam konteks Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim yang cukup besar kiranya juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi mengembangkan *soft power* dan *smart power*-nya ke Afganistan. Kendatipun memang Indonesia secara tematik tidak ada dalam diskusi ini, tetapi dapat menjadi salah satu jalan bagi kerjasama Indonesia dengan negara manapun dalam rangka mewujudkan Afganistan yang harmonis. Afganistan dapat mengarahkan padangannya ke Indonesia sebagai negara

berpenduduk muslim moderat. Lebih jauh Cino-Pak dapat pula bekerjasama dengan Indonesia dalam kerangka *soft power* dan *smart power* bagi Afganistan ataupun bisa direalisasikan lewat kerjasama Afganistan-Indonesia.

Analisa studi-studi kasus penggunaan *soft power* dan *smart power* inilah kemudian yang hendak dipakai sebagai alat analisa tema tulisan ini. Oleh karena itu tulisan-tulisan ini memerlukan instrument dari keberadaan penggunaan-penggunaan *soft* dan *smart power* oleh Negara-negara di dunia internasional seperti Cina untuk kemudian di arahkan kepada Afganistan kini. Harapannya dengan begitu Afganistan perlahan tetapi pasti menjadi Negara aman damai ke depannya.

Pembahasan

1. Kegagalan Hard Power Amerika

Dua puluh tahun bukanlah jangka waktu yang pendek bagi sebuah perang antara Amerika dengan Afganistan (Taliban). Dalam kurun waktu yang begitu lama cita-cita untuk mendemokratisasi Afganistan tidak jua tercapai. Sebaliknya terjadi resistensi yang kuat dalam diri masyarakat Afganistan (Taliban), sehingga Taliban yang di keroyok oleh Amerika dan NATO tidak juga mampu menumpas keberadaan nya.

Alih-alih memenangkan perang justru United States telah mundur dari Afganistan dengan meninggalkan banyak korban jiwa, baik dari pihak-pihak yang bertikai langsung yaitu pasukan Amerika dan NATO maupun dari pihak Taliban serta masyarakat sipil. Dari berbagai laporan dapat dinyatakan di sini bahwa sejumlah korban perang Afganistan berjumlah 111.442 selama 16 tahun yaitu dari 2001-2016.⁴

Artinya bahwa kebijakan luar negeri Amerika yang diistilahkan oleh Joseph Nye sebagai *hard power* dapat dikatakan gagal dalam rangka membujuk Afganistan mengikuti kehendaknya. Konsekuensi dari kegagalan Amerika itu adalah fakta dari labilitas Afganistan sampai hari ini masih berlangsung. Taliban yang ia tuduh sebagai pelindung Al-qaida pun melebarkan sayap kekuasaannya di hampir semua wilayah Afganistan. Bahkan istana Presiden Afganistan yang di back up Amerika telah diambil alih oleh Taliban.

⁴ Watson Institute, Stanford University, Afganistan: 16 Tahun, Ribuan orang meninggal dan tidak jelas kapan akhirnya, 2017 sebagaimana dikutip repository UMY. Akses 30 Januari 2023.

Pada saat yang sama Taliban harus berusaha keras agar dapat meredam semua resistensi terhadapnya, baik dari sempalan-sempalan Taliban seperti pasukan pro pemerintahan sebelumnya, dari kelompok ISIS maupun kelompok –kelompok yang ingin membuat suasana tidak kondusif. Bagaimanapun sebelum Amerika datang konflik horizontal telah lama ada di Afganistan. Bahkan kemunculan Taliban ke atas panggung konflik Afganistan dipicu oleh pertikaian yang tidak pernah reda di antara kelompok-kelompok di Afganistan sejak Uni Soviet (Rusia sekarang) meninggalkan Afganistan tahun 1990-an silam.

2. Potensi Soft Power Amerika dan Cina

Soft Power merupakan kekuatan yang timbul dari citra baik yang dimiliki oleh sebuah negara. Begitupun dengan Amerika dan Cina, kedua negara ini sama-sama mempunyai kekuatan lunak. Sebagaimana konsep yang diajukan oleh Nye bahwa kekuatan lunak itu dapat timbul dari nilai-nilai seperti menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia dan demokrasi. Nilai-nilai terdahulu sering disuarakan oleh Amerika di dunia internasional. Pada saat yang sama fakta masyarakat Amerika mempunyai tingkat di atas rata-rata kesejahteraan hidup, adanya jaring pengaman sosial yang berjalan dengan baik, kesetaraan dalam keadilan, pemilihan yang demokratis juga mempunyai pengaruh kuat bagi dunia internasional.

Di sisi lain *soft power* Amerika juga datang dari dunia pendidikan⁵. Setiap tahun setengah juta mahasiswa berdatangan dari seluruh dunia untuk mengambil studi di berbagai universitas di sana. Kendatipun semua mahasiswa-mahasiswa itu tidak pulang dengan rasa puas, namun demikian rata-rata mereka mempunyai opini yang realistis dan positif terhadap Amerika yang kemudian menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dunia dalam melihat *soft power* Amerika.

Kekuatan lembut Amerika juga datang dari transmisi kebudayaan keluar Amerika⁶. Kondisi ini berlangsung lewat kehadiran film-film maupun program-program TV yang didominasi oleh kebudayaan populer. Selain itu ada juga pengaruh kesenian maupun tulisan-tulisan akademik memberikan pengaruh kuat pada kebudayaan yang

⁵ Joseph Nye, dalam buku: *Turbulent Peace The Challenges of Managing International Conflict*, Hal. 355, di edit oleh Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, dan Pamela Aall, United State Institute Of Peace Press; 2001, Washington D.C.

⁶ Op. cit.

ditransmisikan keluar Amerika. Pada kasus ini Nye menyebut bagaimana banyak pejabat Iran mengatakan bahwa Amerika adalah negara poros setan, tetapi sebenarnya ketika mereka melihat MTV mereka juga mengatakan banyak anak-anak muda Iran juga mau melakukan apa yang dilihatnya di MTV.

Soft power Amerika juga bisa datang dari keterlibatannya yang tinggi pada organisasi-organisasi internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), NATO, Inter American Human Rights⁷ dan lain-lainnya. Keterlibatan-keterlibatan itu secara tidak langsung telah memberikan pengaruh kuat Amerika kepada dunia internasional.

Selanjutnya mengenai kekuatan lembut yang dimiliki oleh Cina (Tiongkok). Parameter kekuatan lembut sama dengan yang tergambar pada tulisan di atas. Perbedaannya bisa jadi pada tingkat penerimaan mahasiswa-mahasiswa asing di Universitas-universitas Tiongkok.

Selain itu dapat dilihat juga keberadaannya, seperti derasnya eksport budaya Cina lewat program film ataupun program-program Tv yang mengambil genre drama seri. Film-film cina begitu banyak beredar di pasaran. Siapa yang tidak kenal dengan Jet Lie, Jacky Chan, Zhang Ziyi, Cho Yun Fa, Michael Yoh dan lain-lainnya.

Ekspansi kebudayaan China begitu massif ke seluruh dunia. Menandakan bahwa ada program yang memang dengan sengaja hendak disiarkan oleh masyarakat Cina ke seluruh dunia bagi memperlihatkan kebudayaan Cina yang sosialis. Keterlibatan Cina juga ada pada organisasi-organisasi internasional. Terlibat di dalam badan Wprld Trade Organization (WTO) misalnya, Adanya organisasi Internasional kemanusiaan China yang membantu para korban gempa Nepal dan di gempa Banten baru –baru ini di Indonesia. Selain itu Cina juga salah seorang anggota perserikatan Bangsa-Bangsa pemegang hak veto.

3. Kekuatan Soft Power Cina-Pakistan

Hubungan antara Cina dengan Pakistan merupakan hubungan strategis di antara dua negara. Cina dan Pakistan di samping dekat secara geografis sebagai negara tetangga, keduanya juga sama-sama mempunyai kepentingan perbatasan dengan India

⁷ Ibid. Hal. 355

yang lebih tendensius ke sekutu Barat (Amerika). Cina misalnya dengan India baru-baru ini berkonflik mengenai perbatasan. Sedangkan Afganistan dengan India merupakan satu negara yang pecah menjadi dua negara. Dalam kondisi itu pula keduanya (Pakistan dan India) terus-menerus mengalami hubungan panas-dingin.

Oleh karena itu hubungan Cina-Pakistan sepertinya saling melengkapi guna sama-sama menghadapi dinamika dengan India. Lebih dari itu kerjasama diberbagai bidang antara Cina dengan Pakistan merupakan kerjasama yang sudah lama terjalin di mana proyek-proyek infrastruktur Pakistan banyak dikerjakan bersama Cina sebagai sekutu dekat.

Dengan profil hubungan Cina-Pakistan itu nampak merupakan hubungan yang dapat menjadi sumber kekuatan bagi kawasan dalam rangka memberi sinyal positif guna memerankan peran strategis. Hubungan dekat Cina-Pakistan dapat menjadi hubungan yang dapat ditiru oleh Afganistan yang kini tengah dikuasai Taliban. Hubungan Cina-Pakistan dapat menjadi suar bagi memandu Afganistan guna ikut terlibat dalam kerjasama yang lebih baik setelah Amerika keluar dari Afganistan sendiri.

4. Soft Power dan Smart Power Sebagai Strategi Penting Di Kawasan

Kekuatan Hard Power The United States tidak membuahkan hasil memuaskan bagi penyelesaian persoalan-persoalan di Afganistan. Oleh karena itu strategi yang ditawarkan pada konteks Afganistan adalah strategi soft power dan smart power dari negara-negara besar seperti USA maupun Cina-Pakistan sebagai yang paling dominan peran dan pengaruhnya di kawasan. Apalagi Taliban di Afganistan menyeru kepada dunia bahwa mereka tidak akan memberikan tanah Afganistan sebagai tempat bermukim atau berpangkalan kelompok-kelompok teroris lagi. Tanah Afganistan tidak boleh dipakai oleh teroris untuk mengganggu negara lain atau negara yang berbatasan dengan Afganistan. Demikian seruan pemimpin baru Afganistan ketika mereka berhasil menduduki Kabul setelah The United States pergi.

Taliban harus diberi kepercayaan. Apalagi ketika menit-menit ketika masyarakat USA hendak meninggalkan bandara Afganistan, Taliban tidak melakukan hal-hal gila seperti mencoba mengganggu penerbangan. Mereka juga tidak membuat kerusuhan terhadap kondisi yang sedang tidak menentu pada saat itu. Mereka membiarkan pihak-

pihak internasional seperti wartawan dan para pekerja internasional seperti penerjemah yang pernah berkerjasama dengan USA selama di Afganistan untuk memilih pergi atau bertahan di Afganistan. Singkatnya Afganistan tidak melakukan keberutalan pada moment-moment genting ketika kekuatan USA hendak keluar dari Afganistan.

Diskusi

1. The United States Tidak Dipercaya

Meskipun dengan sekuat tenaga The United States mencoba untuk memformat Afganistan sedemikian rupa guna mengikuti alur atau irama yang ditabuh USA, namun demikian Afganistan dengan Taliban sebagai kekuatan yang diperhitungkan tidak juga berubah. Alih-alih hendak mendemokratisasi Afganistan, justru resitensi dari kelompok-Taliban tidak pernah surut sejak The United States memasuki Afganistan 20 tahun silam. Pada kondisi demikian hanya korban perang saja yang berjatuh di setiap waktu, namun tidak berimplikasi pada perubahan yang dikehendaki.

Pertanyaannya mengapa terjadi demikian? Jawabnya karena USA sendiri sebagai pemimpin perang di Afganistan dilihat sebagai agen yang tidak jujur. Dunia internasional sudah lama tidak mempercayai Amerika. Banyak praktik USA berlaku sebaliknya dari cita-cita awal sebagai pelopor negara demokrasi, sebagai pelopor kebebasan, sebagai negara penegak HAM, namun pada saat yang sama USA melukai demokrasi, kebebasan dan HAM itu sendiri.

Demokrasi misalnya ketika Saddam Husein dipilih oleh masyarakat Irak untuk memimpin kembali Irak pada tahun 2003⁸, justru dicarikan alasan untuk menginvasi Irak. Alhasil alasan untuk mencari senjata pemusnah massal itu tidak terbukti keberadaannya di Irak. Kebebasan pada pengertian Amerika bisa jadi bukan kebebasan dalam pengertian dunia lain. Sejauh yang dipahami secara moderat kebebasan dapat di terima, namun jikalau kebebasan yang dikehendaki adalah kebebasan tanpa batas maka ini juga akan menjadi alasan masyarakat lain untuk bertahan.

⁸ Siti Muti'ah Setiawati, *Irak dibawah Kekuasaan Amerika: Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (rakyat) Indonesia*, Jurusan Hubungan Internasional UGM Kerjasama dengan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2004.

Misalnya kebebasan yang tidak memberi keuntungan signifikan terhadap suatu masyarakat sebuah negara, di mana semua sumber daya yang dimiliki hendak dinikmati oleh mereka, namun yang mengambil hak besar pengelolaannya adalah perusahaan-perusahaan USA juga. Pada konteks Afghanistan Amerika tidak sekedar menasar Al-Qaida tetapi juga hendak menasar sumber daya alam Afghanistan sebagai negara yang berada di cekungan kaspia. Ada kekayaan energy (minyak) yang sangat besar terkandung dalam perut bumi Afghanistan. Artinya jika memang Amerika hendak bermaksud mengambil keuntungan mestinya Amerika harus bersabar sembari mengusahakan format kerjasama yang sama-sama menang di antara Amerika dan Afghanistan.

Bukan mencari-cari celah untuk mengobrak-abrik Afghanistan di mana ketika Amerika mencurigai Taliban menyembunyikan Al-Qaida, Amerika tidak memberikan bukti-bukti kuat terhadap keterlibatan Al-Qaida tersebut ketika peristiwa WTC dan gedung Pentagon dihancurkan oleh teroris. Dengan demikian Amerika tidak menghormati keberadaan masyarakat Afghanistan dengan sikap buru-burunya menuduh dan menginvasi Afghanistan. Seolah sikapnya membernarkan niat terselubungnya yang sudah sangat mendambakan sumber daya alam Afghanistan untuk dieksploitasi.

Amerika juga sering mengatasnamakan HAM bagi memperluas pengaruhnya di dunia internasional. Seolah hanya United Statesnya yang mengerti mengenai HAM. Terbukti sekali lagi justru Amerika yang tidak mengerti HAM, justru sebaliknya menginjak-injak HAM itu sendiri. Kasus perang Irak tahun 2003 memperlihatkan itu, di mana seluruh dunia berseru dari Eropa, Asia sampai Afrika agar tidak menyelenggarakan perang di Irak karena hanya akan memakan korban jiwa manusia (masyarakat sipil yang tidak berdosa). Sebegitu kuat gelombang penolakan masyarakat dunia agar hati para pemimpin Amerika luluh agar tidak memerangi Irak, namun Irak pun telah merasakan betapa ganasnya Amerika sebagai negara pelopor HAM itu.

Bercermin dari kasus-kasus terdahulu, pantaslah masyarakat Afgansitan khususnya Taliban dan masyarakat yang berdiri mendukungnya tidak mau mengikuti kehendak Amerika dengan mudah. Justru perlawanan terus-menerus yang didapatkan. Sampai titik waktu di mana pemerintah dan masyarakat Amerika jenuh di Afghanistan.

Tidak berhenti pada kasus demokrasi, kebebasan dan HAM, aib Amerika juga terkuak pada kasus Israel di Palestina. Betapun banyak korban yang menjadi pesakitan, namun demikian Amerika tetap saja memberikan dukungannya yang luar biasa kepada Israel. Dikatakan bahwa bantuan luar negeri terbesar Amerika diperuntukkan guna menyokong militerisme Israel terhadap Palestina. Menurut data dari Foreign Assistance Amerika Serikat, pada 2020 negeri Paman Sam menggelontorkan bantuan kepada Israel sebanyak US\$ 3,3 miliar. Berdasarkan keterangan dari Congressional Research Service (CRS), hampir seluruh bantuan yang disalurkan adalah bantuan militer. Kesepakatan ini telah diteken oleh mantan Presiden Obama pada 2016 dan direncanakan berlaku hingga 2028.⁹ Dalam pada itu tidak nampak adanya kehendak serius United Statesnya untuk mencoba membuat perdamaian abadi antara Israel dengan Palestina.

Jika memang Israel membutuhkan daratan dan itu adalah daratan Palestina, mengapa Amerika tidak berdiri di tengah-tengah dalam rangka mencegah konflik berkepanjangan di sana. Jikalau Israel memerlukan daratan Palestina mestinya Amerika pro aktif terlibat memberikan solusi menang-menang di antara dua bangsa tersebut. Misalnya Israel tidak boleh mendominasi di daratan Palestina. Israel tidak boleh sewenang-wenang mengambil hak-hak masyarakat Palestina. Dalam pada itu Amerika tetap mendukung dan memberikan bantuan bagi Israel untuk terus menggulung keberadaan masyarakat Palestina.

Belum lagi kasus ISIS di mana pada kelompok ini tidak ditemukan Islam di dalamnya¹⁰. Kelompok ini buatan kekuatan luar entitas Islam sebagai agama maupun sebagai masyarakat politik sebuah negara. Pada kenyataan selanjutnya peran kelompok Yahudi dikatakan sangat berperan besar dalam rangka mengorganisir keberadaan ISIS itu.

Pun ketika United States lengser dari Afghanistan, ISIS inilah yang seolah di pasang untuk membuat suasana konflik di Afghanistan. Artinya ketika ISIS ini sebagai kekuatan abu-abu yang dimanfaatkan oleh yang berkepentingan, Amerika tidak pernah merasa

⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/israel-negara-paling-banyak-terima-bantuan-dari-amerika-serikat>, Akses tanggal 03 Februari 2023

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160504101750-134-128575/menyusup-ke-isis-jurnal-is-perancis-tidak-menemukan-islam>. Akses 03 Februari, 2023.

terganggu dengan keberadaannya. Tidak pernah Amerika seresah ketika seperti memberikan perhatian kepada Al-qaida. ISIS tidak pernah diperangi langsung oleh Amerika di Afganistan, sehingga masyarakat internasional juga mulai mempertanyakan komitmen Amerika untuk menghancurkan terorisme. Justru sekarang sepeninggal Amerika di Afganistan, ISIS semakin merajalela di sana dan bertanggung jawab terhadap puluhan kali bom meledak.

2. Soft Power Amerika Vs Soft Power Cina

Dunia internasional sudah memaklumi Amerika sebagai kekuatan dunia yang hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Amerika mempunyai kekuatan Hard Power (kekuatan senjata dan militer) yang tidak dapat disampingkan keberadaannya. Bahkan sangat menonjol di dunia Internasional. Pun dengan keberadaannya sebagai pemilik soft power, juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Amerika mempunyai banyak pengaruh di dunia internasional akibat dari kekuatan soft powernya.

Bahkan soft power amerika juga timbul dari alat telekomunikasi terbaru saat ini. Dunia mana yang tidak bergantung pada aplikasi-aplikasi telepon genggam buatan Amerika? Ada Facebook, Goggle sang pencari data yang canggih, Youtube, Whatsapp dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak saja memberikan pengaruh besar kepada dunia, namun juga lebih tinggi dari pengaruh yaitu ketergantungan. Masyarakat dunia sudah merasa tidak nyaman tanpa aplikasi-aplikasi itu. Sayang seribu kali sayang alternative yang tersedia juga tidak banyak.

Selanjutnya penulis tidak akan banyak menggambarkan *soft power* Amerika karena Amerika sendiri telah diketahui masyarakat internasional sebagai memang negara hegemon. Masyarakat internasional sudah memaklumi peran dan pengaruh Amerika yang sangat luas di dunia internasional. Sedangkan Cina baru –baru mulai membayangi keberadaan Amerika sendiri baik sebagai yang mempunyai potensi hard power ataupun sebagai soft power dan smart power.

Cina dapat dikatakan sebagai kekuatan kedua setelah Amerika saat ini, di mana ekonomi Cina dengan nilai \$US 14 triliun, lalu Cina juga mempunyai Gross Domestic Product (GDP) tertinggi (IMF, 2018), Cina juga merupakan eksportir terbesar dengan pencapaian hingga \$US 2.26 miliar .pencapaian-pencapaian Cina ini turut memberikan

sumbangan besar kepada pergerakan ekonomi dunia (World Bank, 2018)¹¹. Kondisi terdahulu dibuktikan dengan fenomena kerjasama yang diinisiasi oleh Cina sendiri dengan ratusan negara mulai dari Asia, Afrika sampai Eropa. Kerjasama raksasa itu bernama Belt Road Initiative (BRI) atau dikenal pula dengan istilah *One Belt One Road* yang dahulu di zaman lampau diistilahkan dengan nama Silk Road.

Dengan kemampuan Cina sebagai lokomotif kerjasama BRI ini dipastikan kekuatan lembut Cina telah merambati kehidupan masyarakat internasional. Cina sebagai negara penginisiatif dapat dipastikan mempunyai kekuatan hard power dan material lainnya seperti kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya yang diperlukan bagi kewibawaannya di dunia internasional. Ini sangat berharga bagi melakukan persuasifitas kepada masyarakat internasional untuk bersama-sama menatap masa depan yang lebih baik.

BRI pada tahun 2015 tepatnya di bulan September Cina telah membiayai 2057 proyek di 49 negara. 10 Bank Pembangunan Cina juga telah membiayai lebih dari 400 proyek di 48 negara (Aoyama; 2016)¹² sebagaimana dikutip Muhammad Faizal Alfian dalam review hubungan internasional 2020. Kemudian Mei 2017, Forum One Belt One Road (KTT OBOR) pertama diadakan di Beijing yang dihadiri oleh para pemimpin negara dan pemerintah dari 29 negara dan lebih dari 1.600 peserta berasal dari lebih dari 140 negara dan 80 organisasi Internasional. Pada Juli 2018, lebih dari 265 *item* dari 279 *item* pada daftar hasil Forum OBOR telah selesai. Sementara 14 *item* lainnya masih dalam proses pengerjaan. China telah membuka jalur kereta api terpanjang di dunia yang menghubungkan China hingga ke Eropa. Dengan ini membuka peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan di sepanjang jalur tersebut baik jalur sutra darat di utara maupun jalur sutra maritim di selatan¹³.

Dengan demikian *soft power* Cina tidak sekedar kekuatan diplomasi melainkan telah menjelma menjadi kekuatan smart power. Dalam kacamatan Nye kebijakan yang

¹¹ Yoga Suharman dan Sugiarto Pramono, Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pendekatan Long Cycle Transisi Kekuasaan Politik Dunia, Jurnal SPEKTRUM, Vol 18 No. 1, 2021

¹² Muhammad Faizal Alfian, Transisi Cina Terhadap Ekonomi Global: Internasionalisasi Dalam Perspektif Pembangunan Model China Dan Dinamika Regional, Dalam Review Hubungan Internasional 2020.

¹³ <https://hmj-hi.umm.ac.id/id/pages/ir-fact-and-issue-2-7276/belt-and-road-initiative-sebagai-strategi-konektivitas-china-dalam-globalisasi.html>, Akses tanggal 02 Februari 2023

memberikan pengaruh persuasive dengan memulai gerakan BRI Cina telah menjadi pemilik *soft power*. Lalu kebijakan tersebut di ekskusi di lapangan sehingga berubah menjadi kekuatan cerdas (*smart power*).



Sumber: <https://hmj-hi.umm.ac.id/id/pages/ir-fact-and-issue-2-7276/belt-and-road-initiative-sebagai-strategi-konektivitas-china-dalam-globalisasi.html>. Akses tanggal 02 Februari 2023

Demikian penggambaran mengenai kekuatan *soft power* Cina di dunia internasional. Tidak berhenti di situ kekuatan *soft power*nya juga sejalan dengan *smart power*nya, di mana Cina merealisasikan gagasan-gagasannya itu, sehingga *smart power*nya juga muncul di permukaan panggung internasional.

Di sisi lain keterlibatan Cina dalam organisasi internasional seperti sebagai pemegang hak veto di perserikatan bangsa-bangsa, keterlibatan Cina di Organisasi Perdagangan dunia (WTO), UNDP dan lain-lainnya juga merupakan sumber-sumber kekuatan *soft power* Cina. Belum lagi keterlibatan organisasi Lembaga suadaya masyarat Cina, yang baru-baru ini juga aktif membantu korban Gempa di Nepal. Membantu korban gempa di Banten Indonesia baru-baru ini.

3. Soft Power Cina-Pakistan di kawasan

Inisiatif Cina membuat peta jalan kerjasama dengan banyak negara di dunia internasional, Cina tentunya juga sangat memperhatikan kondisi di sekitar kawasan terdekatnya yaitu di Asia selatan sampai dengan Asia timur tengah. Jangankan dengan negara yang dekat-dekat, dengan negara-negara yang jauh seperti deretan negara-negara Afrika, Cina menjalin kerjasama yang sangat intensif. Pada konteks bertetangga, Cina bersama Pakistan sudah tentunya menjalin kerjasama yang erat. Apalagi dalam menghadapi Afganistan maupun negara-negara sekitarnya yang memang sudah menjadi tekad kuat Cina untuk menggandengnya.

Dengan kerjasama Cina-Pakistan memungkinkan bagi kedua negara untuk bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan di kawasan. Pada konteks menghadapi Afganistan poros Cina-Pakistan tentunya diharapkan mempunyai peran yang dominan agar Afganistan kini bisa meredakan konflik dan ketegangan yang tiada berujung di Afganistan. Cina –Pakistan dapat menjadi saluran besar bagi Afganistan untuk bisa keluar dari keterpurukannya.

Afganistan dapat menjadi negara yang lebih baik dengan poros kerjasama *tripartit* antara Cina-Pakistan dengan Afganistan. Peran kerjasama Cina-Pakistan dapat menjadi perantara bagi Afganistan untuk berusaha memulai perdamaian dengan berbagai kelompok yang berpengaruh bagi stabilitas Afganistan. Poros Cina –Pakistan sebagai dua negara tetangga yang pada kondisi tertentu mempunyai kesamaan cita-cita dalam rangka membendung pengaruh India di kawasan. Pada posisi demikian kemitraan Cina-Pakistan ini menjadi hal yang solid bagi membangun kerjasama yang lebih jauh bagi mendinginkan situasi Afganistan kini.

Ketika peran Amerika di Afganistan sudah surut maka harapannya kekuatan hard power, soft power dan smart power Cina yang berkolaborasi dengan Pakistan dapat menjadi penengah di antara kelompok-kelompok yang selama ini menjadi biang labilitas Afganistan. Kesolidan hubungan antara Cina-pakistan dapat menjadi inisiator bagi melakukan kembali berbagai upaya perdamaian di internal Afganistan sehingga Afganistan mampu membawa diri keluar dari kemelut dan menjadi negara yang aman damai.

Sebagaimana yang terjadi di lapangan, awetnya konflik yang terjadi di Afganistan tidak terlepas dari kecurigaan antara satu etnis/ kelompok dengan etnis/kelompok

lainnya. Sedangkan etnis/kelompok yang satu dengan etnis /kelompok yang lain bersaing untuk memperoleh pengaruh dan kuasa di Afganistan. Pada saat yang sama apa yang diistilahkan dengan *tier warlod* dan *regional strong man* juga berperan dalam mempersulit penguraian konflik. *tier warlod* seperti kelompok militer yang ikut memprovokasi atau terlibat di dalam mempertajam konflik. Bagaimanapun *tier warlod* berpihak kepada salah satu etnis/kelompok yang satu kemudian mengompori etnis/kelompok tersebut untuk memerangi etnis/kelompok yang lain dalam rangka mempertahankan kepentingan militer di Afganistan. Belum lagi adanya *regional strong man* yang berpengaruh pada etnis/kelompok yang ada memungkinkan arah perdamaian menjadi semakin menanjak untuk di daki. Bagaimanapun *regional strong man* mempunyai pengaruh untuk diikuti kehendaknya. Sementara *regional strong man* wilayah yang satu dengan wilayah yang lain belum tentu adanya kesatuan kehendak guna mewujudkan Afganistan yang damai.

Dengan kompleksitas konflik /perang di antara masyarakat internal Afganistan maka menjadi semakin sulit mengkondisikan perdamaian apabila di dalamnya ada unsur luar seperti keterlibatan Amerika selama ini di dalamnya. Bahwa harus diingat sejarah Afganistan adalah sejarah yang kental dengan *proxy* dua kutub kekuatan di mana Uni Soviet (dahulu) vs. Barat Amerika di pihak berlawanan. Pada kondisi demikian dapat dipastikan bagaimana tidak kondusifnya situasi kondisi di Afganistan. Di antara mereka saja terdapat persaingan untuk mewakili etnis/kelompoknya, lalu belum lagi persaingan pengaruh dua kekuatan yang berebut *proxy*.

Alternatifnya memang keterlibatan militeristik luar harus dihentikan. Uni Soviet harus pergi begitu juga dengan Barat United States juga harus meninggalkan Afganistan dalam pengertian penggunaan *hard power* dari kekuatan mana pun tidak dapat memberikan kebaikan bagi Afganistan. Justru menjadi tambahan rumitnya konflik yang terjadi di sana. Kekuatan *hard power* dari Barat United States sama saja dengan Uni Soviet dahulunya tidak dapat diharapkan untuk penyelesaian konflik di Afganistan.

Oleh karena itu penggunaan *soft power* dan *smart power* yang dipondasikan pada kekuatan *hard power* perlu menjadi perhatian United States dan Cina-Pakistan di kawasan, khususnya untuk menangani Afganistan yang hendak menjadi negara saat ini. Bersamaan dengan itu dihimbau bagi United States di barat untuk lebih mengedepankan

kejujuran dari pada mengedepankan standar ganda dalam penggunaan soft power dan smart powernya. United States harus bisa puas dengan ambisinya.

United States tidak bisa menggantikan *greed* dengan *grievance*. Seolah selama ini Amerika sebagai pihak yang mengeluh padahal jikalau diamati lebih jauh Amerika menyembuyikan *greed*-nya dibalik *grievance* -nya. Amerika sudah mempunyai pengaruh begitu luas, mendapatkan hak-hak nya yang istimewa di dunia internasional sebagai hegemon, namun pada saat yang sama Amerika selalu merasa tidak puas untuk dapat memasuki sebuah negara “kecil” bernama Afganistan untuk supaya bisa mengambil keuntungan di dalamnya karena Afganistan sebagai cekungan Kaspia.

Disebabkan *track record* United States (Amerika khususnya) di Afganistan dan dunia internasional yang sering dinilai sebagai standar ganda, maka untuk masa kekinian peran Cina khususnya dan Cina-Pakistan menjadi sangat diharapkan untuk dapat merehabilitasi Afganistan. Cina dengan kekuatan hard power (stabilitas negaranya yang didukung kemampuan militernya), soft power Cina yang mampu mengorganisir ratusan negara di dunia dalam kerangka kerja sama ekonomi BRI, *smart power* Cina yang menggelontorkan kekuatan finansialnya di seluruh kawasan BRI dirasa bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Afganistan. Apalagi dengan menggandeng Pakistan sebagai mitra yang tidak dapat dipisahkan dengan Cina dirasakan semakin prospek bagi menciptakan perdamaian di kawasan. Bagaimana pun hubungan Pakistan-Afganistan secara historis terdapat jalinan emosi sebagai dua negara yang pernah bersama di masa lalu sebagai bagian dari Kerajaan Mugal. Hanya saja kini peran-peran negara besar yang mempunyai standar ganda harus diakhiri, sehingga memungkinkan kedua masyarakat Afganistan-Pakistan bisa berjalan bersama.

Tambahan pula, Cina sebagai negara yang tidak mempunyai *track record* menginvasi negara lain semakin memberikan peluang besar baginya untuk meningkatkan perannya. Dengan *track record* demikian negara lain seperti Afganistan akan lebih mudah menerima Cina dari pada negara yang mempunyai track record “kasar” terhadap negara-negara lain tanpa alasan yang kuat dan jelas. Cina walaupun dengan kemampuan militernya yang bagus, namun tidak serta merta menempatkannya di Afganistan. Artinya bahwa Cina lebih mengedepankan *soft* dan *smart power*-nya. Hal ini tentu saja akan semakin memberikan nama baik bagi Cina di mata Afganistan.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah memperlihatkan kekuatan Cina khususnya dan kemitraan Cina-Pakistan mampu “memukul” Amerika secara halus untuk tidak lagi memaksakan diri di Afganistan khususnya dan di dunia internasional umumnya. Bagaimana pun menurut Nye bujukan dan atau persuasi jauh lebih efektif dari pada bujukan yang bersifat memaksa dan kasar.

Sejauh ini konsep soft power dan smart power nampaknya cukup prospek bagi menciptakan pengaruh damai bagi dunia internasional khususnya Afganistan. Dengan adanya alternative kekuatan soft dan smart power yang dimiliki dan diperankan oleh Cina dapat menjadi kekuatan pembendung agar United States tidak lagi sewenang-wenang dalam pergaulan internasional. Kekuarangan penelitian ini adalah tidak bisa menampilkan wajah besar United States secara menyeluruh, sebagai kumpulan negara yang kerap menggunakan grievance untuk menyembuyikan greed-nya. Fakta-fakta greed-nya terhampar cukup luas dan banyak tetapi tidak bisa dideskripsikan di sini. Oleh karena itu penelitian lanjutannya adalah bagaimana agar United Statesnya tidak lagi memposisikan diri sebagai korban padahal sejatinya posisi mereka adalah agresi yang berbalutkan keluhan-keluhan. Ia Nampak sebagai bersama orang terzhalimi tetapi sebenarnya United Stateslah yang menzhalimi dirinya dan menzhalimi orang lain.

References

- Barston R.P., Modern Diplomacy, 1989, Longman Group UK and Longman Incorporate; New York.
- Buğra Sarı (Universitas Gazi - Universitas Bilkent), Ismail Erkam Sula (Universitas Bilkent), An Analysis On The Concept Of Smart Power: Its Application On Turkish Foreign Policy, Paper prepared for the ISA Annual Convention, Toronto 2014, Wednesday, March 28th, 2014 08:15 AM, Panel Title: "Turkey's Use of Soft Power"
- Gray Jerry D. American Shadow Government Pemerintah Bayangan Amerika, Sinergi Publishing Kelompok Gema Insani, 2005, Jakarta.
- Haris Umiyati, Penyelesaian Konflik Afganistan-Pakistan: Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, 2016.

<https://hmj-hi.umm.ac.id/id/pages/ir-fact-and-issue-2-7276/belt-and-road-initiative-sebagai-strategi-konektivitas-china-dalam-globalisasi.html>, Akses tanggal 02 Februari 2023

https://www.liputan6.com/global/read/5179960/taliban-minta-organisasi-kerja-sama-islam-tak-campuri-urusan-afghanistan?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Top. Akses tanggal 20 Januari 2023

Hurun'in Irza, Tantangan Bina Damai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil Di Afganistan. *Jurnal Transformasi Global* volume 3, Nomer 1. 2010

Joseph S. Nye, "Smart Power and the War on Terror", *Asia- Pacific Review*, Vol 15, No 1, 2008, p. 6.

Muhammad Faizal Alfian, Transisi Cina Terhadap Ekonomi Global: Internasionalisasi Dalam Perspektif Pembangunan Model China Dan Dinamika Regional, Dalam *Review Hubungan International* 2020.

Nye Joseph, *Turbulent Peace The Challenges of Managing International Conflict*, United State Institute of Peace Press, 2001, Washington DC.

Watson Institute, Stanford University, Afghanistan: 16 Tahun, Ribuan orang meninggal dan tidak jelas kapan akhirnya, 2017 sebagaimana dikutip repository UMY. Akses 30 Januari 2023.

Yoga Suharman dan Sugiarto Pramono, Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pendekatan Long Cycle Transisi Kekuasaan Politik Dunia, *Jurnal SPEKTRUM*, Vol 18 No. 1, 2021

ANALISIS PSIKOLOGIS TENTANG NALAR POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TIAP PEMILIHAN UMUM

Pahrizal Ikrom

Universitas Nahdlatul Wathan
pahrizaliqrom@gmail.com

Abstract

Penelitian ini membahas larangan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam urusan politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Meskipun dilarang secara hukum, PNS sebagai makhluk politik memiliki dorongan untuk terlibat dalam politik, dan banyak individu yang memanfaatkan posisi dan fasilitas negara untuk memajukan karir mereka melalui cara politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana individu sebagai makhluk bebas memenuhi kebutuhan politik mereka sambil menjadi PNS dan menghadapi larangan keterlibatan politik. Studi ini menyimpulkan bahwa keterlibatan politik oleh PNS tidak dapat dihindari karena manusia adalah makhluk politik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan sistem pemantauan dan penegakan yang lebih efektif untuk mengatur keterlibatan politik oleh PNS dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mempertahankan netralitas dan objektivitas saat menjalankan tugas mereka. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika yang rumit dari keterlibatan politik oleh PNS dan menekankan perlunya penelitian lebih lanjut di bidang ini.

Kata Kunci : Administrasi Publik, PNS, Politik, Netralitas, Kebutuhan Bertingkat



Pendahuluan

Menurut salah seorang perintis Ilmu Administrasi, Dwight Waldo¹ bahwa administrasi publik memiliki 2 (dua) pengertian; pertama Administrasi sebagai sebuah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan yang kedua, administrasi sebagai suatu seni dan ilmu yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Sedangkan menurut pandangan Felix A. Nigro² menjelaskan administrasi publik merupakan suatu aktivitas kerjasama kelompok dalam ruang lingkup publik, diantaranya; ruang yudikatif, legislatif dan eksekutif sebagai bentuk upaya menciptakan kesejahteraan publik.

Setidaknya terdapat 23 pengertian tentang Ilmu Administrasi Publik dari berbagai pakar. Dua di atas merupakan pendapat yang sering dipergunakan oleh para sarjana administrasi publik.

Berbicara masalah pilkada berarti berbicara masalah pesta demokrasi di tingkat daerah, baik tingkat satu (provinsi) maupun tingkat dua (kabupaten). Pesta demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih wakilnya sendiri sebagai pengelola, manager, pemimpin untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Demokrasi berasaskan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, itu artinya rakyatlah yang berdaulat menentukan dirinya memilih dan dipilih. Namun semeriah apapun perayaan pesta demokrasi yang digelar ada beberapa orang harus menahan diri untuk tidak ikut atau diikutkan, sebab dapat melanggar kode etik di mana mereka bekerja secara profesional. Mereka yang dalam tulisan ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga diri kalau tidak mau diberi sanksi bertahap yang berujung pemecatan. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjaga netralitas mereka guna menjalankan kinerja birokrasi pemerintahan.

¹ J Bennett, *The Enchantment of Modern Life* (degruyter.com, 2016) <<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400884537/html>>.

² Pan Suk Kim, 'The Development of Modern Public Administration in East Asia', *International Review of Administrative Sciences*, 83.2 (2017) <<https://doi.org/10.1177/0020852316685162>>.



Aparatur paling miris kondisi kebatinannya, diminta netral dalam kontestasi politik namun mereka memiliki hak suara. Jika mereka mempunyai hak suara, maka tentunya mereka berhak menyalurkan pilihannya sesuai dengan harapan mereka. Mereka berhak mengetahui *Track Record* calon Pejabat politik yang akan mereka pilih.

Netralitas birokrasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Netralitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN dalam UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.³ Namun apa yang terjadi di lapangan, Banwaslu tetap saja menemukan adanya dugaan mobilisasi ASN dan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh calon Pertahana. Pertanyaannya kemudian apakah ancaman sanksi administrasi dan sanksi hukum yang diterapkan kurang memberikan efek jera atau ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Fakta inilah yang membuat rusak implementasi Administrasi Publik karena Politik, namun Politik merupakan bagian dari Administrasi Publik. Meskipun demikian kebijakan perlu di koreksi agar lebih tepat kedepannya, sehingga aparatur dapat bekerja secara Profesional dan tentunya kenyamanan.

Adapun beberapa larangan tersebut ialah:

1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.
2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.
3. Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.
4. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarkan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial.
5. Dilarang foto bersama calon .
6. Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol.⁴

³ Gustiana & Achmad Zulfikar, dalam Proseding Seminar Nasional Pilkada Serentak, Universitas Hasanudin, 10 November 2015. h 1-261.

⁴ <http://aceh.tribunnews.com/2018/02/20/7-larangan-pns-di-tahun-politik-dari-beri-like-sosmed-hingga-foto-bareng?page=2> 06:12 06/05/2018



Dalam psikologi kepribadian adalah produk dari faktor perkembangan dan faktor sosial.⁵ kita mengenal teori psikoanalisa, behavior dan humanistik di mana seorang manusia bertindak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Psikoanalisa berbicara tentang tindakan seseorang yang lebih banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya (Id, Ego, Super Ego). Sedangkan behavior berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Berbeda dengan psikoanalisa dan behavioristik, humanistik berbicara tentang tindakan manusia yang dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis yang bertingkat.

Tindakan manusia dalam konteks ini dapat dilihat dari tiga mazhab besar ilmu psikologis di atas. Apapun bentuk aktivitasnya bisa dipastikan memiliki faktor-faktor pemicu, baik secara sadar maupun tidak disadari dalam diri (internal) dan juga faktor yang melatarinya dari luar (eksternal). Sedangkan manifestasinya berupa realisasi dari tindakan itu sendiri, seperti berjalan, berfikir, membaca, makan dan lain sebagainya. Politik sebagai sebuah aktivitas sosial sudah pasti memiliki faktor pemicu baik yang ditimbulkan dari internal (kesadaran) maupun eksternal (lingkungan). Hubungan saling kait mengait antara pengaruh internal dan eksternal ini dinamakan “nalar politik” menurut Muhammad Abed Al Jabiri dalam buku yang berjudul Sosiologi Politik Islam.

“Menurutnya, sebagai “nalar” faktor pemicu dan juga manifestasi dari aktivitas politis, tunduk kepada logika internal yang menentukan dan mengorganisir relasi-relasi yang ada di dalamnya, yaitu logika dengan ciri, prinsip dan mekanisme yang bisa deskripsikan. Sedangkan sebagai “politik”, fungsinya bukan untuk memproduksi pengetahuan melainkan mempraktikkan kekuasaan pengendalian atau menjelaskan cara-cara mempraktikkan kekuasaan tersebut.”⁶

Dengan menggunakan pendekatan psikoanalisa alam bawah sadar Sigmund Freud dan bawah sadar kolektif Carl Jung, Abed al-Jabiri membongkar nalar politik

⁵ Bulent Akot, ‘The Perspective of Psychological Freedom and Avoiding Freedom According to Erich Fromm’, *Hamdard Islamicus*, 43.2 (2020).

⁶ M. Abed al-Jabiri, *Sosiologi Politik Islam “pendekatan Historis-kritis*, terj. M. Firdaus (Jakarta: Gelar Hidup, 2016), h. vii



Islam yang dalam kesimpulannya adalah masyarakat Islam arab tergerak oleh tiga faktor pemicu alam bawah sadar kolektif yang pertama akidah (ideologi). Ketika masyarakat Islam dihadapkan pada pilihan-pilihan secara tidak sadar akan diarahkan dengan faktor pemicu “kesamaan ideologi”, islam versus kafir, sehingga wajar jika masyarakat muslim akan memilih dan memperjuangkan seorang calon pemimpin atas nama keyakinannya, memperjuangkan akidah.

Kedua kabilah (kesukuan), apabila masyarakat muslim dihadapkan dengan aktivitas politik maka secara otomatis melalui alam bawah sadar kolektif mereka akan memilih dan mendukung orang yang lebih dekat dengan suku mereka atau kesamaan asal usul dan lain sebagainya. Ketiga ghanimah (ekonomi), atas dasar kekaguman dan keyakinan orang akan lebih cenderung memilih dan memperjuangkan seseorang yang lebih mapan, kaya dan darah biru dari pada orang yang biasa-biasa sebab dalam pemikiran mereka kecil kemungkinan akan melakukan korupsi atau terbersit dalam pikiran mereka orang kaya akan bisa membiayai perjuangan cost perjuangan politik mereka.

Namun dalam paper ini penulis tidak akan membahas lebih dalam tentang nalar politik Abed al-Jabiri lebih dalam, penulis akan meminjam konsep “nalar” dan konsep “politik” sebagai acuan membedah dan membatasi pembahasan hanya pada kebutuhan bertingkat yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, kemudian dikaitkan dengan nalar politik para oknum PNS yang disumsikan melanggar PP Nomer 5 Tahun 2014.

Nalar PNS Berhadapan Dengan Pemilu.

Nalar sebagaimana kita telah sepakati adalah faktor pemicu dan juga manifestasi dari segala aktivitas, sedangkan politik adalah aktivitas-aktivitas atau praktik langsung yang berkaitan dengan politik itu sendiri, bukan ilmu tentang politik. Marilah kita membedah nalar politis PNS menggunakan pendekatan Humanitis Abraham Maslow.



Abraham Maslow⁷ memberikan kita *guidence* mengenai bagaimana mengenal kebutuhan-kebutuhan bertingkat pada diri manusia. Pokok Teori Psikologi Humanistik Abraham Maslow adalah Prinsip holistic, Individu, Manusia tidak pernah diam, Individu sebagai keseluruhan, Manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral, Individu sebagai Kesatuan Terpadu, Manusia berpotensi kreatif, *Self-fulfillment*, Manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan.

Secara alamiah seorang manusia dimotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya baik secara individu maupun hubungannya sebagai makhluk sosial. Kebutuhan kebutuhan mendesak membuat seseorang semisal makanan dan minuman harus dan dengan segera dipenuhi. Begitu kebutuhan-kebutuhan paling dasar tadi sudah terpenuhi maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan mengikuti.

Menurut Abraham Maslow manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan bertingkat yang akan memotivasi mereka untuk segera memenuhinya. Kebutuhan bertingkat itu tersusun secara holistik dan berlaku bagi sebagian besar manusia. Maslow mengembangkan gagasannya lebih lanjut dan dikenal dengan sebutan hirarkis kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Kebutuhan Fisiologis.**

Ini termasuk kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap oksigen, air, protein, garam, gula, karbohidrat, nutrisi, kalsium serta berbagai mineral, vitamin, kebutuhan pH yang seimbang, suhu udara yang seimbang, bergerak, berfikir, buang air dan keringat, menghindari bahaya penyakit, berhubungan seks dan lain sebagainya.⁸ Menurut kebutuhan-kebutuhan ini bersifat individual

2. **Kebutuhan Rasa Aman.**

⁷ Abraham harold maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, pada tanggal 1 april, 1908. Maslow mengawali karir akademis dan profesionalnya dengan memegang jabatan sebagai asisten instruktur psikologi di Universitas wisconsin (1930-1934), E. Koswara, Teori-teori kepribadian, (bandung: eresco, 1991), h. 110

⁸ George Boeree, Personality Theories “melacak kepribadian anda bersama psikolog dunia”, (Jogjakarta: prisma sophie, 2010), h. 252



Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi maka secara otomatis lapisan kebutuhan yang kedua akan muncul. Ini mencakup toleransi antar tetangga, pekerjaan dan tempat kerja yang aman, jenjang karir, perencanaan masa pensiun yang matang, jaminan sosial dan jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

3. **Kebutuhan Cinta Dan Rindu.**

Ketika kebutuhan dasar fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi maka kebutuhan lapis ketiga akan muncul. Seseorang akan mulai merasa butuh teman, kekasih, anak dan hubungan serius berdasarkan perasaan dan lain sebagainya. Dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini adalah timbul rasa cemas akan kesendirian dan kesepian,

4. **Kebutuhan Harga Diri.** Setelah kebutuhan dasar fisiologi, rasa aman, cinta dan rindu telah terpenuhi maka kebutuhan akan harga diri pada diri manusia akan timbul. Namun menurut Maslow kebutuhan akan harga diri ini terbagi menjadi dua yaitu bentuk yang lemah dan bentuk yang kuat.⁹



(Gambar: Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow)

⁹ Ibid. Bentuk yang lemah adalah ketika manusia membutuhkan dirinya untuk dihargai oleh orang lain, kebutuhan terhadap status, kemuliaan, kehormatan, perhatian, reputasi, apresiasi bahkan dominasi. Sementara yang kuat adalah kebutuhan akan percaya diri, kompetensi, kesuksesan, independensi dan kebebasan.

“Maslow menganggap kebutuhan-kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang pun sebenarnya memperjelas kebutuhan kita akan kesehatan. Dia juga menganggap kebutuhan-kebutuhan ini sudah ada sejak kita lahir persis sama seperti insting”¹⁰

Pada saat kondisi tidak menguntungkan atau pada kondisi di mana bertahan hidup “*survive*” terancam, seseorang dapat mundur ke level yang lebih rendah. Maslow meyakini bahwa jika seseorang memiliki segenap kemampuan serta kesempatan serta lingkungan penunjang untuk mencapai kebutuhan tertentu maka ia akan mampu mengungkapkan segenap kemampuan yang dimilikinya.

Politik PNS Dan Kebutuhan Bertingkat

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk netral dari hal-hal yang berbau politik praktis sebab ia sebagai pelayan publik harus memfokuskan diri melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat. Selain juga sistem birokrasi sebagaimana teori organisasi birokrasi Marx Weber yang mengharuskan seorang birokrat tidak mempunyai kepentingan pribadi apapun dalam menjalankan jabatannya. Sehingga seluruh aktivitas seorang birokrat adalah *rationality purposefull actions* yang dikendalikan oleh rasionalitas tindakan.¹¹

Karena itu mengatur Birokrasi bukan pekerjaan yang ringan bagi para birokrat kita. Perlu kolaborasi yang kuat dibangun bersama lembaga independen diluar rutinitas formal birokrasi seperti; lembaga pengawas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Lembaga Mediator antara Pemerintah dan Swasta dalam menciptakan Sumber daya profesional untuk mengelola Birokrasi¹².

Birokrasi bagi Weber seperti sistem mesin. Dalam sistem mesin apa yang dimasukkan, apa yang diolah dengan apa yang dihasilkan dapat diprediksi. Jadi tindakan-tindakan manusia dalam sistem birokrasi layaknya komponen mesin, garis

¹⁰ Ibid. 255.

¹¹ Max Weber, *On Charisma And Institution Building*, (chicago an London: university of chicago Press, 977)

¹² Saleh Choirul, Zauhar Soesilo, Supriyono Bambang, Islamy M. I rfan 2013. *Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Aparatur*. Universitas Brawijaya Press



perintah yang hirarkis dan garis koordinasi begitu jelas. Jika terdapat komponen-komponen di dalam mesin rusak maka cara gampang untuk memperbaikinya dengan mengganti komponen yang rusak tadi. Namun Weber tidak menyadari bahwa manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki kehendak bebas, manusia seperti yang kita bahas di atas memiliki motif-motif pemicu yang diolah baik internal maupun eksternalnya sehingga melahirkan tindakan-tindakan.

Teori birokrasi model mesin sebenarnya sangat efektif menghasilkan produk-produk kebijakan dan pelayanan yang bisa kita lihat dan prediksi hasilnya. Menurut Erich From dalam konteks ini anggota-anggota dalam mesin birokrasi harus bekerja sebagai mesin industri yang terorganisir secara kolektif agar dapat berjalan lancar dan tidak boleh ada friksi ataupun intrupsi. Mereka bekerja sebagai mesin dan tidak memiliki kepentingan pribadi sebagai roda gigi mesin birokrasi yang fungsi dan aktivitasnya ditentukan oleh seluruh struktur organisasi di mana mereka bekerja.¹³.

Namun kita juga harus menyadari bahwa manusia bukanlah mesin, ia merupakan makhluk bebas yang segala tindakannya dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh. Ia tidak cukup dengan aturan atau perintah untuk bertindak, manusia bertindak tidak cukup dengan modal pengetahuannya, namun butuh kepercayaan, niat dan konsisten untuk bertindak. PNS tidak cukup hanya tahu aturan untuk tidak melanggar, namun juga butuh kepercayaan, niat dan konsistensi untuk melakukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai birokrat sejati.

Kebutuhan bertingkat Abraham Maslow di atas juga dapat kita gunakan untuk melihat fenomena oknum PNS ikut terlibat baik sebagai tim sukses maupun simpatisan seorang calon kepala daerah. Yang harus digarisbawahi adalah selain sebagai PNS, Birokrat atau Komponen dari mesin birokrasi sekalipun, PNS juga adalah seorang manusia biasa sebagai makhluk berkebutuhan baik secara individu maupun sosial. Maka mereka dalam proses dinamika kehidupan tidak mampu

¹³ Erich Fromm, *Dari Perkembangan Menuju Sosialisme Humanistik*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2016), h. xxxviii



terlepas dari yang namanya motivasi untuk bertindak akan kebutuhan-kebutuhan sebagai sebagaimana telah dibahas di atas.

Sebagai seorang manusia biasa kebutuhan level pertama PNS sama seperti kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain, Ini termasuk kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap oksigen, air, makanan, Uang (gaji).¹⁴ Namun kita harus sadari bersama butuhan manusia dalam konteks ini bukan semata-mata gaji dan tunjangan namun mereka juga membutuhkan rasa aman dalam bekerja, rasa ketidak nyamanan membuat mereka harus mencari atau bahkan menciptakan rasa aman bagi dirinya. Cara-cara mencari dan mewujudkan rasa aman, rasa toleransi dalam dunia kerja inilah yang dalam pembahasan ini kita sebut dengan tindakan politik. Tindakan politik bukan semata-mata politik praktis (pemilu) namun serangkaian upaya-upaya untuk mewujudkan keinginan pribadi dengan strategi-strategi yang dapat diukur.

Jika pun dalam dunia kerja, rasa aman toleransi antar rakan kerja, pekerjaan dan tempat kerja yang aman dan kondusif, jenjang karir, perencanaan masa pensiun yang matang, jaminan sosial dan jaminan kesehatan dan lain sebagainya, itu telah diraih maka secara otomatis kebutuhan akan muncul kebutuhan yang lain. Kebutuhan akan harga diri pada diri PNS akan timbul, yang dimaksud kebutuhan akan harga diri ini ialah ketika PNS membutuhkan untuk dihargai oleh orang lain, kebutuhan terhadap status, kemuliaan, kehormatan, *previllage* (hak istimewa), perhatian, reputasi, apresiasi bahkan dominasi. Sementara yang kuat adalah kebutuhan akan percaya diri, kompetensi, kesuksesan, independensi dan kebebasan.

Dari uraian di atas kita dapat memahami bahwa seberapa ketat aturan yang diterapkan bukan lantas memberi efek jera, namun membuat Oknum PNS mencari-cari cara untuk mewujudkan keinginan-keinginan pribadi guna memuaskan kebutuhan-kebutuhan bertingkat mereka. PNS bukanlah mesin yang dapat diatur tanpa memiliki pikiran untuk bertindak, mereka setiap detiknya memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk bertindak. Memberikan gaji dan tunjangan

¹⁴ protein, garam, gula, karbohidrat, nutrisi, kalsium serta berbagai mineral, vitamin, kebutuhan pH yang seimbang, suhu udara yang seimbang, bergerak, berfikir, buang air dan keringat, menghindari bahaya penyakit, berhubungan seks dan lain sebagainya.



sebesar apapun ketika kita memahami psikologis mereka sebagaimana penjelasan di atas maka kebutuhan selain gaji dan tunjangan akan mereka cari dan wujudkan.

Membongkar Keterlibatan ASN Dalam Politik

Jika kita sepakat bahwa mesin birokrasi (yang di dalamnya kita sebut dengan PNS) harus bebas dari politik praktis, maka kebutuhan-kebutuhan individu tadi harus segera difahami oleh atasan. Sebab jika hal ini dinafikan, maka penyelewengan-penyelewengan jabatan, anggaran dan lain-lain akan terus terjadi. Seberapapun ketat aturan tersebut, maka oknum yang telah lama mencari cara-cara mewujudkan keinginannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa motif PNS dekat dan bahkan dengan terang-terangan menjadi tim sukses dalam pilkada itu dapat kita pilah-pilah menjadi beberapa alternatif kemungkinan.

1. Mencari jabatan
2. Mengamankan posisi
3. Agar tidak dimutasi ke lokasi kerja yang lebih jauh dari tempat tinggal
4. Agar tidak dinonjobkan
5. Jenjang karir

Tentu alternatif kemungkinan ini masih bisa diperdebatkan, namun dari ke lima alternatif itu dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, rasa nyaman di lokasi kerja (kantor), kebutuhan rasa rindu dan kebutuhan akan harga diri. Tugas pimpinan bukan menjeneralisir semua dengan aturan yang sama, namun mengerti betul *person to person* sehingga tindakan prefentif dapat dilakukan sedini mungkin, bukan malah *proaktif self identity* seperti bertindak setelah ada masalah.

Yang perlu kita fahami bersama adalah politik berbicara aktivitas merebut dan mempertahankan kekuasaan, sehingga memegang kekuasaan barti dapat mewujudkan segala ide dan keinginan termasuk lima ide di atas. “*ok, you get a point, but you dont have the power*”. Dalam politik seberapapun bagus ide dan



gagasan kita namun tidak memegang atau dekat dengan kekuasaan maka sulit untuk mewujudkannya.

Karena PNS adalah manusia biasa yang penuh dengan motif-motif, keinginan dan cita-cita dalam hidupnya maka bermain seni dalam politik adalah salah satu pilihan tindakan untuk mewujudkan motif-motif, keinginan dan cita-cita tersebut..

Kesimpulan

Dari penjabaran di atas kita dapat memahami bahwa PNS sebagai manusia biasa tidak mampu terlepas dari kebutuhan-kebutuhan bertingkat teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yaitu:

1. Kebutuhan Fisiologis.

Ini termasuk kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap oksigen, air, protein, garam, gula, karbohidrat, nutrisi, kalsium serta berbagai mineral, vitamin, kebutuhan pH yang seimbang, suhu udara yang seimbang, bergerak, berfikir, buang air dan keringat, menghindari bahaya penyakit, berhubungan seks dan lain sebagainya. Menurutnya kebutuhan-kebutuhan ini bersifat individual

2. Kebutuhan Rasa Aman.

Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi maka secara otomatis lapisan kebutuhan yang kedua akan muncul. Ini mencakup toleransi antar tetangga, pekerjaan dan tempat kerja yang aman, jenjang karir, perencanaan masa pensiun yang matang, jaminan sosial dan jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

3. Kebutuhan Cinta Dan Rindu.

Ketika kebutuhan dasar fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi maka kebutuhan lapis ketiga akan muncul. Seseorang akan mulai merasa butuh teman, kekasih, anak dan hubungan serius berdasarkan perasaan dan lain sebagainya. Dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini adalah timbul rasa cemas akan kesendirian dan kesepian,



4. **Kebutuhan Harga Diri.**

Setelah kebutuhan dasar fisiologi, rasa aman, cinta dan rindu telah terpenuhi maka kebutuhan akan harga diri pada diri manusia akan timbul. Namun menurut Maslow kebutuhan akan harga diri ini terbagi menjadi dua yaitu bentuk yang lemah dan bentuk yang kuat.

Dengan mengetahui kebutuhan bertingkat tersebut maka seorang pimpinan atau rakan kerja dari oknum yang melakukan pelanggaran administrasi maupun hukum dapat melakukan semacam *early warning* terhadap yang lain. Maka dalam kesimpulan ini penulis ingin menyarankan agar setiap triwulan atau setiap kali penyelenggaraan pemilu harus ada kesepakatan bersama (selain aturan pusat) sebagai bentuk dari fakta integritas selama musim pemilu.

Secara manusiawi setiap orang berpolitik untuk mewujudkan ide-ide. Dari penjabaran di atas tindakan politik bukan semata-mata melakukan kampanye merebut dan mempertahankan kekuasaan seperti yang kita dengar selama ini, namun politik hakikatnya adalah cara-cara atau strategi mewujudkan keinginan individu maupun kelompok. Kekuasaan adalah satu bentuk dari batu loncatan atau trigger tujuan berpolitik itu sendiri sebab dengan kekuasaan orang mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan melakukan apa saja yang ia inginkan.

Curah gagasan pertriwulan perlu dilakukan demi mengetahui karakter serta kebutuhan bertingkat setiap individu. Curah gagasan dimaksudkan untuk mendengar keluh kesah setiap anggota dan belajar saling mendengarkan sebagai upaya saling menghargai dan menciptakan rasa aman dan nyaman dengan rekan kerja, bukan malah saling sikut demi mendapatkan jabatan tertentu.

Hasil dari curah gagasan inilah yang kita sebut dengan komitmen bersama, entah dalam bentuk fakta integritas PNS atau istilah lain yang terkait. Komitmen bersama itu akan dijalankan secara bersama-sama dan dalam prosesnya setiap anggota harus saling mengingatkan. Pertemuan berikutnya merupakan evaluasi dari komitmen yang telah disepakati bersama. Sehingga kebutuhan-



kebutuhan yang sifatnya bukan kebutuhan dasar psikologis seperti makan dan minum, bernafas dan lain sebagainya dapat ditekan oleh komitmen bersama sebab hanya komitmen bersama yang mampu menekan keinginan individual. Sebab seorang individu PNS akan bertindak tidak cukup dengan pengetahuan akan aturan, namun dibutuhkan kepercayaan dan niat serta konsistensi untuk tidak tergoda rayuan politik praktis.

References

- E. Koswara, Teori-teori kepribadian, (bandung:resco, 1991).
- Erich Fromm, Dari Perkembangan Menuju Sosialisme Humanistik, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2016),
- George Boeree, Personality Theories “melacak kepribadian anda bersama psikolog dunia”, (Jogjakarta: prisma sophie, 2010).
- Gustiana & Achmad Zulfikar, dalam Proseding Seminar Nasional Pilkada Serentak, Universitas Hasanudin, 10 November 2015.
- <http://aceh.tribunnews.com/2018/02/20/7-larangan-pns-di-tahun-politik-dari-beri-like-sosmed-hingga-foto-bareng?page=2> 06:12 06/05/2018
- M. Abed al-Jabiri, Sosiologi Politik Islam “pendekatan Historis-kritis, terj. M. Firdaus (Jakarta: Gelar Hidup, 2016).
- Max Weber, On Charisma And Institution Building, (chicago an London: university of chicago Press, 977)
- Nigro, F.A dan Nigro, L.G., Modern Public Administration, New York: Harper & Row, Publishers, 1980.
- Rita L. Atkinson, dkk. Pengantar Psikologi, edisi kesebelas, jilid I, (Jakarta: Interakssara, 1992).
- Saleh Choirul, Zauhar Soesilo, Supriyono Bambang, Islamy M. I rfan 2013. Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Aparatur. Universitas Brawijaya Press
- Waldo, Dwight, 1980, the enterprice, of public administration , chandler and sharp publisher Inc. Novanto CA.
- Akot, Bulent, ‘The Perspective of Psychological Freedom and Avoiding Freedom According to Erich Fromm’, *Hamdard Islamicus*, 43.2 (2020)
- Bennett, J, *The Enchantment of Modern Life* (degruyter.com, 2016)



<<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400884537/html>>

Kim, Pan Suk, 'The Development of Modern Public Administration in East Asia', *International Review of Administrative Sciences*, 83.2 (2017)
<<https://doi.org/10.1177/0020852316685162>>



PRAKTIK POLITIK SYEKH ZAINUDDIN PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH

Mansyur, Ahmad Kharul Kholidi

Universitas Islam Indonesia, Universitas Nahdlatul Wahtan Mataram
mansyurmansyur39451@gmail.com
d0807049402@unwmataram.ac.id

Abstract

Semangat perjuangan keagamaan dapat diwujudkan dengan berbagai varian, lebih-lebih jika kepercayaan akan agama sudah mengakar sebagai spirit perjuangan. Agama telah menawarkan suatu cara pandang hidup yang mampu meng-cover setiap tindakan, perbuatan yang mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya, demikian pula islam pada sisi-sisi kehidupan ummat baik dalam hal sosial, budaya, hukum bahkan politik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama dan politik merupakan dua sisi yang terkadang dianggap bersebrangan. “agama” sebagai dasar berpolitik dalam melestarikan keyakinan yang dianut sering kali mengalami hambatan karena pemerintah terkadang menganggap sebagai batu sandungan yang mampu menggeser ketahanan kekuasaan seperti yang kita lihat pada masa aktivitas politik Syekh Zainuddin Abdul Majid, perjalanan politiknya semakin terlihat jelas pasca kemerdekaan dengan mengikuti partai politik dan menentukan arah bangsa indonesia bagian timur khususnya pulau Lombok. Karir politik Syekh Zainuddin Abdul Majid dimulai sejak sebagai Konsulat Nahdlatul Ulama Sunda Kecil pada tahun 1950. Kemudian tahun 1952 menjadi ketua badan penasehat partai masyumi untuk daerah Lombok, hal ini karena nahdlatul ulama dan beberapa ormas lain bergabung dalam partai Masyumi.

Kata Kunci : *Praktik Politik Syekh Zainuddin, Maqasid Syariah.*

Pendahuluan

Islam sebagai pembawa kesadaran nasionalisme untuk melawan penjajah, yakni para kyai dan ulama pada awal dekade 1900-an menyerukan pencerahan dan pencerdasan anak bangsa (masyarakat pri bumi).¹ Ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa organisasi yang berbasis Islam seperti Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 dan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Umat Islam pasca-kemerdekaan pernah tergabung dalam satu wadah politik yaitu partai Masyumi yang disepakati setelah Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta sebagai satu-satunya partai politik umat Islam.

¹Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam DiIndonesia : Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal 152.



Di keluarkan nya Dikrit 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno membuat beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno dan dianggap sebagai otoriter hingga melakukan perlawanan. Akibatnya, beberapa dari pemimpin tersebut ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 september 1960. Pada masa Orde Baru, kalangan Islam kesulitan melakukan artikulasi politik meski telah berkerjasama dalam menumbangkan pemerintahan Orde Lama. Rezim Orde Baru tidak hanya menolak merehabilitas partai Masyumi tapi juga dengan tegas menolak kembali pemimpin-pemimpin partai tersebut dalam kehidupan politik. Sampai akhirnya negara menyederhanakan partai politik. Partai-partai Islam tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan, untuk yang nasionalis dan non-Islam tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penyerdehanaan ini dilakukan agar mengurangi konflik dan aktifitas partai mudah di kontrol oleh negara.²

Praktik politik Syekh Zainyddin memberikan gambaran politik baru untuk Indonesia yang memiliki latar belakang tokoh anak kiyai terkemuka di NTB. Tokoh Zainuddin merupakan tokoh pemimpin yang bisa merubah NTB yang dulunya terkenal dengan Nusa Tenggara Terbelakang menjadi Nusa Tenggara Terbaik dari semangat inilah mulai terkenal dengan daerah yang memiliki kawasan pariwisata halal toriseme, bahkan mampu mendongkrak prekonimian di NTB dengan menekankan penurunan kemiskinan. Berdasarkan data BPS terlihat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTB terjadi pada tahun 2009 dan terendah tahun 2011. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi sektor primer khususnya sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB. Sampai dengan saat ini perekonomian NTB masih didominasi oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan).³ Selanjutnya penulis akan membahas biografi Syekh Zaenuddin Abdul Madjid

Biografi Syekh Zainuddin Abdul Madjid

Syekh Zainuddin Abdul Majid lahir di Bermi Desa Pancor Kabupaten Lombok Timur pada hari rabu 17 rabiul awal 1326 (1904M). Dari pasangan Tuan Guru Haji Abdul Madjid dan Hj. Halimatussa'diyah. Anak bungsu dari enam bersaudara, yaitu, Siti Sarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Shabur dan Hajah Masyitah.⁴ Ketika Muhammad Saggaf danayahnya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, ayah nya bertemu dengan seorang ulama yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia yaitu Syaikh Muhammad Zainuddin Serawak. Sebab ketertarikan inilah Muhammad Saggaf digantnamanya menjadi Zainuddin oleh ayahnya sendiri setelah menunaikan ibadah haji.

²Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam DiIndonesia : Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*, hal 174.

³ Fatihatul, Wardah. *Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian dalam Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat*. 2021. Phd Thesis. Universitas Mataram. hlm 9.

⁴Mohammad Noor, dkk. *Visi Kebangsaan Religius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2004.,hal 123

Tuan guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memulai pendidikan di dalam keluarga, belajar mengaji dan berbagai ilmu agama diajarkan langsung oleh ayah nya sejak berumur lima tahun sampai sembilan tahun. Beliau memasuki pendidikan formal pada sebuah sekolah umum yang disebut Sekolah Rakyat Negara (Sekolah Gubermen), di sekolah tersebut beliau belajar selama empat tahun.⁵ Selain pendidikan formal, beliau juga diserahkan ayahnya untuk belajar ilmu agama kepada Tuan Guru lokal saat itu, Tuan Guru Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Sa'id dari Pancor, dan Tuan Guru Abdullah Bin Amaq Dulaji Kelayu Lombok Timur.

Pada usia tujuh belas tahun, Syekh Zainuddin Abdul Majid bersama ayahnya menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu di Madrasah Asshaulatiyah Makkah Al-Mukarramah yang didirikan oleh ulama besar imigran India yaitu Syaikh Rahmatullah Ibnu Khalil al-Hind al-Dahlawi .pada tahun 1219 H sebagai sejarah baru dalam pendidikan di Arab Saudi setelah perang saudara. Madrasah ini sangat legendaris dan telah menghasilkan ulama-ulama besar dunia diantaranya : Kiyai Haji Hasyim Asyari, Kiyai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), dan ratusan ulama lainnya di wilayah Asia Tenggara. Syekh Zainuddin Abdul Majid dengan diantar oleh Haji Mawardi Jakarta langsung bertemu mudir Madrasah al-Shaulatiyah Syekh Salim Rahmatullah yang merupakan cucu pendiri Madrasah al-Shaulatiyah serta Syekh Hasan Muhammad al-Masysyath menguji masuk Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang kemudian ditempatkan dikelas III Madrasah Ashaulatiyah Makkah.

Tuan Guru Haji Yusuf Makmun mengungkapkan sebagai berikut: “Selain di Shaulatiyah, Syekh Zainuddin Abdul Majid juga mencari guru diluar (mengaji luar). Syekh Zainuddin Abdul Majid berhasil menyelesaikan studinya di madrasah Ashaulatiyah Makkah dalam kurun waktu enam tahun, padahal lama belajar normal adalah selama sembilan tahun. Beliau juga sering ditunjuk mewakili berbagai acara seperti saat ada kunjungan pengawas madrasah dari kerajaan Saudi.⁶ Dengan prestasi akademik dan kecerdasan yang sangat tinggi, Syekh Zainuddin Abdul Majid berhasil lulus dari Madrasah al-Shaulatiyah dengan predikat *mumtaz* (*summa cum laude*).

Begitu Syekh Zainuddin lulus, langsung diminta mengajar di Madrasah al-Shaulatiyah sembari menunggu adiknya yang masih belajar di Mekah, beliau mengajar di Madrasah al-Shaulatiyah hanya selama dua tahun kemudian disuruh pulang ke Lombok oleh guru kesayangannya yaitu Syaikh Hasan Muhammad al-Masysyath. “pahalamu bukan di Mekkah, tapi pahalamu ada di Lombok”.⁷ Lebih jauh, Dr.Tohri menjelaskan : “masyayikh Madrasah Shaulatiyah memarahi murid-murid Indonesia yang tidak membantu memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, (kira-kira ucapannya seperti ini) ‘buat apa anda menjadi ulama sedang kan tanah air mu masih

⁵Mohammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan*, hal. 134

⁶Masnun, *Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid; Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat* (Jakarta : Pustaka al-Miqdad, 2007), hal 19

⁷Yusuf Makmun, wawancara, Pancor, 5 Desember 2017

dijajah⁸

Praktik Politik Syekh Zainuddin Abdul Majid

Berafiliasinya NW dengan partai Masyumi membuat Syekh Zainuddin Abdul Majid menjadi anggota Konstituante periode 1955-1959, dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955. Selama menjadi anggota konstituante, Syekh Zainuddin Abdul Madjid aktif ikut bersidang dan berdinamika, berkantor di Bandung, Jawa Barat. Berbagaihal terkait sidang serta pengalamannya selama menjadi Anggota Dewan Konstituante, sering kali diceritakan kepada para muridnya, sebagai bahan pembelajaran. Ustadz Mursyidin mengungkapkan : “maulana syeikh berpolitik untuk memberikan pelajaran, bukan hanya untuk murid-murid beliau tetapi juga untuk masyarakat Lombok, bahwa bukan suatu yang haram seorang ulama itu berpolitik, sebab pada saat itu tuan guru yang masuk kedunia politik masih sangat dianggap tabu oleh masyarakat Lombok”.⁹

Berbagai manuver yang dilakukan petinggi Partai Masyumi ini tidak sesuai lagi dengan prinsip dalam Masyumi. TGH Abdul Hafidz Sulaiman bersama Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid melayangkan surat kritik pada 12 Mei 1959 yang judulnya “Risalah Bandung”. Isinya, beliau tidak menerima perlakuan tidak adil/tidak aman terhadap anggota masyumi yang kebanyakan bermazhab syafi’i, ahlussunnah wal jamaah, bahwa yang duduk dipimpinan partai masyumi yang mengaku diri bermazhab telah berupaya memboikot mazhab yang menjadi jiwa perjuangan mereka.

Kritik ini karena perilaku pengurus Masyumi dilombok yang telah mempolitisasi kaum bermazhab syafi’i. Ada juga yang telah membuat yayasan yang hanya dibungkus nama Islam, tetapi di isi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁰ Kekecewaan terhadap partai Islam juga tersirat di dalam wasiatnya:

*“Ajaib nya terkadang dipartai Islam
Berpura-pura membela Islam
Aktif keliling siang dan malam
Membela diri melupakan Islam”.*¹¹

*Jangan nanda dibikin bubur
Oleh pemain politik catur
Diperalat untul melawan batur
Sehingga ukhwah hancur dan lebur*

⁸Tohri, wawancara, Mataram, 20 Februari 2018

⁹Mursyidin, wawancara, Pancor, 5 Desember 2017

¹⁰Patompo Adnan, TGH Abdul HafidzSulaiman 1898-1983; Ilmu Bening Sebening Hati Guru-Sebuah Biografi, (Lombok Barat: mujahid press, 2013). Hal. 88

¹¹Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Wasiat...,hal.55.

*Banyak sekali berlidah madu
Berhati pahit bagai empedu
Berpolitik: membelah bambu”
Tujuannya ummat jangan bersatu.*

Dari syair diatas, syekh Zainuddin menginginkan sistem politik kebersamaan, persaudaraan dan persatuan karna politik merupakan jalan silaturrahi menjalin ukhwah islamiah dan ukhwah wathaniyah. Sistem politik Indonesia yang menganut demokrasi liberal dari tahun 1949-1959, sehingga partai politik bebas menentukan ideology Negara Republik Indonesia, maka muncul lah gagasan Islam sebagai ideology bernegara. dari Muhammad Natsir. Dalam siding Majelis Konstituante pada 10 November 1956, Seluruh partai Islam menyetujui gagasan tersebut, akan tetapi partai Islam kalah suara dengan pendukung pancasila sebagai ideology bernegara.¹²

Presiden Soekarno didukung oleh angkatan bersenjata mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, tentang “kembali ke undang-undang dasar 1945”.¹³ Ditahun yang sama Presiden Soekarno juga merubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno yang dianggap otoriter, hingga melakukan perlawanan. Akibatnya, beberapa dari pemimpin partai Masyumi ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 September 1960. Dilain pihak, Soekarno memberikan kesempatan yang baik kepada partai Komunis dan mengumumkan kebijakan tentang NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis).¹⁴

Semenjak partai Masyumi dilarang oleh pemerintah, Syekh Zainuddin Abdul Majid tidak aktif berpolitik, meski mendukung berdirinya partai Parmusi di Lombok, yang merupakan duplikasi dari partai Masyumi. Namun, tidak berperan aktif menjadi anggota, disebabkan karena tidak terakomodirnya aspirasi NW. Kemudian Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret, melarang PKI dan organisasi massanya yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPRS tahun 1966. Tanggal 11 Maret 1966 merupakan titik awal pemerintahan Orde Baru.

Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian mengganti haluan politiknya dengan berafiliasi kepartai Golkar pada 28 September 1970 dengan beberapa alasan Syekh Zainuddin Abdul Majid antara lain untuk menyelamatkan NW dari diktator pemerintah, sebab banyak pondok pesantren yang ditutup karena tidak sejalan dengan pemerintah Orde Baru. Tuan Guru Haji Yusuf Makmun menjelaskan maksud Syekh Zainuddin Abdul Majid berafiliasi dengan Golkar: “Maulana Syeikh (panggilan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid) melihat kewenangan hak prerogratif pemerintah saat itu, maka tidak ada yang paling pas kecuali bersama pemerintah, beliau mengajak warga NW dan simpatisan untuk menyalurkan aspirasi

¹² Masykuri abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan...*, hal.35

¹³ Masykuri abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan...*, Hal .37.

¹⁷ Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat...*, hal.55.

politiknya melalui Golkar, sebagai buktinya Syekh Zainuddin menanam pohon beringin, juga bersama pemerintah meneruskan perjuangan dan menyelamatkan madrasah supaya tidak ditutup.¹⁵

*NTB mengharap pemerataan
Keadilan sejati dan kebenaran
Agar meratalah kemakmuran
Ditanah air ciptaan tuhan.*

Politik Perspektif Maqasid Syari'ah

Politik dalam bahasa arab disebut *siyasah* yang bermakna artinya pemerintahan, mengatur, mengayomi, menjadikan sesuatu lebih baik, memperbaiki, membawa kepada yang lebih baik dan islah. berdasarkan penelitian kami tidak ada ayat yang secara jelas menyebutkan kata *siyasah* tapi banyak akar dan makna kata ayat-ayat yang mengarah kepada *siyasah* seperti: hakim, imarah, ulil amri, khalifah, negara, al mulk dan lain lain.

Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam disistematiskan menjadi beberapa hal, sebagai berikut : Persamaan yang komplit, Keadilan yang merata, Kemerdekaan dalam pengertian yang luas, Persaudaraan, Persatuan, Gotong royong (saling membantu), Membasmi pelanggaran hukum, Menyebarkan sifat-sifat utama, Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan, Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya, Berbuat kebajikan dan saling menyantuni, Memegang teguh prinsip musyawarah.¹⁶

Pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara menurut Al-Qur'an dapat di formulasi kan kepada : Prinsip kedaulatan, Prinsip keadilan, Prinsip musyawarah dan Ijma', Prinsip persamaan, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

1. Prinsip Kedaulatan atau *Al-hukumiyah* yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara, tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.¹⁷

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Yusuf : 40 :

¹⁶ Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha'una al-Qanuniyah* (1994: 211-223), 202.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika 2005), hlm.101.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Jean Bodin (1530-1596) dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty* atau *Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah *the most high, absolute and perpetual power over the citizens and subject of a common weale*.¹⁸

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal kedaulatan:

- Kedaulatan itu bersifat mutlak, abadi, utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecah dan bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi.
- Kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapusnya.
- Hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan raja.¹⁹

Abu A'la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan “asas pertama dalam teori politik Islam.” Al-Maududi dalam bukunya *It's Meaning and Message* (1976: 147-148) menegaskan, “Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam. “Kedaulatan ini terletak di dalam kehendaknya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu : kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cenderung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru. Perubahan ini logis mengingat teori itu datang dari manusia yang nota bene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan atau situasi dan kondisi

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. 105

¹⁹Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha'una al-Qanuniyah*, 214.

zaman nya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup, tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat.

2. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.²⁰

Berkaitan dengan itu terdapat dalam Al - Qur'an Surat An Nisa : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

Keharusan pemimpin untuk berlaku Adil, Rasulullah SAW Bersabda :

حَدَّثَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

“Hadis Ma’qil bin Yasar. Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa ‘Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma’qil bin Yasar ketika sakit menjelang wafatnya. Ma’qil berkata kepadanya: Aku akan sampaikan kepadamu, aku mendengar hadis dari Rasulullah Saw dan mendengar Nabi Saw bersabda: Seorang hamba yang dititipkan amanat oleh Allah SWT berupa kepemimpinan, namun ia tidak menindak lanjutinya dengan baik, ia tidak akan mendapatkan aroma surga” (HR. al-Bukhari: 1200).

3. Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan dalam urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan

²⁰ Ahmad Sukardja (n1), hlm.78.

negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al Imran : 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Jika merujuk pada ayat Al-Quran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan maupun bagaimana teknisnya. Oleh karenanya Rusdy Ali berpandangan bahwa musyawarah dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun yang kontra dengan penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far Shadiq dalam tafsir mereka.²¹ Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.²²

Dan penjelasan dalam Hadist :

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْأَبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai pata tawanan itu lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu

²¹ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal keduniaan lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya kecuali pada persoalan yang sudah ada nash secara qath'i maka musyawarah tidak dapat dilakukan sesuai kaedah .

²² Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Juz IV (1960), hlm.126.

Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari ayahnya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. At-Tirmidzi 1636).

4. Prinsip Persamaan

Dalam islam, semua pemeluknya adalah bersaudara, tidak ada beda antara satu dengan yang lain melainkan karena ketakwaan atau kebaikan, maka dari itu penting bagi setiap orang maupun secara kelompok untuk berbuat baik karena pada prinsipnya semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al- Hujurat : 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damai kan lah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Dalam Surat Al Hujarat : 13 juga Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat diatas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial masyarakat, namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa". Artinya parameter seseorang adalah kebaikan atau ketakwaan yang dilakukan.

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama, karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulual-amr*), mereka harus menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah.

Dalil dalam Hadist, Rasulullah bersabda :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

“Dari Annas Ra, berasal dari Rasulullah SAW, Bahwasanya beliau bersabda : Tidak sempurna Iman salah seorang diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaqun ‘Alaih)

5. Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu, hal ini senada dengan ungkapan Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi iadalah : jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hokum secara adil, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan,serta keamanan.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak control sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat Al Isra’: 33, Al Baqarah : 256, Al Baqarah : 188, Al An Nur : 27, dll.

Sementara Prinsip kewarga negaraan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Anfal : 72 dimana asas kewarga negaraan dalam Islam dilandasi atas keimanan dan bukan atas dasar yang sempit seperti suku, ras, atau bangsa. Prinsip ini juga terdapat dalam surat At Taubah : 41, Al Maidah : 2, Al Imran : 110. Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik.

6. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

Amar ma’ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* kalau dalam politik Islam. Sistem ini ter lembaga dalam *Ahlul Hilli wal ‘aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha’*. Seorang pemimpin dalam pandangan

²³ As-Sayyid Ayub Abkar Asad Al Yamani, *Pathul mu’in Syarhul Ahadist Arba’in Littullabi Madrasatu Assholatayah al Makkiy*, Dauttuqo Annajah, hlm : 72.

mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.²⁴

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”

Filosofi pemimpin Negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah mem *faraq* diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa. Sebegitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana Al-quran surat Al Hajj : 41.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ غَافِقُهُ الْأُمُورِ.

“(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Rasulullah Saw. juga mengingatkan umatnya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar. Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

“Qutaibah telah menyampaikan hadis kepada kami, ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad telah menyampaikan hadis kepada kami, dari ‘Amr bin Abi ‘Amr dan ‘Abdullah al-Anshari,

²⁴ Ma'ruf adalah segala perbuatan yang dianggap baik oleh syara' serta mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang dianggap jelek oleh syara' serta menjauhkan kita dari pada-Nya.

dari Khuzaifah dari al-Yaman, dari Nabi SAW. bersabda: “Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, hendaklah kalian sungguh-sungguh menyuruh kemakrufan dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran atau hampir saja Allah sungguh-sungguh mengirimkan hukuman dari-Nya atas kalian lalu kalian berdoa kepada-Nya namun tidak dikabulkan bagi kalian.” Abu ‘Isa (al-Tirmizi) berkata: “Ini hadis hasan”. (HR. Tirmizi : 2169).

Peran amar ma’ruf nahi munkar tidak hanya diemban oleh kaum lelaki mukmin tetapi juga kepada para wanita mukminah, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71 dan sebagian ulama berpandangan bahwa wanita dapat bekerja sebagai anggota parlemen karena fungsi parlemen pada hakikatnya adalah melakukan *amar ma’ruf nahi munkar* atau *check and balancing* bagi penguasa.

Kesimpulan

Dikalangan ulama dan intelektual muslim di dunia setidaknya terdapat tiga pandangan hubungan antara ajaran islam dengan masalah kenegaraan :

1. Kelompok konservatif, yang tetap mempertahankan integritas antara islam dan negara, karena menurut mereka Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari (a) tradisionalis, yakni mereka yang tetap mempertahankan kantra disipraktif dan pemikiran poltik Islam klasik/pertengahan, seperti Rasyid Ridha, dan (b) fundamentalis, yakni mereka yang ingin melakukan reformasi system social dengan kembali kepada Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia, seperti Sayyid Qutub dan Abu A’la al-Maududi dan Hasan Tarabi.

2. Kelompok modernis, yang berpendapat bahwa Islam mengatur masalah keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja, adapun secara teknis bisa mengadopsi sistem lain, yang dalam hal ini adalah sistem barat yang sudah menunjukkan kelebihanannya. Diantara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal dan Muhammad Asad.

3. Memisahkan antara Islam dengan negara, karena menurut kelompok ini, Islam seperti agama-agama lain nya, tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik kenegaraan yang terdapat di barat. Di antara tokoh aliran ini adalah Ali Abdurraziq dan Thaha Husein.

References

- Afifuddin Adnan. 1983. *Diklat Pelajaran Ke-NW-an*. Pancor : Biro Dakwah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi.
- Alfons Van Der Kraan. *Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan Lombok : 1870-1940*. Yogyakarta: Lenggge.
- As-Sayyid Ayub Abkar Asad Al Yamani. 1998. *Pathul mu’in Syarhul Ahadist*



- Arba'in Littullabi Madrasatu Assholatiyah al Makkiy*, Dauttuqo Annajah, Azyumardi Azra. 1999. *Renaissance Islam Asia Tenggara*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia; Dalam Pendidikan, Politik dan Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia”, dalam Naskah Akademik Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 2017.
- Burhan D. Magenda. 2005. *Dinamika Peranan Politik Keturunan Arabdi Tingkat Lokal*”, *Antropologi Indonesia*, Vol. 29, Nomor2.
- Kapitsa M.S dan Maletin N.P, Soekarno. 2009.*Biografi Politik, terj. B. Soegiharto*, Bandung : Ultimus.
- Mahmud Yunus. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung.
- Masnun. 2007. *Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid; Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Pustaka al-Miqdad.
- Masykuri Abdillah. 2004. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, terj. Wahib wahab, cet. Ke-2, Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya.
- Masykuri Abdillah. 2005.*Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini*” dalam Komaruddin Hidayat (ed), *Islam, Negara, & Civil Society*, Jakarta: Paramadina.
- Mohammad Noor, dkk. 2004. *Visi Kebangsaan Religus; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nur cholish Madjid. 1994. *Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan*, cet. Ke-6, Bandung: Mizan.
- Nurcholis Madjid. 2004. *Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.
- Patompo Adnan. 2013. *TGH Abdul Hafidz Sulaiman 1898-1983; Ilmu Bening Sebening Hati Guru - Sebuah Biografi*, Lombok Barat: Mujahid Press.
- Sahal Mahfudh. 2004.*Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS.
- Sukron Kamil. 2004. *Pemikiran Politik Islam Tematik ; Agama Dan Negara, Demokrasi, civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
- Syarifuddin Jurdi. 2008. *Pemikiran Politik Islam di Indonesia : Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tuan Turu Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. 2002. *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, Lombok Timur : Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.

PROPAGANDA POLITIK PASCAKEBENARAN (POST-TRUTH) MENJELANG PEMILU 2024 DAN ANCAMANNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA KONTEMPORER

Abd Hannan

Institut Agama Islam Negeri Madura

Hannan.taufiqi@gmail.com

Abstract

In the midst of heating up domestic political tension ahead of the 2024 presidential election (Pilpres), various political maneuvers and discourses have begun to surface to the public, one of which is post-truth political discourse. In Indonesia, post-truth politics is identified by many groups as political intrigue that focuses its maneuvers on political propaganda, especially those rooted in false narratives in the name of identity. This study focuses on examining the phenomenon of post-truth political propaganda ahead of the 2024 Pilres and its threats to the building of democracy in contemporary Indonesia. This paper is a qualitative study using library techniques. The sources and types of data used in this study are secondary data, especially data sourced from books, journals, and various results of previous studies. After using field data analysis based on the perspective of political sociology theory, this study found findings that ahead of the 2024 Presidential Election, posttruth political propaganda is starting to return to the public sphere through various political propaganda that appears in the form of issues of religious and identity. Reflecting on the political dynamics in the previous elections, 2014 and 2019, the use of post-truth political propaganda has the potential to have a large negative effect. This not only threatens the stability of society at the grassroots level but also has great potential to damage the future and sustainability of democracy in Indonesia.

Keywords: *Propaganda politics, Post-truth politics, 2024 presidential election, Democracy in Indonesia*



A. Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, perbincangan seputar politik Indonesia beserta segala dinamika di dalamnya seakan menjadi tema yang tak kunjung ada habisnya, baik perbincangan tersebut ada pada wilayah praktik maupun wilayah teoritik. Pada wilayah teoritik, wacana seputar politik menemukan ruangnya ketika narasi politik nasional dihadapkan pada persoalan identitas yang berakar pada suku, ras, golongan, dan agama. Penggunaan isu-isu primordial, khususnya yang bercokol pada simbol dan lambang (aliran) agama tertentu (baca: politisasi agama), secara langsung tidak saja telah mengancam bangunan demokrasi, pun lebih dari itu telah merong-rong jati diri dan tenun kebangsaan Indonesia yang selama ini identik dengan kebhinekaan.¹

Sedangkan pada wilayah praktik, diskursus politik nasional menemukan ruangnya sebagai konsekuensi dari semakin riuhnya pertarungan politik di tingkat elit, baik pertarungan di level elektoral maupun di level nasional. Di level elektoral keriuhan muncul seiring bergulirnya tahun politik menjangan Pemilu serentak 2024. Meski gelaran kontestasinya masih relatif jauh dan lama, namun geliat manuver dan tensinya sudah mulai terasa hangat sejak sekarang.² Memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2024, baik pemilihan di level eksekutif maupun legislatif, itu terlihat jelas dari keberadaan para elit politik kita yang saat ini kian aktif memperlihatkan eksistensinya di ruang publik. Masing-masing parpol mulai melakukan

¹ Mifdal Zusron Alfaqi, "Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda," *Jurnal Civics* 13, no. 2 (2016): 8.

² Roy Ratumakin, "Tensi Politik Meningkat, Sosok Ini Presiden di 2024 Gantikan Jokowi?," *Tribun-papua.com*, last modified June 5, 2022, accessed May 16, 2023, <https://papua.tribunnews.com/2022/06/05/tensi-politik-meningkat-sosok-ini-presiden-di-2024-gantikan-jokowi>.



konsolidasi internal, melakukan penjajakan dan geriliya guna membangun kekuatan politik untuk memenangkan perhelatan Pemilu 2024.³

Meski pada Pilpres 2024 tidak ada lagi pertandingan ulang (*remacht*) antara Jokowi dan Prabowo Subianto seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019, itu tidak lantas disimpulkan bahwa kontestasi politik akan berjalan tenang-tenang saja. Sebaliknya, banyak kalangan memprediksikan gelaran pilpres 2024 tidak saja akan berjalan alot mengingat para bakal calon yang digadang-gadang maju memiliki tren elektabilitas cukup tinggi dan ketat. Lebih darinya, besar kemungkinan proses kontestasi akan berjalan sengit dan memanas, bahkan boleh jadi melebihi suhu politik di tahun 2019.⁴ Faktanya, aroma politik identitas yang sempat berkecamuk di pilpres 2014 dan 2019, pelan-pelan mulai mencuat dan muncul kembali ke permukaan publik. Dalam kaitan ini, ada kecenderungan di saat derasny arus informasi di kanal-kanal media sosial, bersamaan dengan itu beberapa kelompok dengan lihai memanfaatkan berita-berita palsu, menyinggung isu-isu identitas dan primordialisme dalam rangka menciptakan ketidakstabilan politik.⁵

Mengemukanya propaganda politik dalam varian dan modus demikian, itu muncul sebagai bentuk kahadiran politik global yang saat ini

³ Redaksi, "Menjaga Tensi Politik," *kompas.id*, last modified October 4, 2022, accessed May 16, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/04/menjaga-tensi-politik>.

⁴ Estu Suryowati, "Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan," *Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan - Jawa Pos*, last modified August 17, 2021, accessed May 16, 2023, <https://www.jawapos.com/politik/01339706/panas-lebih-cepat-peta-pilpres-2024-bakal-mulai-terlihat-tahun-depan>.

⁵ Ayu Nurfaizah, "Waspadai Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu 2024," *kompas.id*, last modified March 2, 2023, accessed May 16, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024>.



kita kenal dengan politik pascakebenaran (propaganda politik *posttruth*).⁶ Dalam konteks Indonesia, politik pascakebenaran mulai menemukan gejala sosialnya ketika muncul berbagai peristiwa politik yang berisikan halusinasi atas ancaman bangsa-negara. Instrumen politik global yang di satu sisi mengandung halusinasi (kebohongan), namun pada saat bersamaan memiliki kemampuan strategis mendatangkan rasa takut. Khususnya bagi masyarakat akar rumput yang secara sosial ekonomi berada di kelas menengah ke bawah.⁷ Pada gelaran pilpres sebelumnya (2014 dan 2019), intrik kebohongan dan intimidasi dalam politik *posttruth* dapat dilacak pada diskursus politik para elit, di mana saat itu berkembang ragam metanarasi politik untuk kepentingan konsumsi politik yang melebihi fakta sesungguhnya. Beberapa di antaranya adalah metanarasi tentang ancaman penjajahan ekonomi asing, dikotomisasi pribumi dan asing-aseng, politik genderowo, politik sentoloyo terusirnya kaum pribumi, Indonesia akan bubar pada tahun 2030.⁸

Sementara itu, di level akademik, kajian seputar politik pascakebenaran dalam konteks gelaran Pilpres sudah pernah dilakukan, salah satunya datang dari tulisan Amilin (2019). Dalam kajian ini, dirinya mendapati temuan bahwasanya politik pascakebenaran memiliki risiko dan dampak negatif cukup besar terhadap stabilitas masyarakat. Demikian

⁶ Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*; Vol 10, No 2 (2020): *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* DOI - 10.18326/ijims.v10i2.199-225 10, no. 2 (December 21, 2020), <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345>.

⁷ Muh Iqbal Latief, "Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilu 2019," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2019).

⁸ Danu Damarjati Nugroho Bagus Prihantoro, "Kaleidoskop 2018: Heboh Prabowo Bicara Prediksi RI Bubar di 2030," *detiknews*, last modified Des 2018, accessed May 16, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4357883/kaleidoskop-2018-heboh-prabowo-bicara-prediksi-ri-bubar-di-2030>.

karena politik pascakebenaran sering kali melandaskan dirinya pada kebohongan dan pemanfaatan berita palsu,⁹ Berkaca pada Pilpres 2019, kebohongan dan kepalsuan pada politik pascakebenaran berakibat signifikan terhadap bangkitnya sisi emosional masyarakat, sehingga pada akhirnya membuat pemilih kehilangan rasionalitasnya. Itulah sebabnya, pada politik pascakebenaran, masyarakat kerap kali dibuat fanatik, daya kritis mereka sebagai pemilih (voter) melemah dan semakin permissif. Perdebatan tentang kepemimpinan lebih dominan berputar di wilayah-wilayah primordial seperti isu identitas, suku, ras, dan agama, bukan berdebat pada aspek-aspek substantial yang bersentuhan dengan kapasitas, kemampuan, dan integritas diri. Secara faktual, merujuk pada studi yang dilakukan oleh Zainuddin Syarif (2020), bahaya laten intrik politik pascakebenaran dapat dilacak pada pengalaman Pilpres 2014 dan 2019, tepatnya ketika publik mengalami guncangan cukup hebat akibat massifnya pemberitaan palsu, yang saat itu memenuhi kanal-kanal media informasi publik, baik media cetak dan lebih-lebih media *online*.¹⁰

Namun demikian, betapapun studi tentang politik pascakebenaran dalam konstelasi politik nasional sudah pernah dilakukan, itu tidak lantas membuat kajian tentangnya tidak lagi ‘seksi’ untuk dibicarakan. Sebaliknya, dalam konteks politik di Indonesia kontemporer, diskursus seputar tema ini sampai sekarang masih tergolong penting dan menarik dilakukan. Penting karena sebagaimana kita ketahui bersama, politik pascakebenaran identik dengan manuver dan diskursus politik penuh kebohongan, kepalsuan,

⁹ Amilin Amilin, “Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 39 (September 2019).

¹⁰ Syarif, A. Mughni, and Hannan, “Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation.”



pencitraan, dan penuh propagand.¹¹ Seni berpolitik dengan cara demikian mutlak dapat menimbulkan dampak buruk karena berpotensi besar menghadirkan perpecahan masyarakat di akar rumput. Kontestasi politik tidak lagi dibangun atas dasar pertarungan gagasan dan ide pembangunan, namun lebih banyak dibumbui oleh narasi-narasi kebencian dan kebohongan.¹² Adapun terbilang menarik, karena meski selama ini term politik pascaebanaran memiliki stigma negatif, namun faktanya hingga detik ini narasi tentangnya masih tetap berjalan bebas dan berkeliaran di ruang-ruang publik. Bahkan seolah sengaja dimunculkan oleh para elit politisi dan petinggi partai politik sebagai strategi meraup suara dan dukungan publik untuk memenangkan perebutan kursi kekuasaan di tahun 2024, baik kursi Istana kpresidenan maupun kursi parlemen.¹³ Dalam perspektif inilah sesungguhnya kajian ini menemukan dimensi fundamentalnya. Bahwa menguatnya intrik politik pascakebenaran di kalangan elit yang dalam satu dekade terakhir mewarnai dinamika kontestasi kekuasaan di Indonesia, baik kekuasaan di level legislatif maupun eksekutif, di tingkat daerah, propinsi maupun nasional, itu sesungguhnya memuat ancaman cukup serius. Terutama bagi masa depan dan keberlangsungan demokrasi substansial di Indonesia.

Metode Penulisan

¹¹ Ayon Diniyanto and Wahyudi Sutrisno, "Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, Dan Strategi," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (July 1, 2022): 44–58.

¹² Cosmas Eko Suharyanto, "Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 10, no. 2 (2019).

¹³ Afrito Eka Kurniawan, "Pemilu Serentak 2024 Picu Munculnya Post Truth Politic | Kumparan.Com," *Https://Kumparan.Com/*, last modified Desember 2022, accessed May 16, 2023, <https://kumparan.com/236-afrito-eka-kurniawan/pemilu-serentak-2024-picu-munculnya-post-truth-politic-1zXcWfU2Kfm>.



Secara metodologi, penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada tujuan utama penelitian yang ingin menggali dan menggambarkan diskursus politik pascakabupaten dalam dinamika politik di Indonesia kontemporer, menelusuri rangkaian manuver politik pascakebupaten yang sejauh ini dilakukan oleh para elit politisi, dan dengan cara apa saja para elit mengoperasikan model politik pascakebupaten ketika terjun dan terlibat langsung dalam arena kekuasaan menjelang Pemilu 2024, baik di level eksekutif maupun legislatif. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, data primer yang diperoleh dari kegiatan observasi dan aktivitas wawancara mendalam beresama sejumlah informan baik informan kunci maupun informan pendukung. Selain itu, juga ada data sekunder berupa data-data kepustakaan dari sumber-sumber literatur terdahulu yang objek pembahasannya memiliki keterkaitan kuat dengan masalah utama penelitian ini. Sumber literatur dalam kajian ini peneliti batasi pada hasil penelitian yang terbit kisaran tahun 2014-2023, baik hasil penelitian yang berbentuk kegiatan kajian lapangan maupun studi kepustakaan. Adapun kriteria sumber literatur yang dijadikan sumber tulisan ini adalah laporan penelitian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau sejumlah lembaga penelitian, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, buku maupun prosiding. Selain itu, data sekunder dalam penelitian juga berasal dari informasi atau berita yang diperoleh dari media, baik cetak maupun *online* yang terbit pada periode 2014-2023.

Teknik analisa penelitian ini akan menggunakan model Miles *and* Heberman. Miles *and* Heberman dalam Sugiyono (2010) mengemukakan bahwasanya analisa data meliputi tiga tahap; reduksi data, penyajian data,



dan penarikan simpulan.¹⁴ Tahap reduksi data adalah kegiatan meringkas, memilih, dan menyaring data sehingga nantinya dapat diperoleh bahasan-bahasan penting yang berkaitan langsung dengan fokus utama penelitian. Penyajian data, yakni mendeskripsikan data dalam bentuk narasi atau uraian, sehingga dapat menggambarkan dan menampilkan *setting* alamiah realitas secara detail dan mendalam. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yakni melanjutkan dan mengembangkan proses penelitian pada tahap paling akhir berupa temuan pokok atau inti yang menjadi jawaban masalah penelitian

B. Pembahasan

Postmodernisme dan Genealogi Kelahiran (Politik) *Posttruth*

Perbincangan tentang politik propaganda politik *posttruth* secara langsung akan mengantarkan kita pada perbincangan postmodernisme, demikian karena antara propaganda politik *posttruth* dan postmodernisme memiliki keterkaitan cukup dekat. Jika digambarkan, hubungan antara kedua term ini layaknya dua sisi mata uang. Namun bukan dalam hal saling menegasikan, melainkan saling berhubungan dan berdekatan. Begitu dekatnya hubungan postmodernisme dengan propaganda politik *posttruth*, sehingga bisa dianalogikan postmodernisme adalah induk, sedangkan propaganda politik *posttruth* adalah wujud kebudayaan kekinian yang lahir dari rahim postmodernisme. Pertanyaan besarnya kemudian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan postmodernisme? Dalam hal apa postmodernisme memiliki keterkaitan dengan politik *pos-truth*?

Pada tataran filosofis, postmodernisme menolak paradigma berpikir modernisme yang sangat menekankan pada pendekatan positivistik. Dirinya

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, Cet. XV (Bandung: ALFABETA, 2010).



mengkritik logika berpikir modernisme yang menyandarkan rumus kebenaran pada objektivitas. Jika modernisme menekankan pada kehadiran makna melalui logika positivisme Comte (*Seeing is believing*), maka lain halnya dengan postmodernisme.¹⁵ Dirinya cenderung mempermainkan makna (*language game*) melalui proses permainan tanda dan penanda, sehingga apa yang disebut kenyataan, fakta, dan kebenaran menjadi majemuk. Merujuk pada penjelasan Jean Baudillard, postmodernisme adalah era hiperealitas, yakni realitas yang melebihi keberadaan aslinya karena ketiadaan makna, hilangnya kedalaman definisi yang disebabkan oleh adanya dominasi citra atas fakta, tergesernya sisi faktual karena kehadiran artifisial.¹⁶ Itulah sebabnya, dalam era postmodernisme fakta dan realitas hadir tanpa memiliki landasan cukup jelas, kecuali sekedar citraan diri melalui permainan tanda dan simbol.

Jika postmodernisme mengandaikan pada kekaburan makna dan definisi, maka propaganda politik *posttruth* adalah salah satu wujud nyata dari kekaburan makna itu sendiri. Dalam banyak kesempatan, propaganda politik *posttruth* juga diartikan sebagai realitas kontemporer di mana objektivitas kurang mendapatkan tempat karena tergeser oleh subjektivitas dan relativitas.¹⁷ Term objektivitas di sini merujuk pada kehadiran fakta yang mendasarkan dirinya pada kenyataan dan sumber cukup jelas seperti data, institusi, dan legitimasi lembaga. Sedangkan term subjektivitas

¹⁵ Muh. Hanif, "Studi Media dan Budaya Populer dalam Perspektif Modernisme dan Postmodernisme," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (January 1, 1970): 235–251; George Ritser, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern*, IV. (Bantul: Kreasi wacana, 2010).

¹⁶ Sinoj Antony and Ishfaq Ahmad Trambo, "Hyperreality in Media and Literature: An Overview of Jean Baudrillard's," *Clinical Medicine* 07, no. 10 (2020): 6.

¹⁷ Renate E. Meyer and Paolo Quattrone, "Living in a Post-Truth World? Research, Doubt and Organization Studies," *Organization Studies* 42, no. 9 (September 1, 2021): 1373–1383.



mengandaikan pada klaim atau pernyataan perseorangan yang sengaja dimunculkan sebagai antitesis terhadap fakta sesungguhnya. Subjektivitas mengandung makna relatif, bahwa konsep tentang benar itu tidak tunggal. Benar itu bersifat jamak, dapat dijumpai dari pintu dan arah mana saja. Tujuan dimainkannya propaganda politik *posttruth* tidak lain adalah untuk memperkeruh keadaan, memainkan perasaan dan sisi emosional publik, sehingga konstruksi makna kebenaran menjadi mengabur, dan kedalaman definisi menjadi hilang. Dalam praktiknya, propaganda politik *posttruth* lebih banyak operasi di ruang publik, khususnya media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan lain sebagainya.¹⁸ Merujuk pada penjelasan ini, baik post-trut maupun postmodernisme sesungguhnya memiliki pola dan identitas sama, yakni sama-sama mengandaikan pada pengaburan kebenaran dan realitas sebenarnya.

Secara genealogis, sebagai sebuah terminologi istilah propaganda politik *posttruth* pada dasarnya bukan hal baru dalam perbendaharaan bahasa, term ini sudah sejak lama muncul dan digunakan banyak pihak di beberapa kesempatan. Dalam dunia jurnalis, istilah propaganda politik *posttruth* pertama kali diperkenalkan oleh Steve Tesich dalam esainya berjudul *The Government of Lies* yang dimuat majalah *The Nation* tahun 1992.¹⁹ Secara umum esay ini berisikan kritik Tesich terhadap kebijakan Amerika Serikat, seperti kebijakan terhadap Iran pada masa pemerintahan Ronald Reagan serta kebijakan Perang Teluk. Menurut Tesich, keberhasilan AS mengkondisikan warganya atas agresi yang akan mereka lakukan terhadap negara-negara teluk persia tidak lepas dari kepiawaian mereka memainkan

¹⁸ Stamatis Poulakidakos, Anastasia Veneti, and Christos Fangonikolopoulos, "Post-Truth, Propaganda and the Transformation of the Spiral of Silence," *International Journal of Media & Cultural Politics* 14 (September 1, 2018): 367–382.

¹⁹ Steve Tesich, "A Government of Lies," last modified 1992, accessed May 16, 2023, <https://www.thefreelibrary.com/A+government+of+lies.-a011665982>.



opini, terutama dalam hal membangkitkan emosional dan perasaan warga AS. Dengan bangunan opini yang mereka buat, harapan warga Amerika Serikat akan perdamaian praktis membeku, sehingga mereka pun tidak memiliki kepedulian terhadap kenyataan dan kebenaran yang disembunyikan di baliknya.²⁰

Jika merujuk pada penjelasan Kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Petrus Reinhard (2019), post truth diartikan sebagai “*Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief*,” yakni keadaan yang berhubungan atau menunjukkan fakta-fakta yang objektif, tapi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, yang lebih menjadi perhatian adalah emosi dan kepercayaan pribadi.²¹ Untuk bisa menysasar aspek emosi ini, propaganda politik *posttruth* cenderung memanfaatkan isu-isu sensitif yang bersentuhan langsung dengan kondisi sosial di saat itu. Isu sensitif yang dimaksud bisa berbentuk unsur ekonomi, politik, bahkan hingga ke ranah paling primordial, seperti halnya isu (sekte) agama, ras, bahkan hingga isu rasial sekalipun. Gambaran nyata penggunaann isu sensitif di sini adalah kampanye politik Donald Trump yang saat itu mengkampanyekan politik anti imigran muslim, sebagai solusi atas maraknya aksi radikalisme kaum imigran. Kemudian kampanye pendirian tembok perbatasan AS-Meksiko, untuk menekan keluar-masuknya warga Meksiko ke negara AS.²²

²⁰ Steve Tesich, “A Government of Lies,” *The Nation* (New York, N.Y.) 254, no. 1 (1992): 12-.

²¹ Petrus Reinhard Golose, “Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 1 (2019).

²² CNN Indonesia, “Jejak Rasial Trump, Tuding Obama Muslim hingga Benci Imigran,” *internasional*, last modified July 16, 2019, accessed May 16, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190716114013-134-412497/jejak-rasial-trump-tuding-obama-muslim-hingga-benci-imigran>.



Menurut Stephen Colbert (dalam Waldman, 2016), di beberapa aspek *post truth* sejatinya memiliki kesamaan dengan terma *truthiness* yang berarti keyakinan atas sesuatu yang terasa walaupun sebenarnya tidak didukung dengan fakta yang ada.²³ Sebagai sebuah keyakinan, propaganda politik *posttruth* beroperasi tidak melalui hukum-hukum logis. Sebaliknya cenderung membelakangi akal sehat, tidak berpijak pada data, tidak juga pada legitimasi institusi sebagaimana bangunan tesis pada umumnya. Sasaran utama propaganda politik *posttruth* adalah sisi emosional dan perasaan individu. Karenanya, narasi yang dibangun di dalamnya lebih banyak berupa isu primordial yang bersentuhan langsung dengan wilayah-wilayah personal dan keyakinan dalam hal beragama. Efek negatif yang ditimbulkan adalah terbelahnya akal sehat dan keyakinan. Antara akal dan hati tidak lagi ada dalam hubungan dialektika-produktif, melainkan saling menegasikan dan mengarah pada hubungan destruktif. Puncak dari semuanya adalah munculnya sikap dan perilaku sentimen²⁴. Individu bertindak bukan karena dorongan logika sehat, melainkan lebih dibentuk oleh perasaan emosi, bahkan tidak jarang berujung pada tindakan fanatisme. Fanatisme inilah yang kemudian menjadi variabel penjelas, mengapa di banyak kesempatan masyarakat yang menderita gejala (politik) propaganda politik *posttruth* cenderung memperlihatkan militansi dalam bersikap dan berperilaku.

Propaganda politik *posttruth* sebagai Fenomena Politik Global

²³ Paul Waldman, "How America Skidded from 'Truthiness' to 'Post-Truth,'" *The Week*, last modified November 29, 2016, accessed May 16, 2023, <https://theweek.com/articles/664112/how-america-skidded-from-truthiness-posttruth>.

²⁴ Joe Allen, "Stephen Colbert Claims 'Post-Truth' Is Just a 'Truthiness' Ripoff," *Paste Magazine*, last modified November 18, 2016, accessed May 16, 2023, <https://www.pastemagazine.com/comedy/stephen-colbert/stephen-colbert-claims-post-truth-is-just-a-truthi>.



Dalam perkembangannya, propaganda politik *posttruth* sebagai fenomena sosial kekinian sering kali dihubungkan dengan fenomena politik global, terutama dari kelompok politik yang berafiliasi dengan ideologi kanan²⁵. Terdapat sekian peristiwa politik global yang menandai trend penggunaan propaganda politik *posttruth* sebagai *political strategy*. Keberhasilan Jair Bolsonaro di Brasil, Duterte di Filipina, dan Brexit yang terjadi di Inggris (2016), Miloš Zeman di Ceko (2018), Viktor Orbán di Hungaria (2010). Dan paling fenomenal dari semuanya adalah kemenangan Trump atas Hillary Clinton dalam pilpres USA (2016). Dalam pandangan banyak kalangan, kegemilangan karir politik Trump yang saat itu menggunakan strategi politik *post-truth*, secara signifikan telah menarik perhatian banyak elit politik dunia, menduplikasinya sebagai strategi politik untuk memperebutkan kekuasaan di negara masing-masing. Mengeliatnya trend penggunaan *post-truth* sebagai intrik politik global, berbanding lurus dengan rilis kamus Oxford, yang pada tahun 2017 menjadikan *propaganda politik posttruth* sebagai “*Word of the Year*”. Hal tersebut dipicu oleh meningkatnya jumlah pemakaian kata *post truth* hingga mencapai 2000 persen dari tahun sebelumnya, 2015.²⁶ Peningkatan tersebut paling banyak dipengaruhi oleh momentum politik Amerika Serikat, di mana pada saat itu *propaganda politik posttruth* diidentifikasi pada fenomena merajalelanya *Trump politics effect*.²⁷

Pada level politik global, pertarungan politik antara Hillary Clinton dan Donald Trump pada tahun 2016 lalu, dinilai banyak kalangan sebagai awal

²⁵ Edited Stephen McGlinchey et al., *Global Politics in a Post-Truth Age* (E-International Relations Bristol: England, 2022).

²⁶ theguardian.com theguardian.com, “‘Post-Truth’ Named Word of the Year by Oxford Dictionaries,” *The Guardian*, last modified November 15, 2016, accessed May 16, 2023, <http://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries>.

²⁷ BBC News BBC News, “‘Post-Truth’ Declared Word of the Year by Oxford Dictionaries,” *BBC News*, last modified November 16, 2016, accessed May 16, 2023, <https://www.bbc.com/news/uk-37995600>.



kejayaan propaganda politik *posttruth* di panggung politik dunia. Kemenangan Trump atas Hillary saat itu, diklaim buah keberhasilan Trump memainkan intrik propaganda politik *posttruth*, memainkan politik data, memanipulasi kenyataan dengan cara menyerang lembaga dan institusi pemerintah.²⁸ Dalam kaitan ini, Trump dengan sesumbarnya selain menyebut Hillary Clinton sebagai pembongkaran besar, dirinya juga menuduh klaim keberhasilan dan prestasi rezim Barack Obama selama memimpin Amerika Serikat, seperti ketersediaan lowongan pekerjaan, menurunnya kemiskinan, rendahnya pengangguran, stabilnya ekonomi dan politik, diklaimnya sebagai sebuah kebohongan belaka.²⁹ Tak tanggung-tanggung, dirinya dengan berani menyerang media, menuduh mereka telah memproduksi 'fake news' dengan menyuguhkan data dan informasi yang tidak benar³⁰. Tidak berhenti di situ, kampanye politik propaganda politik *posttruth* Trump juga menyoroti isu-isu rasial yang berpotensi besar meningkatkan kebencian atas nama agama dan ras. Khususnya keberadaan imigran muslim dan masyarakat kulit hitam di Amerika.³¹

Satu rupa dengan politik Trump, yaitu kemenangan Jair Bolsonaro di Brasil. Secara umum, pola politik Bolsonaro ketika berhasil memenangkan kontestasi kepemimpinan di Brasil memiliki kesamaan dengan pola politik Trump. Kesamaan tersebut ada pada penggunaan politik propaganda politik *posttruth* berupa politik intimidasi dan kebohongan. Untuk memengaruhi dan menarik dukungan para pemilih Brasil, Bolsonaro melakukan propaganda

²⁸ Diana C. Mutz, "Status Threat, Not Economic Hardship, Explains the 2016 Presidential Vote," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115, no. 19 (May 8, 2018): E4330–E4339.

²⁹ Denny Armandhanu, *Donald Trump Sebut Hillary Clinton 'Pembongkaran Kelas Dunia'*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160623120040-134-140364/donald-trump-sebut-hillary-clinton-pembongkaran-kelas-dunia>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.

³⁰ Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, "Social Media and Fake News in the 2016 Election," *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (May 1, 2017): 211–236.

³¹ Alexandre Bovet and Hernán A. Makse, "Influence of Fake News in Twitter during the 2016 US Presidential Election," *Nature Communications* 10, no. 1 (January 2, 2019): 7.



politik dengan membangun opini publik tentang kebangkitan komunisme di Brasil.³² Bolsonaro senantiasa menjadikan ancaman komunis sebagai komoditas politik yang selalu ia lontarkan di setiap kampanye politiknya.³³ Kelihaihan Bolsonaro memanfaatkan perasaan dan emosioanl rakyat Brasil yang memiliki kekhawatiran dan ketakutan atas bangkitnya komunis, pada akhirnya membuat nama Bolsonaro dielu-elukan masyarakat Brasil. Buah dari semuanya Bolsonaro pun melenggeng mudah ke tampuk kekuasaan. Dengan begitu, kemangan Trump di AS (2016), disusul keberhasilan Bolsonaro di Brasil (2018), kemudian di dipertegas oleh rentetan pristiwa politik global lainnya, Victor urban di Hungaria (2010), fenomena Brexit yang berujung pada keluarnya Inggris dari Uni Eropa (2016), Milos Zeman di Ceko (2018), pada akhirnya semakin menambah catatan kegemilangan propaganda politik *posttruth* sebagai *political strategy* global.³⁴

Rentetan kegemilangan politik propaganda politik *posttruth*, terutama melalui kekuatan politik propagandanya, pada akhirnya menstimulus negara-negara belahan dunia menduplikasinya. Propaganda politik *posttruth* berinovasi sebagai proyek politik global yang menarik perhatian banyak elit politisi global. Bukan hanya di negara-negara maju di belahan Eropa dan Amerika latin, seperti AS, Inggris, Ceko, dan Brasil, namun juga menyebar luas ke negara-negara berkembang di wilayah Asia. Di asia sendiri, propaganda politik *posttruth* berhasil mengantarkan Rodrigo Duterte sebagai pemimpin Filipina (2016). Kemenangan sederat elit politisi di berbagai negara di atas pastinya sedikit banyak akan menginspirasi negara asia lainnya, tak terkecuali

³² Ana Cristina Suzina, "Brazil, Hijacked by Post-Truth," *OpenDemocracy*, last modified October 22, 2018, accessed May 16, 2023, <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/brazil-hijacked-by-post-truth/>.

³³ Fetra Tumanggor, *Beternak hoaks dan Jualan Isu Komunis, Bolsonaro Menang Pilpres Brazil*, <https://www.tagar.id/beternak-hoaks-dan-jualan-isu-komunis-bolsonaro-menang-pilpres-brazil>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.

³⁴ Sebastian Schindler, "The Task of Critique in Times of Post-Truth Politics," *Review of International Studies* 46, no. 3 (July 2020): 376–394.



Indonesia yang tahun depan akan mengelat kontestasi Pemilu 2024, dalam hal ini Pilpres dan Pileg.

Propaganda politik *Posttruth* dalam Kontestasi Kekuasaan di Indonesia

Populernya politik propaganda politik *posttruth* di berbagai belahan dunia, terutama pascakemenangan Donald Trump, secara langsung mengubah peta politik global. Di Indonesia, gejala kemunculan propaganda politik *posttruth* ditandai oleh bergsernya politik di level elit pada penggunaan isu-isu primordial, seperti isu agama, identitas, kelompok, dan golongan etnis tertentu, baik politik di tingkat elektoral maupun nasional. Menggeliatnya penggunaan isu identitas dan agama, secara langsung membuat ruang politik berubah signifikan, tidak saja memanans, namun juga menjadi gaduh. Berbagai peristiwa politik sepanjang tahun 2017-2019, diawali oleh kegaduhan politik di Pilkada DKI hingga memenasnya suhu politik di Pilpres 2019, kesemuanya tidak lepas dari bergulirnya bola politik propaganda politik *posttruth* yang sengaja dimainkan oleh para pemangku kepentingan.³⁵ Untuk dapat memberi penjelasan mendalam perihal fenomena kemunculan politik propaganda politik *posttruth* di Indonesia, berikut akan dijelaskan tiga gejala politik propaganda politik *posttruth* yang terjadi sepanjang periode 2016-2023.

a) Politik Identitas

Secara konseptual, identitas merupakan kata benda yang memuat makna ciri-ciri, keadaan khusus orang atau jati diri seseorang.³⁶ Makna identitas sebagai jati diri, ciri-ciri, dan keadaan khusus di sini mengandaikan bahwa term identitas digunakan pada suatu yang bersifat personal dan

³⁵ Latief, "Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019."

³⁶ Omen Sahabi and Ilya Nacho, *The Consequences of Political Identity for a Democratic System*, preprint (Thesis Commons, February 18, 2020), accessed May 16, 2023, <https://osf.io/pdnfc>.



privasi. Sebabnya, hal menyangkut identitas tidak bisa dicampuri, terlebih diintervensi oleh orang di luarnya. Jika mengacu pada pendefinisian di atas, politik identitas berarti politik yang mencampuradukan unsur personal atau pribadi ke dalam ranah urusan publik. Masuk dalam term identitas dan pribadi di sini adalah suku, etnisitas, dan agama.³⁷

Istilah politik identitas di Indonesia sejatinya bukan terminologi baru, keberadaannya sudah dikenal lama, bahkan senantiasa muncul di setiap perayaan kontestasi kepemimpinan. Di mana terdapat perebutan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional, di situlah isu menyangkut identitas bermunculan. Term identitas dikenal sebagai komoditas politik yang memiliki peran dan fungsi yang tidak saja strategis, namun juga efektif dalam memengaruhi sikap dan perilaku politik pemilih, khususnya di kalangan masyarakat akar rumput. Alasan inilah yang menyebabkan mengapa keberadaan identitas beserta segala dinamikanya, menjadi salah satu komoditas politik yang paling banyak 'laku' dan dicari.

Pada level elektoral, politik identitas tergambar jelas dalam perhelatan Pilkada DKI 2017. Kontestasi politik yang melibatkan Ahok-Djarot, Anis-Sandi, dan Agus-Selfi, dinilai kalangan sebagai pertarungan politik yang sarat permainan identitas. Dua isu identitas paling ramai dimunculkan saat itu adalah etnisitas dan keagamaan. Pada sisi etnisitas, Ahok yang secara etnisitas berlatar China menjadi sasaran empuk lawan politiknya. Sebagai politisi yang nyata-nyata memiliki darah China, dirinya tidak bisa berbuat banyak. Sebaliknya, kubu seberang terus mengangkat isu tersebut hingga menjadi bola panas di kalangan publik. Ibarat bola salju, isu identitas terus menggelinding bebas dan membesar, utamanya seiring

³⁷ Henk Schulte Nordholt, "Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: An Essay," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2008).



meluasnya wacana seputar penjajahan ekonomi China dan tersingkirnya kaum pribumi. Menggemanya unsur identitas dalam konstelasi politik DKI Jakarta tahun 2017, menjadi awal kembalinya politik identitas dalam perjalanan demokrasi Indonesia.³⁸

Pola yang sama juga kita temukan pada sirkulasi kepemimpinan di level nasional, Pilpres 2019. Pertarungan perebutan kursi RI 1 yang mempertemukan petahana Jokowi melawan seteru politiknya di Pilpres 2014, Prabowo Subianto, juga tidak luput dari penggunaan isu identitas. Isu identitas atas nama etnisitas lebih banyak digunakan untuk menyerang dan menekan elektabilitas calon tertentu dan pada saat yang bersamaan 'kekosongan' itu bisa dimanfaatkan oleh calon-calon yang lain. Merebaknya pemberitaan asing-aseng, diangkatnya istilah pribumi sebagai narasi politik, lemahnya kedaulatan negara akibat intervensi asing, eksploitasi kekayaan oleh pendatang, kesemuanya adalah bagian dari instrumen politik identitas yang sejauh ini mewarnai kontestas politik nasional.³⁹

Bagaimana dengan 2024, bercermin pada dinamika politik di tahun 2014 dan 2019, besar kemungkinan situasinya tidak akan jauh berbeda daripada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Penggunaan isu-isu identitas seperti agama dan etnisitas diprediksi akan masih tetap ada dan bermunculan sebagai konsumsi politik publik. Tesis bahwa pemilu 2024 juga akan dipenuhi oleh politik identitas, itu terkonfirmasi jelas dalam temuan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Berdasarkan hasil surveinya, politik identitas yang marak di tahun-tahun sebelumnya besar

³⁸ Djayadi Hanan, "Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance And Limitation," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5, no. 1 (March 4, 2020): 15.

³⁹ Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (July 24, 2020): 43–63.



kemungkinan akan tetap digunakan di tahun 2024, terutama jika komposisi pertarungannya diisi oleh dua paslon (*head to head*), misal Anies vs Ganjar atau Ganjar vs Anies. Komposisi kandidat dua paslon praktis akan memunculkan dua kutub politik dengan latar ideologi berbeda, antara kelompok nasionalis dan Islamis.⁴⁰

b) Politisasi Agama

Dalam banyak dikursus politik kontemporer, pada umumnya tema agama masuk dalam lingkup politik identitas. Namun, pada kesempatan ini sengaja pembahasannya dipisah mengingat politik agama memuat efek lebih besar dari isu identitas pada umumnya. Demikian karena agama dikenal sebagai jenis identitas yang berada di wilayah keyakinan. Agama mengandung makna keagungan, suci, mistik, dan sakral. Karena sifat itulah, tak segan bagi para pemeluknya untuk bersikap totalitas dan fanatik demi membela agama yang dianutnya.

Pada tingkat daerah, gambaran nyata politisasi agama tercermin jelas pada perhelatan Pilkada DKI 2017. Terjeratnya salah satu paslon dalam kasus al-Maidah menjadi letupan awal sintemen agama.⁴¹ Kasus tersebut semakin memanaskan seiring munculnya isu penistaan agama. Puncak dari semuanya adalah lahirnya gerakan aksi bela agama 411 dan 212 yang berisi desakan pada pemerintah untuk secepatnya turun tangan dan mengadili. Intervensi hukum melalui mobilisasi massa besar-besaran, pada akhirnya bukan saja berefek pada tidak sehatnya atmosfer politik DKI Jakarta, namun

⁴⁰ CNN Indonesia CNN Indonesia, "Survei SMRC: Politik Identitas Terjadi di 2024 Jika Ganjar vs Anies," *nasional*, last modified January 13, 2023, accessed May 16, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112192528-617-899732/survei-smrc-politik-identitas-terjadi-di-2024-jika-ganjar-vs-anies>.

⁴¹ Maulida Sri Handayani, "Kuatnya Sentimen Agama di Pilgub Jakarta," *tirto.id*, last modified February 14, 2017, accessed May 16, 2023, <https://tirto.id/kuatnya-sentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn>.



secara signifikan juga membuat situasi sosial ekonomi dan politik nasional tidak menentu.⁴²

Satu rupa dengan Pilkada DKI Jakarta, Pilpres 2019 juga tidak luput dari terjangan badai politik agama. Di level politik nasional ini, fenomena politik agama muncul seiring menguatnya beragama isu keagamaan yang menyerang masing-masing paslon, baik 01 maupun 02. Pada paslon 01, tidak jauh beda dengan isu agama ketika pilpres tahun 2014, muncul wacana klasik tentang komunis, keturunan komunis, penganut komunis dan sebagainya.⁴³ Sejarah kelam komunisme dalam masa perjalanan Indonesia kemudian dimanfaatkan kelompok berkepentingan untuk menyerang paslon tertentu. Beberapa isu lain yang memperkuat praktik politisasi agama di Pilpres 2019, seperti isu pelarangan azan di Masjid, penghapusan kurikulum agama, kriminalisasi ulama', bahkan pada isu paling 'lucu' sekalipun, seperti membaca al-Qur'an dan kemampuan menjadi Imam shalat. Sedangkan pada paslon 02, serangan politik agama ditujukan pada mereka dalam bentuk tuduhan penganut aliran keagamaan radikal dan aliran fundamentalis. Mereka diklaim sebagai sarang ormas keagamaan garis keras yang berusaha mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem keyakinan mereka (baca: *khilafah*).⁴⁴

Bagaimana dengan gelaran Pemilu 2024, terutama pertarungan di Pilpres? Jika berkaca pada pengalaman Pemilu sebelumnya, rasa-rasanya

⁴² Grahanusa Mediatama, "Pilkada DKI berpotensi ganggu stabilitas jika....," *kontan.co.id*, last modified April 18, 2017, accessed May 16, 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/pilkada-dki-berpotensi-ganggu-stabilitas-jika>.

⁴³ Chandra Gian Asmara, "Jokowi Marah, Lagi-lagi Soal Tuduhan PKI," *CNBC Indonesia*, last modified January 9, 2019, accessed May 16, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190109133718-4-49771/jokowi-marah-lagi-lagi-soal-tuduhan-pki>.

⁴⁴ Irfan Teguh, "Prabowo, Isu Khilafah, dan Sejarah Gerakan Islam Politik Indonesia," *tirto.id*, last modified April 3, 2019, accessed May 16, 2023, <https://tirto.id/prabowo-isu-khilafah-dan-sejarah-gerakan-islam-politik-indonesia-dkT6>.



sulit menafikan politisasi agama di gelaran kontestasi Pemilu 2024. Dalam konteks politik di Indonesia, isu agama seolah telah menjadi konsumsi politik publik yang senantiasa dimunculkan di setiap geralan perebutan kekuasaan. Demikian bisa dimaklum, karena sebagaimana kita pahami bersama, secara sosiologis masyarakat di Indonesia memiliki kultur keagamaan sangat kuat. Karenanya, berlandaskan kenyataan ini, mustahil mengecualikan kontestasi politik Indonesia dari isu-isu agama. Tidak terkecuali dalam gelaran Pilpres 2024 yang akan datang.

c) Politik Data

Dari semua pola politik *postr-truth* Indonesia, fenomena politik data barangkali merupakan yang paling jarang didengar oleh publik. Memang, pada umumnya politik data lebih banyak terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan sejenisnya. Pada perhelatan Pilpres AS 2016, politik data digunakan Trump untuk memuluskan strategi politiknya. Ada sekitar 50 juta data pengguna *facebook* yang bocor itu dimanfaatkan *cambridge analytica*, sebuah perusahaan konsultan politik yang bermarkas di Inggris, untuk memetakan karakteristik pemilih AS, sehingga pada akhirnya turut berperan besar memenangkan Trump dalam Pilpres AS 2016.⁴⁵

Di Indonesia sendiri wacana politik data ramai diperbincangkan seiring tersiarnya kabar ada sekitar 1 juta data lebih pengguna *Facebook* Indonesia yang bocor.⁴⁶ Di luar ini semua, sesungguhnya politik data di

⁴⁵ Bagus Prihantoro Nugroho, "Cambridge Analytica, Panen Data Facebook dan Menangkan Trump," *detiknews*, last modified March 22, 2018, accessed May 16, 2023, <https://news.detik.com/internasional/d-3930184/cambridge-analytica-panen-data-facebook-dan-menangkan-trump>.

⁴⁶ Kompas Kompas, "1 Juta Data Pengguna Asal Indonesia Bocor, Menkominfo Panggil Facebook," *KOMPAS.com*, last modified April 5, 2018, accessed May 16, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/17361101/1-juta-data-pengguna-asal-indonesia-bocor-menkominfo-panggil-facebook>.



ruang politik Indonesia sudah berlangsung lama, bahkan telah ada sejak perhelatan Pilpres 2014. Persisnya sejak menggeliatnya penggunaan lembaga konsultan dan survey politik, sejak saat itulah penggunaan politik data berkembang pesat di Indonesia. Sederhananya, dalam konteks politik Indonesia, politik data lebih dominan dimainkan oleh kehadiran lembaga survey. Melalui kelebihan dan keunggulannya melakukan prediksi, lembaga survei telah mampu memainkan peran dan fungsi strategis. Sekurangnya, peran dan fungsi tersebut dapat dilihat dari keberadaan mereka yang saat ini senantiasa menjadi rujukan perhelatan politik. Baik itu di level legislatif, dan terlebih lagi di level eksekutif. Sebagai rujukan politik, lembaga survei tidak saja berkedudukan sebagai lembaga konsultan, namun juga telah dikenal sebagai ‘perangkat’ paling dominan untuk mengukur dan mengetahui perkembangan sosial-politik. Informasi tingkat elektabilitas dan popularitas kandidat atau calon dalam kontestasi politik tertentu, kesemuanya dapat dijalankan melalui lembaga survei.⁴⁷

Fenomena perang survei yang belakangan kita saksikan di banyak hajatan politik, baik PILKADA maupun Pilpres, adalah gejala paling nyata. Masing-masing lembaga survei menampilkan data atau informasi yang seringkali jauh berseberangan atau berlainan arah dengan hasil survei lainnya.⁴⁸ Menariknya, hal ini tidak kemudian memunculkan pesimisme publik. Sebaliknya, muncul kenyataan di mana opini dan sikap publik dapat dibangun dan dipengaruhi oleh hasil survei tersebut. *Kenyataan inilah yang turut menjadi* faktor munculnya berbagai pro-kontra di kalangan elit

⁴⁷ Bestian Nainggolan, ““Post Truth” Survei Opini Publik,” *kompas.id*, last modified May 14, 2018, accessed May 16, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2018/05/14/post-truth-survei-opini-publik>.

⁴⁸ Abd Hannan, “Post-Truth Di Balik Survei Politik,” *AnalisaDaily.Com*, last modified Mei 2018, accessed May 16, 2023, <https://analisa.link//>.



pemangku kepentingan, kaitannya dengan netralitas dan objektivitas lembaga survey, seperti yang ramai dibicarakan pada perhelatan Pilpres 2019.

Menariknya, meski selama ini penggunaan dan kehadiran lembaga survey menimbulkan perdebatan dan pro-kontra di tengah publik, khususnya terkait independensi dan kredibelitasnya, faktanya sampai detik ini menjelang perhelatan Pemilu 2024 yang akan datang, keberadaan lembaga survei politik masih menjadi bagian tak terpisahkan. Keberadaannya tetap digunakan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu guna mengukur popularitas si calon, dan tidak kalah pentingnya adalah memengaruhi pola pikir dan perilaku politik para pemilih di level akar rumput. Bahkan, jika mencermati dinamika politik menjelang pencalonan Pilpres 2024, tiga nama paling populer yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024, Ganjar, Prabowo, dan Anies ketiganya muncul ke permukaan berdasarkan angka-angka popularitas yang ada di lembaga survei.

Analisis Propaganda Politik Pascakebenaran dan Ancamannya terhadap Bangunan Demokrasi Indonesia

Dari keseluruhan pembacaan di atas, muncul pertanyaan besar yang cukup menarik untuk dijawab, apa dan bagaimana peran sekaligus pengaruh keberadaan politik propaganda politik *posttruth* terhadap bangunan demokrasi kita? Apa mungkin politik propaganda politik *posttruth* sendiri merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi, atau sebaliknya merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri? Dua pertanyaan ini menjadi penting dicari tahu jawabannya, mengingat sejauh ini tema seputar propaganda politik *posttruth* cukup mewarnai perjalanan demokrasi kita, baik pada tataran teoritik maupun di tataran politik praktis seperti yang terjadi di perhelatan pilpres 2014 dan 2019.



Dalam berdemokrasi, hal menyangkut kebebasan berpendapat dan berserikat sejatinya merupakan hal substantial, dirinya adalah representasi kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam perundangan.⁴⁹ Dalam berdemokrasi juga, kita mengenal keberadaan media informasi sebagai corong kebebasan, dengannya setiap warga negara menemukan keleluasaan menyampaikan aspirasi, berbagai gagasan dapat dituangkan, dan yang lebih penting dari itu optimalisasi fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan.⁵⁰ Hanya memang, harus disadari juga bahwa di tengah uforia kebebasan yang kita nikmati, mempesatnya perkembangan teknologi dengan segala bentuk dan variannya, secara langsung telah menghadapkan kita pada kenyataan paradoks.⁵¹ Pada tahap ini, teknologi media informasi yang awalnya kita kenal sebagai medium penguat demokrasi, dalam batasan-batasan tertentu, dapat juga menimbulkan efek buruk yang mengancam keberadaan demokrasi itu sendiri. Efek buruk yang dimaksud merujuk pada semakin luasnya penyebaran berita-berita bohong (*hoaks*), mobilisasi massa melalui propaganda politik di media sosial, radikalisasi agama melalui aktivitas daring, meningkatnya ujaran kebencian, manipulasi fakta, dan lebih parah dari semuanya adalah deligitamsi konsep kebenaran.

Jika pembacaan di atas kita tarik ke dalam wilayah kajian ini, ancaman serupa juga dapat kita temui pada keberadaan politik propaganda politik *posttruth*. Propaganda politik *posttruth* yang selama ini identik

⁴⁹ Abd Hannan and Busahwi Busahwi, "Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik," *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 2 (December 31, 2021): 49–69.

⁵⁰ Abd Hannan, "Regulasi Dana Kampanye Kolektif Untuk Pemilu Yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka," *Jurnal Partisipatoris* 4, no. 1 (March 31, 2022): 9–24.

⁵¹ Kikue Hamayotsu, "The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance," *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (November 2013): 658–677.

dengan politik pencitraan, kepalsuan, dan kebohongan, dalam praktiknya berpotensi besar melahirkan kekacauan. Bukan saja pada aspek sosial, namun juga pada aspek tatanan bernegara dan berbangsa. Dalam politik propaganda politik *posttruth*, ketika kebohongan dan intimidasi menjadi jalan politik, maka pada saat bersamaa ruang diskusi politik kita mengalami krisis kearifan dan etika. Dialektika politik dibangun bukan lagi berlandaskan ide-ide produktif melalui perang pemikiran, adu gagasan dan program, melainkan lebih pada dialektika destruktif.⁵² Narasi dibangun lebih banyak dibumbui oleh fitnah, *nyinyir*, saling menghujat dan masih banyak lagi yang diniatkan untuk mendekonstruksi lawan demi meraih keuntungan politik. Seperti halnya beragam isu identitas dan narasi kebencian yang mengalir deras di Pilkada DKI 2017 hingga di Pilpres 2019. Misal, penyebutan asing-aseng, tuduhan komunis, maraknya istilah cebong-kampret, narasi Indonesia bubar, air laut masuk Jakarta, terusirnya kaum pribumi, politik sentoloyo, politik genderowo, dan seabrek narasi politik kebohongan, kebencian, dan intimidasi lainnya. Dengan perilaku politik seperti ini, alih-alih mematangkan proses demokrasi, yang ada adalah pembusukan bagi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks politik Indonesia, propaganda politik *posttruth* menemukan keleluasaannya karena terlalu liarnya cara berpikir kita dalam memaknasi kebebasan. Di banyak tempat, kita mendapati banyak isu kebohongan dan intimidasi bertebaran di banyak media sosial. Tak terkecuali para elit politik yang dalam banyak kesempatan menjadi agen produksi kebohongan terbesar. Menariknya, kita mendapati semua itu sering kali dibangun atas nama kebebasan berpendapat. Dari sini kita melihat, di tengah demokrasi yang kita jalani selama ini, ternyata terdapat kesalahan elementer

⁵² Schindler, "The Task of Critique in Times of Post-Truth Politics."



dalam memaknai kebebasan itu sendiri. Secara konstitusional, benar demokrasi mengimplikasikan kebebasan, namun kebebasan yang dikehendaki bukanlah kebebasan tanpa batas. Di dalamnya melekat tanggung jawab. Setiap orang memiliki kemerdekaan untuk berpendapat dan menyebarkan informasi kepada siapa pun. Namun harus dilandasi sikap tanggung jawab. Ketiadaan dan ketidakmapuan mengambil tanggung jawab (sebagai konsekuensi kebebasan) akan menjadi pengganjal terwujudnya demokrasi yang beradab.⁵³

Sejauh ini, kita seringkali mengukur kualitas demokrasi berdasarkan angka statistik keterlibatan warga negara dalam proses pemilihan, baik di level daerah maupun nasional. Sayangnya, pada saat bersamaan kita sering kali lupa memperhatikan bagaimana dinamika sosial yang terjadi di tataran masyarakat selama proses pemilihan itu berlangsung, terutama di tengah bergulirnya tahun-tahun politik. Belajar dari kasus tahun politik menjelang Pemilu 2024, mutlak dapat dikatakan betapa sesungguhnya bangunan demokrasi Indonesia tengah mengalami problem krusial. Kondisi ini terjadi tidak lepas dari rendahnya level keadaban politik para pemangku kepentingan yang sedikit banyak telah dipengaruhi tren politik global, propaganda politik *posttruth*.

Dalam kaitan ini, kehadiran propaganda politik *posttruth* melalui intrik kebohongan dan intimidasi yang tersebar luas di ruang publik, baik yang beroperasi dalam jaringan (*daring*) maupun luar jaringan (*luring*), nyatanya bukan saja telah membuat ruang politik menjadi gaduh, namun juga telah menurunkan derajat kualitas demokrasi kita.⁵⁴ Demokrasi yang

⁵³ R. G. Mulgan, "Defining 'Democracy,'" *Political Science* 20, no. 2 (December 1, 1968): 3–9.

⁵⁴ Amilin, "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional."



idealnya berisikan politik kesantunan, perang gagasan, adu kreatif ide dan pemikiran, dijunjungnya prinsip emansipasi, pluralitas dan toleransi, dalam kenyataannya telah mengalami penyempitan. Tidak hanya itu, ruang dalam jaringan (*daring*) yang awalnya kita harapkan menjadi *new public sphere*, seperti *Facebook*, *Twitter* dan yang baru *Instagram*, tempat di mana aktivitas deliberasi era digital terbentuk, nyatanya jauh panggang dari api. Alih-alih berharap terbentuknya *cyber democracy*, justru yang muncul adalah tumbuh suburnya ruang *echo chambers* (ruang gema). Ruang di mana kebanyakan masyarakat, terutama elit politik selaku pemangku kepentingan, lebih memilih menggemakan narasi politik pragmatis dan jangka pendek daripada politik berkearifan dan berkeadaban.

Simpulan

Politik pascakebenaran adalah politik kekinian yang lahir sebagai wujud perkembangan politik global. Secara historis politik ini menemukan momentumnya pascakemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat 2016. Pada tataran teoritisnya politik pascakebenaran dipahami sebagai budaya politik kontemporer yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan perasaan daripada fakta sesungguhnya. Sedangkan pada tataran praktiknya, politik pascakebenaran beroperasi dalam dua hal, yakni kebohongan dan intimidasi. Berdasarkan ruang operasinya, politik pascakebenaran terjadi dalam dua ruang, yakni ruang luar jaringan (*luring*) dan dalam jaringan (*daring*). Di ruang *luring*, politik pascakebenaran direpresentasikan oleh manuver elit politik di level politik praktis. Sedangkan di *daring*, politik pascakebenaran diproduksi melalui keberadaan media sosial, seperti seperti halnya *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan *Instagram*.

Kedua, di Indonesia, politik pascakebenaran mulai memperlihatkan dirinya semenjak menggeliatnya berbagai propaganda politik yang mengarah



pada pemanfaatan isu-isu identitas, seperti agama, suku, dan etnis. Baik propaganda politik di level elektoral maupun di level nasional. Di level elektoral, politik pascakebenaran memperlihatkan gejalanya melalui pemanfaatan isu-isu agama dan etnisitas seperti yang terjadi dalam Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta, dan Pilpres 2019. Sedangkan di level nasional, politik pascakebenaran tergambar jelas melalui massifnya narasi politik kebohongan dan intimidasi, khususnya di tahun-tahun politik menjelang perhelatan Pilpres 2024. *Ketiga*, mengemukakan intrik politik pascakebenaran di Indonesia, baik di level daerah maupun nasional, secara langsung menimbulkan ancaman besar bagi bangunan demokrasi Indonesia. Ancaman tersebut muncul melalui instrumen politik propaganda politik *posttruth* yang menekankan dirinya pada kebohongan dan intimidasi. Dengan politik kebohongan, propaganda politik *posttruth* senantiasa abai pada fakta, memanipulasi kebenaran, mendelegitimasi hukum, dan mereduksi objektivitas pada subjektivitas. Dengan politik intimidasi, propaganda politik *posttruth* berpotensi besar mendatangkan kekacauan. Isu identitas seperti penggunaan SARA, pada praktiknya memicu lahirnya perilaku sintimen sehingga pada ujungnya bukan saja memperkeruh suasana politik, namun juga merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara.

References

- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda." *Jurnal Civics* 13, no. 2 (2016): 8.
- Allcott, Hunt, and Matthew Gentzkow. "Social Media and Fake News in the 2016 Election." *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (May 1, 2017): 211–236.



- Allen, Joe. "Stephen Colbert Claims 'Post-Truth' Is Just a 'Truthiness' Ripoff." *Paste Magazine*. Last modified November 18, 2016. Accessed May 16, 2023. <https://www.pastemagazine.com/comedy/stephen-colbert/stephen-colbert-claims-post-truth-is-just-a-truthi>.
- Amilin, Amilin. "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 39 (September 2019).
- Antony, Sinoj, and Ishfaq Ahmad Tramboo. "Hyperreality in Media and Literature: An Overview of Jean Baudrillard's." *Clinical Medicine* 07, no. 10 (2020): 6.
- Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (July 24, 2020): 43–63.
- Asmara, Chandra Gian. "Jokowi Marah, Lagi-lagi Soal Tuduhan PKI." *CNBC Indonesia*. Last modified January 9, 2019. Accessed May 16, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190109133718-4-49771/jokowi-marah-lagi-lagi-soal-tuduhan-pki>.
- BBC News, BBC News. "'Post-Truth' Declared Word of the Year by Oxford Dictionaries." *BBC News*. Last modified November 16, 2016. Accessed May 16, 2023. <https://www.bbc.com/news/uk-37995600>.
- Bovet, Alexandre, and Hernán A. Makse. "Influence of Fake News in Twitter during the 2016 US Presidential Election." *Nature Communications* 10, no. 1 (January 2, 2019): 7.
- CNN Indonesia. "Jejak Rasial Trump, Tuding Obama Muslim hingga Benci Imigran." *internasional*. Last modified July 16, 2019. Accessed May 16, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190716114013-134-412497/jejak-rasial-trump-tuding-obama-muslim-hingga-benci-imigran>.
- CNN Indonesia, CNN Indonesia. "Survei SMRC: Politik Identitas Terjadi di 2024 Jika Ganjar vs Anies." *nasional*. Last modified January 13, 2023. Accessed May 16, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112192528-617-899732/survei-smrc-politik-identitas-terjadi-di-2024-jika-ganjar-vs-anies>.



- Diniyanto, Ayon, and Wahyudi Sutrisno. "Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, Dan Strategi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (July 1, 2022): 44–58.
- Golose, Petrus Reinhard. "Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 1 (2019).
- Hamayotsu, Kikue. "The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance." *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (November 2013): 658–677.
- Hanan, Djayadi. "Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance And Limitation." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5, no. 1 (March 4, 2020): 15.
- Handayani, Maulida Sri. "Kuatnya Sentimen Agama di Pilgub Jakarta." *tirto.id*. Last modified February 14, 2017. Accessed May 16, 2023. <https://tirto.id/kuatnya-sentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn>.
- Hanif, Muh. "Studi Media dan Budaya Populer dalam Perspektif Modernisme dan Postmodernisme." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (January 1, 1970): 235–251.
- Hannan, Abd. "Post-Truth Di Balik Survei Politik." *Analisadaily.Com*. Last modified Mei 2018. Accessed May 16, 2023. <https://analisa.link//>.
- Hannan, Abd, and Busahwi Busahwi. "Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik." *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 2 (December 31, 2021): 49–69.
- Hannan, Abd. "Regulasi Dana Kampanye Kolektif Untuk Pemilu Yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka." *Jurnal Partisipatoris* 4, no. 1 (March 31, 2022): 9–24.
- Kompas, Kompas. "1 Juta Data Pengguna Asal Indonesia Bocor, Menkominfo Panggil Facebook." *KOMPAS.com*. Last modified April 5, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/17361101/1-juta-data-pengguna-asal-indonesia-bocor-menkominfo-panggil-facebook>.
- Kurniawan, Afrito Eka. "Pemilu Serentak 2024 Picu Munculnya Post Truth Politic | Kumparan.Com." <https://Kumparan.Com/>. Last modified Desember 2022. Accessed May 16, 2023. <https://kumparan.com/236-afrito-eka-kurniawan/pemilu-serentak-2024-picu-munculnya-post-truth-politic-1zXcWfU2Kfm>.
- Latief, Muh Iqbal. "Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2019).



- Mcglinchey, Edited Stephen, Leo S F Lin, Zeynep Selin Balci, and Patrick Vernon. *Global Politics in a Post-Truth Age*. E-International Relations Bristol: England, 2022.
- Mediatama, Grahanusa. "Pilkada DKI berpotensi ganggu stabilitas jika..." *kontan.co.id*. Last modified April 18, 2017. Accessed May 16, 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/pilkada-dki-berpotensi-ganggu-stabilitas-jika>.
- Meyer, Renate E., and Paolo Quattrone. "Living in a Post-Truth World? Research, Doubt and Organization Studies." *Organization Studies* 42, no. 9 (September 1, 2021): 1373–1383.
- Mulgan, R. G. "Defining 'Democracy.'" *Political Science* 20, no. 2 (December 1, 1968): 3–9.
- Mutz, Diana C. "Status Threat, Not Economic Hardship, Explains the 2016 Presidential Vote." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115, no. 19 (May 8, 2018): E4330–E4339.
- Nainggolan, Bestian. "'Post Truth' Survei Opini Publik." *kompas.id*. Last modified May 14, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2018/05/14/post-truth-survei-opini-publik>.
- Nordholt, Henk Schulte. "Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: An Essay." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2008).
- Nugroho, Bagus Prihantoro. "Cambridge Analytica, Panen Data Facebook dan Menangkan Trump." *detiknews*. Last modified March 22, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://news.detik.com/internasional/d-3930184/cambridge-analytica-panen-data-facebook-dan-menangkan-trump>.
- Nugroho, Danu Damarjati, Bagus Prihantoro. "Kaleidoskop 2018: Heboh Prabowo Bicara Prediksi RI Bubar di 2030." *detiknews*. Last modified Des 2018. Accessed May 16, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-4357883/kaleidoskop-2018-heboh-prabowo-bicara-prediksi-ri-bubar-di-2030>.
- Nurfaizah, Ayu. "Waspadai Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu 2024." *kompas.id*. Last modified March 2, 2023. Accessed May 16, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024>.
- Poulakidakos, Stamatis, Anastasia Veneti, and Christos Fangonikolopoulos. "Post-Truth, Propaganda and the Transformation of the Spiral of



- Silence.” *International Journal of Media & Cultural Politics* 14 (September 1, 2018): 367–382.
- Ratumanan, Roy. “Tensi Politik Meningkat, Sosok Ini Presiden di 2024 Gantikan Jokowi?” *Tribun-papua.com*. Last modified June 5, 2022. Accessed May 16, 2023. <https://papua.tribunnews.com/2022/06/05/tensi-politik-meningkat-sosok-ini-presiden-di-2024-gantikan-jokowi>.
- Redaksi. “Menjaga Tensi Politik.” *kompas.id*. Last modified October 4, 2022. Accessed May 16, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/04/menjaga-tensi-politik>.
- Ritser, George. *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern*. IV. Bantul: Kreasi wacana, 2010.
- Sahabi, Omen, and Ilya Nacho. *The Consequences of Political Identity for a Democratic System*. Preprint. Thesis Commons, February 18, 2020. Accessed May 16, 2023. <https://osf.io/pdnf>.
- Schindler, Sebastian. “The Task of Critique in Times of Post-Truth Politics.” *Review of International Studies* 46, no. 3 (July 2020): 376–394.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, Cet. XV. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suharyanto, Cosmas Eko. “Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review.” *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 10, no. 2 (2019).
- Suryowati, Estu. “Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan.” *Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan - Jawa Pos*. Last modified August 17, 2021. Accessed May 16, 2023. <https://www.jawapos.com/politik/01339706/panas-lebih-cepat-peta-pilpres-2024-bakal-mulai-terlihat-tahun-depan>.
- Suzina, Ana Cristina. “Brazil, Hijacked by Post-Truth.” *OpenDemocracy*. Last modified October 22, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/brazil-hijacked-by-post-truth/>.
- Syarif, Zainuddin, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan. “Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies; Vol 10, No 2 (2020): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* DOI - 10.18326/ijims.v10i2.199-225 10, no. 2 (December 21, 2020). <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345>.



- Teguh, Irfan. "Prabowo, Isu Khilafah, dan Sejarah Gerakan Islam Politik Indonesia." *tirto.id*. Last modified April 3, 2019. Accessed May 16, 2023. <https://tirto.id/prabowo-isu-khilafah-dan-sejarah-gerakan-islam-politik-indonesia-dkT6>.
- Tesich, Steve. "A Government of Lies." Last modified 1992. Accessed May 16, 2023. <https://www.thefreelibrary.com/A+government+of+lies.-a011665982>.
- . "A Government of Lies." *The Nation* (New York, N.Y.) 254, no. 1 (1992): 12-.
- theguardian.com, theguardian.com. "'Post-Truth' Named Word of the Year by Oxford Dictionaries." *The Guardian*. Last modified November 15, 2016. Accessed May 16, 2023. <http://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries>.
- Waldman, Paul. "How America Skidded from 'Truthiness' to 'Post-Truth.'" *The Week*. Last modified November 29, 2016. Accessed May 16, 2023. <https://theweek.com/articles/664112/how-america-skidded-from-truthiness-posttruth>.



POLITICAL CRITIQUE OF AXEL HONNETH'S RECOGNITION OF JURGEN HABERMAS DELIBERATIVE DEMOCRACY

Muhammad Sukri & Ishak Hariyanto

Universitas Islam Negeri Mataram

m.sukri@uinmataram.ac.id, ishakhariyanto@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this paper is to express Honneth's critique of Habermas' deliberative democracy. This research uses qualitative methods that are critically analytical in comparing the thoughts of Habermas and Honneth. The theory used is the sociology of knowledge from Karl Mannheim's. In the sociological theory of knowledge Mannheim says that man and his existence in the social environment can not be separated from his environment, a subjectivity that knows there is always interference from the social, political environment in which he lives. The results of this study reveal that the deliberative criticism of Democracy echoed by Habermas still leaves problems. The problem in deliberative democracies hints at rational communication, yet everyone does not have the same knowledge of rationality. For the educated person he has communication and knowledge rationally, but for the unlearned person does not have it, so they must represent his voice. In the Indonesian context, deliberative democracy is still wishful thinking. The public space referred to by Habermas has not yet gained a place in Indonesia, because the representation system that is the hallmark of representative democracy can be said to be pseudo-representation because there is no proportional bargaining position between constituents and their people's representatives. As Honneth's critique of Habermas the weakness of deliberative democracy, Honneth offers a form of intersubjective relation based on three areas of recognition namely love, self-confidence, self-respect, solidarity.

Keywords: *Deliberative Democracy, Critique, Habermas, Honneth.*

A. Introduction

Honneth carries the theory of recognition, the theory of cognition aims at the one hand to try to further develop critical theory and at the



same time re-examine how structures and institutions are interrelated. The central discovery in Habermas's idea that human development can only be achieved through a process of intersubjectivity, was expanded by Honneth by adding a central role of recognition and appreciation in the process.¹

Respect is at the heart of Habermas' theory that communicative actions and distortions in communication are forms of harassment or disrespect. Going beyond Habermas, Honneth said that recognition precedes the prerequisites of such intersubjective communication. It was on that aspect of recognition that Honneth entered and criticised his predecessor's way of thinking which was considered communicatively normatively oriented to ethical turn.²

From the theory of communicative action promoted by Habermas which focused on the aspect of congenital rationality, on the contrary Honneth takes attention to the pre-cognitive aspect which is then called the ethical turn.³ Ethical turning in its development is referred to as critical theory, in other words Honneth wants to divert Habermas' communicative turn towards ethical turn as a normative basis for the dismantling of social pathology problems in society. Habermas' communicative turn was judged by Honneth to be focused on linguistic problems of an instrumental ratio. For Habermas, intersubjectivity is related to linguistic structure as a pragmatic dimension of communicative action between subjects then explicit through discursive argumentation.⁴

¹ Januar Rizal, "Paradigmatik Teori Rekognitif", *Jurnal Keamanan Nasional*, (Vol, 5, No, 1. Thn: 2018), hlm, 21.

² Volker Schmitz, ed., *Axel Honneth and the Critical Theory of Recognition* (London: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 2.

³ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, trans. oleh Joel Anderson (Cambridge: MIT Press, 1995), hlm. 160.

⁴ Katia Genel, "Jacques Rancière and Axel Honneth: Two Critical Approaches to the Political," dalam *Recognition or Disagreement: A Critical Encounter on The Politics of*



In contrast to Habermas, Honneth argues that language is not the only basic aspect of intersubjectivity relations, but the struggle for social recognition of the subject becomes the most important thing. Thus, Honneth complements Habermas' claim that the root of social problems is at the level of abstraction with the addition of the argument that conflict problems and their solutions at the concrete level also need to be considered. From Honneth's view it is considered that the normative expectation of the individual is the substance of recognition, it also contains critical potential that can involve the dynamics of social transformation.⁵

The result of the dynamics of social transformation that ignores the principle of justice in the absence of intersubjectivity has implications for social conflict. For Habermas individual or group justice can only be obtained through procedural processes or equivalent cognitive communication.⁶ However, Honneth thinks that to get justice, there must be a prerequisite that precedes it, namely respect and recognition as a form of elimination from misrecognition. To obtain recognition is embodied the normative ideals of a just society empirically confirmed through historical recognition. Thus, Honneth sought to develop a normative basis for good life (ethical life) by designating moral structure or grammatics as a prerequisite for intersubjective relations.⁷

In order to realise a confession, the law in the realm of recognition, normatively, Honneth offers what is called a law inseparable from the rest

Freedom, Equality, and Identity, ed. oleh Katia Genel dan Jean-Philippe Deranty (New York: Columbia University Press, 2016), hlm. 15.

⁵ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 16.

⁶ Habermas. *Communication and The Evolution of Society*. T. McCarthy, Translator. (Boston: Beacon Press, 1979), hlm. 20.

⁷ Honneth, *The Struggle for Recognition*, hlm. 167.



either in the sense of the realm of love and solidarity, nor internally separated from the subjects who are members in its scope. This indicates that justice is the primary claim of the law, measured by the extent to which it can provide guarantees of mutual recognition. Although Habermas also voiced justice as Honneth also held this view. Therefore, justice as honneth's analysis so that the guarantee will ensure and secure the fulfilment of basic needs, equality, and participation contributions to his community. Briefly, recognition is the standard for what is claimed to be justice.⁸

B. Methods

This research uses qualitative methods that are critically analytical in comparing Habermas and Honneth's thoughts on democracy and Honneth's critique of Habermas' deliberative democracy. The theory used is the sociology of knowledge from Karl Mannheim's.⁹ In the sociological theory of knowledge Mannheim says that man and his existence in the social environment can not be separated from his environment, a subjectivity that knows there is always interference from the social, political environment in which he lives. Similarly, the two figures Habermas and Honneth cannot escape the social, political, and events surrounding it.¹⁰ Human knowledge is not a hollow product of the social sphere that surrounds it, therefore a thought is born from the historical scope of the individual's life.¹¹

⁸ Axel Honneth, *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory* (Malden: Polity Press, 2007), 4.

⁹ Karl Mannheim, dalam Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary of Philosophy*, Terj. Yudi Santoso, Cet. Ke-I, 2013, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 530.

¹⁰ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 291-292.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 292-293.



Departing from Mannheim's sociological theory of knowledge, there is always a relationship between the thinker, the environment, the meaning and the results of his thinking. The sociology of knowledge looks at the psychological context of the thinker, the space and time of his life. Therefore, to draw conclusions from ideas, one must look at the scope of one's life so that one is able to take ideas as a whole. This theory then borrowed to track the knowledge of Habermas and Honneth in describing the problems of democracy. This theory is also used to trace the lives of two figures such as the setting of life, life history, the psychology of the author, the influences of other scientists so that they have an impact on the product of their thinking, namely about democracy.¹²

The operational theory of sociology of knowledge in this study is to reveal the knowledge of a figure in space and time and the influence of his environment in this case Habermas and Honneth. In Mannheim's view, ideology is a form of knowledge that lives in society and reflects its society. Knowledge is inherent in culture, where the basis is society. Knowledge is a group production because it requires social recognition. Similarly, Habermas and Honneth are products of their social environment, so in this theory they want to express how each figure views democracy in their respective environments.¹³

C. Result and Discussion

1. Deliberative Democracy

In order to prevent the domination and hegemony of political coalition power through democratic procedures and processes, later more and more experts spoke of "deliberative democracy." According to various

¹² Muhayar Fanani, *Metode Studi Islam....*, hlm. 38-39.

¹³ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia....*, hlm. 5-6.



studies, "deliberative democracy" or sometimes called "discursive democracy" is a democracy that makes "deliberation" a central praxis in the decision-making process.

The basic term and concept of "deliberative democracy" is a relatively new invention introduced more broadly by Joseph M. Bessette in 1980 in *Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government*. Although relatively new, there are political experts who trace the roots of deliberative democracy to classical Greek times and to the political philosopher John Rawls (1921-2002) or the sociological philosopher Jurgen Habermas (born 1929) who emphasised "consensual democracy".

Etymologically the word deliberation comes from the Latin word *deliberatio* which means consultation, weighing or deliberation. According to Hansen, the idea of deliberation can be drawn from the thought of some philosophers and political thinkers since the 18th century such as, Rousseau, de Tocqueville, J.S. Mill, Dewey and Koch. However, experts generally agree that the term deliberative democracy was introduced by J.M. Bessette in 1980. Nonetheless, the thinker who was seen as most instrumental in developing and popularising the deliberative model of democracy was Jurgen Habermas, a second-generation critical philosopher of the Frankfurt School (Frankfurter Schule), Germany. The deliberative model of democracy was also developed by Ulrich Beck and Anthony Giddens in their social theories of modern society. In short, Habermas gave philosophical foundations to the idea of a deliberative democratic model, while Ulrich Beck and Anthony Giddens supported social theory to the model.

This deliberative use of the term confirms a different political approach to understanding democracy. This difference is closely related to efforts to improve the quality of existing democratic practices by improving the character and form of participation. For proponents of this model,



contemporary democracy is undergoing serious degradation, increasingly caught up in personal conflicts of interest, political behaviour that prioritises imagery over substance, coachman debates in the public sphere and power fights for personal and/or group ambitions and gains.

Habermas (1992) describes deliberative democracy as a model of democracy that gives birth to the rule of law whose legitimacy stems from the quality of deliberation procedures, not only in formal state institutions (such as parliament), but also most importantly in society as a whole. That is, political decisions can only be accepted and binding on all members of society if they are the product of a process of dialogue that begins in the periperi region, which moves towards parliament through democratic and constitutional procedures.

This deliberative model of democracy is the starting point of the democratic process outside the formal institutions of the political system and is located in a more informal public domain that serves as a bridge connecting the various organisations and associations that make up civil society. This model views that every public policy must be tested first through public consultation or through public discourse with the existence of a "public sphere." Habermas wants to open up a wider space for the public in the process of forming public policy.

The concept of "public space" that Habermas refers to is not just the availability of a forum to discuss every public policy. Habermas views the existence of public space by stating that public space is not just a place but a condition that allows constituents to always act as sounding boards in voicing the public interest for public policymaking. A public sphere that can show a discourse between constituents and their representatives that leads to a public policy that is truly in favour of the public interest.



In the context of a democratic state, access to public opinion is guaranteed by the state, where public opinion is born from every conversation of individuals who then form a public body. Habermas added that citizens behave as a public body when they speak in a non-prohibited way, namely with guaranteed freedom of association and assembly, as well as the freedom to express and publish their opinions on matters of public interest. At the heart of Habermas thinking, all legal and policy products made by the state, whether in the legislative, executive, and judicial realms, must go through a process of testing and discourse by civil society.

Habermas's critical thinking on deliberative democratic models rests on dialogue that rests on at least two grand narratives. First, as a major part of his criticism of Marxism (including against the early generations of the Frankfurt School) which he said relied too heavily on what he called the philosophy of consciousness. This philosophy sees the subject only as a monological entity, formed not on the basis of its relationship with other subjects but rather on the basis of its struggle to control nature for its material interests reflected in the development of the forces of production as the most important explanatory base in the tradition of Marxist thought. Second, a way of thinking that prioritises communicative action as the most important form of human activity, and considers it the only way out to unify modern society that rests on rationalism, otherwise called instrumental ratios. According to Habermas the human being is complex, so he offers a conception of "communicative ratio," a conception of thinking by communicating with each other. In more detail Habermas explains, the capacity of organising and integrating implied in communicative action has to do with two things. First, everyone who engages in speech inevitably has to adjust his behaviour based on the conditions that allow a logical dialogue to take place (for example not imposing a will). Secondly, at the same time



the rules that influence this behaviour are accepted as something that has legitimacy and must be obeyed.

The deliberative democratic model initiated by Habermas is not a new discourse in the dialectic of democracy in Indonesia. For some civil society groups in Indonesia, this discourse is considered very promising for the future of post-Reformation democracy. The existence of a public space to discuss public policy is very strategic for democratic development. However, in the current Indonesian context, deliberative democracy is still *ansich's* wishful thinking. The public space referred to by Habermas has not yet gained a place in Indonesia, because the representation system that is the hallmark of representative democracy can be said to be pseudo-representation because there is no proportional bargaining position between constituents and representatives of the people. This condition makes it difficult for public spaces to be created in such a system of representation. Public space is not solely the presence of forums such as hearings, public discussions or crowded aspiration houses during the recess of the people's representatives.

The deliberative democratic model gives importance to decision-making processes or procedures that emphasise deliberation and exploring problems through dialogue or sharing of ideas between parties and citizens. Citizen engagement is at the core of deliberative democracy, in contrast to the basic idea of representative democracy which emphasises representation. If the deliberative democratic model prioritises cooperation between ideas and between parties, then representative democracy is a competition between ideas and between parties. However, it is not impossible for the grand narrative of deliberation to be applied in a representative democratic system, where the process of forming or making policies by people's representatives is coloured by the involvement of the people/constituents through a



deliberative process. In short, the important elements of the deliberative democracy model consist of: (1) the participation of citizens, (2) the availability of space to be involved in the process (public space), and (3) the existence of communication between citizens and between citizens and policymakers (the state). The author believes that if important elements of the deliberative democracy model can be applied, especially in the process of policymaking and the formation of legal products in Indonesia (in cause laws and regulations) then the policies or legal products produced must have a responsive legal character. This box is a very relevant solution for democratic practices in Indonesia in the future. This is in line with the opinion of Joseph Kristiadi (1999) that democracy refers to the highest popular power.

2. Critique of Axel Honneth's on Deliberative Democracy

Axel Honneth was born in Essen Germany on July 18, 1949, studied in Bonn, Bochum, Berlin and Munich under Jürgen Habermas. Axel Honneth was a contemporary philosopher of Frankfurt critical theory. He was a third-generation figure after Horkheimer and Adorno who was a first-generation figure and Habermas as a second-generation figure of the Frankfurt critical developed a critical analysis of social problems. The term critical theory was coined by Horkheimer to answer concerns in scientific and social situations as well as in the scientific field. This Frankfurt School criticised the teachings in the social field that existed at that time including Orthodox Marxism, but also simultaneously criticised the social situation at that time that needed change. In an article Horkheimer explains the intent of critical



theory. In the theory Horkheimer analysed the functioning of science and society.¹⁴

Recognition takes on a new plot in Honneth's critical thinking. This theory certainly takes distance from previous thinkers especially Habermas. Honneth did not reject completely Habermas thinking regarding the act of communication, only that according to him the theory of communicative action has not sufficiently addressed social conflicts in modern society, overcoming the rate of instrumental ratios in modern society. Habermas developed the capacity of communicative ratios, on the contrary Honneth paid more attention to the pragmatic dimension and the affective side of the human being as a precondition for communication between subjects. According to Honneth Habermas' theory of communicative action limits itself to the cooling aspect only forgetting to other aspects, whereas Honneth always offers recognition. This theory has a psychological that every human being needs to be recognised for good self-actualization in an environment that supports human development basically always being in dialogical relationships with others and reciprocal relationships with other people or communities that form his identity.¹⁵

The deliberative democracy conceived by Habermas still leaves problems. The problem in deliberative democracies hints at rational communication, yet everyone does not have the same knowledge of rationality. For the educated person he has communication and knowledge rationally, but for the unlearned person does not have it, so they must represent his voice. Thus, deliberative democracy in this regard found a dead end, so it was criticised by Honneth as its successor.

¹⁴ Diah Meltikasari,” Rekognisi Axel Honneth Gramatika Moral Bagi Defisit Rasionalitas”, *Jurnal Filsafat*, (Vol, 7. No, 4.Thn: 2021), hlm, 34.

¹⁵ Otto Gusti Madung,” Rekognisi Dan Kosep Pengakuan Intersubjektif Pemikiran Axel Honneth, *Jurnal Filsafat Dan Teologi*, (Vol. 7. No. 2. Thn: 2014), hlm, 29.



Honneth's critique by basing his knowledge on the theory of recognition; recognition of the subject becomes a necessary condition or in other words becomes a normative basis for the formation of the subject as a moral agent and for the creation of positive human relations. However, the relationship is dualism, meaning that failure in the relationship will cause disrespect in the form of violent social exclusion, contempt for abilities and others that destroy one's self-confidence and self-esteem, the destruction of self-confidence will cause social struggle to get recognition or restoration of dignity.¹⁶ For this reason, Honneth's concept offers a form of intersubjective relation based on three areas of recognition: (a). Love (b). Self-confidence, (c). Self-respect, (d). Solidarity. According to Honneth, these three things are a form of practical relation to the self. These three things are not purely as a belief in a person or emotional region but rather a dynamic process in which individuals experience that they have a particular site the details are as follows:

a. Love and self confidence

As already explained that Honneth emphasizes recognition as a precondition for self-actualization to be able to self-actualize a person first needs to have confidence. According to Honneth confidence can be built in love relationships. Honneth describes the love relationship between mother and daughter. Love relationships are the basis or basis for self-confidence, in the relationship between Mother and Child. The figure of a mother tries to read and interpret the unarticulated signals of the baby, in this case the mother must have the intuition and sensitivity to capture what the baby needs as much as possible not what she thinks is good.

¹⁶ Supriyadi, "Kajian Rekognisi Hak Masyarakat", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, (Vol, 15. No, 9. Thn: 2021), hlm, 18.



b. Self respect

What Honneth meant as self-respect is a sense of belonging to the universal dignity of man that what we have for others is recognition and respect for his status as an agent capable of acting on reason and as an autonomous author of the moral and political laws therein, he himself as a subject thus has self-respect. As a person, a morally responsible agent or as someone capable of engaging in this type of consideration.

c. Solidarity

While self-respect speaks of dignity, how all people are viewed equally human beings self-esteem instead speaks of what makes a person uniquely particular which in Hegel's language is called particular. Furthermore, what makes a special person irreplaceable is not based on negative or trivial characteristics but rather on something of value if a person does not have a special thing to offer him physical deficiencies in the formation of his identity. To explain this issue Honneth took Mead's idea of personal identity that distinguishing one person from another as a person is a matter of what we need better than others. There is an impression that Mead wants everyone to strive beyond the others, but this impression of superiority is focused on the issue of the division of labours in the modern industrial community that by allowing each individual to discover the role of their respective functional figures which is not for the benefit of others but for the benefit of everyone.

D. Conclusion

The liberated democracy echoed by Habermas still leaves problems. The problem in deliberative democracies hints at rational communication, yet everyone does not have the same knowledge of rationality. For the



educated person he has communication and knowledge rationally, but for the unlearned person does not have it, so they must represent his voice. Thus, deliberative democracy in this regard found a dead end, so it was criticised by Honneth as its successor. Recognition theory aims at the one hand to further develop critical theory and at the same time re-examine how structures and institutions are interrelated. The central discovery in Habermas's idea that human development can only be achieved through the process of intersubjectivity (subjects) but was extended by Honneth by adding the central role of love, self-confidence, self-respect, solidarity.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

REFERENCES

- Axel Honneth, *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory* (Malden: Polity Press, 2007)
- , *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, trans. oleh Joel Anderson (Cambridge: MIT Press, 1995)
- Diah Meltikasari, "Rekognisi Axel Honneth Gramatika Moral Bagi Defisit Rasionalitas", *Jurnal Filsafat*, (Vol, 7. No, 4. Thn: 2021)
- F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009)
- Habermas. *Communication and The Evolution of Society*. T. McCarthy, Translator. (Boston: Beacon Press, 1979)



- Januar Rizal, "Paradigmatik Teori Rekognitif", *Jurnal Keamanan Nasional*, (Vol. 5. No. 1. Thn: 2018)
- Karl Mannheim, dalam Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary of Philosophy*, Terj. Yudi Santoso, Cet. Ke-I, 2013, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- , *Ideology and Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991)
- Katia Genel, "Jacques Rancière and Axel Honneth: Two Critical Approaches to the Political," dalam *Recognition or Disagreement: A Critical Encounter on The Politics of Freedom, Equality, and Identity*, ed. oleh Katia Genel dan Jean-Philippe Deranty (New York: Columbia University Press, 2016)
- Otto Gusti Madung, "Rekognisi Dan Kosep Pengakuan Intersubjektif Pemikiran Axel Honneth, *Jurnal Filsafat Dan Teologi*, (Vol. 7. No. 2. Thn: 2014)
- Rian Adhivira Prab, "Politik Rekognisi Axel Honneth", *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, (Vol. 10. No. 5. Thn: 2019)
- Supriyadi, "Kajian Rekognisi Hak Masyarakat", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (Vol. 15. No. 9. Thn: 2021)
- Volker Schmitz, ed., *Axel Honneth and the Critical Theory of Recognition* (London: Palgrave Macmillan, 2019)



KONTESTASI PEREMPUAN KARIR DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI KESETARAAN PADA RANAH POLITIK STUDI PEMIKIRAN MARGARETH THATCHER

Nurul Fajri Assakinah, Ita Rodiyah

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

nurulfajriassakinah150@gmail.com, Ita.rodiah@uin-suka.ac.id

Abstract

This study uses a descriptive qualitative approach which answers the existence of Margaret Thatcher in maintaining her existence in a career in politics. The results of the study show that there are one-sided views that think that women are only placed in the domestic area or in other words, kitchen wells, mattresses but this is denied by the figure of Margaret Thatcher towards women who want to direct themselves in the field of public politics, as well as in This study writes about the success of Margaret Thatcher during her leadership in England. This shows that men and women who distinguish them are only their Qodrat and devotion to Allah SWT. Women are identified as emotional, gentle, not passively independent, or in general it can be said as the opposite of the rational, aggressive, and independent male identity. This stereotype is very influential when it comes to society's perspective on women.

Keywords: *Existence, Margaret Thatcher, Career, Public.*

Pendahuluan

Perbincangan mengenai perempuan, merupakan salah satu dari sekian tema yang menarik yang selalu menghiasi forum diskusi para akdemisi saat ini. Luasnya pembahasan tentang perempuan menghasilkan sudut pandang baik kaitannya dengan posisi, peran kontribusi perempuan dalam kehidupan¹. Pandangan sebagian orang yang menganggap bahwa

¹Ahlan Al-Gouts, *Perempaun Terlupakan*.



perempuan adalah mahluk lemah, mengapa demikian? Karena banyaknya pendapat yang menganggap bahwa perempuan wilayahnya hanya di wilayah Domestik saja. Perempuan pernah di sanjung dan tentunya pernah juga di rendahkan.

Problem Gender yang meliputi peran gender, ketidakadilan gender dan kesetaraan gender, di pertanyakan, dibahas dan di perdebatkan dalam agenda-agenda gerakan emansipasi perempuan, dan gerakan feminisme di tingkat nasional maupun internasional. Ketidakadilan gender menjadi kenyataan dan tontonan yang pahit hampir di semua Negara dan semua etnis. Kesetaraan gender sering di tuntun secara tidak proposional. Semua kondisi tersebut tambah meramaikan hiruk pikuk probelma gender, tentu saja keadilan dan kesetaraan gender tidak harus berarti kesamaan dalam semua hal.²

Berbicara tentang perempuan adalah berbicara tentang situasi transisi yang di bayangkan. Tidak hanya di Indonesia, dan bukan hanya di negeri timur. Munculnya gerakan Woman's Lib menunjukkan bahwa di bagian dunia yang lebih maju, situasi ini di bayangkan sebagai dijalani kaum perempuan yang lewat perjuangan menghapuskan kesenjangan, diinginkan meraih kedudukan setara dengan lawan jenis.³ Di Indonesia sudah dibuktikan dengan adanya beberapa perempuan yang muncul di ranah public, seperti Megawati yang pernah menjabat sebagai presiden Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi menteri Lingkungan hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri Keuangan, dan yang lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan bukan mahluk lemah

²“Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam / Mansour Fakih ... [Et Al.] ; Penyunting, Tim Risalah Gusti | Opac Perpustakaan Nasional Ri.” 91.

³“Syu’bah Asa, Perempuan Di Dalam Dan Diluar Fiqih, (Surabaya; Risalah Gusti;1996). - Penelusuran Google,” 101.



melainkan jiwa kepemimpinannya masih dipertanyakan karena perempuan memakai perasaan beda halnya dengan laki-laki.

Keyakinan bahwa laki-laki harus memimpin kaum perempuan tersebut sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang kepemimpinan bersifat adil dan tidak menindas. Namun, persoalan lain yang timbul justru kepercayaan tersebut membawa pada keyakinan bahwa kaum perempuan adalah kaum subordinasi dari kaum laki-laki, meskipun secara objektif, contohnya kaum perempuan lebih mampu, lebih pandai dan lebih layak, namun ia harus tetap dipimpin. Beberapa tafsiran agama telah melahirkan suatu peran gender (gender role) yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang ditetapkan berdasarkan keyakinan atau tafsiran agama antara kaum laki-laki dan perempuan islam. Dalam buku “Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam “ mengatakan konstruksi sosial dalam peran gender tidak akan menimbulkan masalah selagi tidak menimbulkan ketidakadilan gender misalnya seperti, bentuk diskriminasi kepemimpinan, marginalisasi ekonomi, kekerasan dan juga beban kerja.⁴

Dalam catatan sejarah, posisi perempuan dalam perubahan dan perkembangan peradaban, tidak sebagai makhluk yang harus selalu dilindungi, bukan juga harus diayomi layaknya seorang bayi, atau anak bangsawan yang tidak mengerti akan tujuan diri. Akan tetapi, perempuan juga berada pada posisi terdepan ikut serta dalam proses pengagasan ide untuk menyongsong peradaban maju. Sejarah dunia mencatat perempuan yang luar biasa bukan hanya tentang kecantikan dan kemolekan yang dimiliki tubuhnya. Maka sangat melanggar norma dan mencoreng nilai-nilai

⁴“Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam / Mansour Fakih ... [Et Al.] ; Penyunting, Tim Risaalah Gusti | Opac Perpustakaan Nasional Ri.” 95.



kemanusiaan bila perempuan masih dipandang dan di posisikan pada posisi yang tidak wajar. Hadirnya pandangan yang mendeskriditkan perempuan pertama terjadi pada masa Yunani. Yang selalu menempatkan perempuan pada posisi yang tidak layak serta menganggap kaum perempuan sebagai wadah untuk meneruskan generasi. Sehingga pemikiran tersebut menjadi mendarah daging pada diri masyarakat hari ini, dan berusaha mengembalikan budaya kejahilan itu dengan menggunakan agama sebagai dalih membenarkan hasrat kejahilan mereka.⁵

Kajian tentang kontestasi perempuan dalam mempertahankan eksistensi kesetaraan telah banyak diteliti oleh para peneliti dengan berbagai sudut pandang dan kecenderungan kajian masing-masing. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muahmmad Mahsus yang berjudul “Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan”, kecenderungan penelitiannya mengenai fenomena produk hukum yang menentang kesetaraan gender dalam tafsir mengenai penyetaraan bagian waris laki-laki dan perempuan tetapi produk tersebut dianggap bertentangan dengan kaidah yang lebih besar dalam syariat Islam yakni dalil nash Al-Qur’an tentang bagian laki-laki dan perempuan.⁶ Hal itu juga dapat dilihat pada penelitiannya Komang Sri Widiyanti yang berjudul “Makna Karir bagi Perempuan dalam Partai Politik” kecenderungan penelitiannya mengenai makna perempuan karir

⁵“(Pdf) Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan | Journal Of Islamic Law (Jil) - Academia.Edu,” 30.

⁶“(Pdf) Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan | Journal Of Islamic Law (Jil) - Academia.Edu,” 30.



dalam bidang politik, di Indonesia sudah membuka peluang bagi perempuan ingin membangun karir di bidang politik sebagai politisi perempuan.⁷

Sesuai yang di jabarkan diatas, dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kontestasi perempuan dalam mempertahankan eksistensinya pada bidang karir studi pemikiran Margareth Thatcher. Karena menurut pandangan dan asumsi penulis bahwa kesetaraan gender adalah isu yang menarik untuk dikaji dan kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama baik itu laki-laki dan perempuan. Dengan adanya Kesetaraan gender bukan berarti bahwa perempuan harus berada diatas laki-laki, begitupun sebaliknya. Tapi ini merupakan salah satu cara untuk memanusiakan manusia.⁸

Metodelogi

Untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada nilai.⁹ Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif kualitatif berupa kata-kata dan tulisan atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang di amati.¹⁰ Metode ini di gunakan untuk mencoba menjawab secara keseluruhan mengenai Kontestasi Perempuan Karir Dalam Mempertahankan Eksistensi Kesetaraan Study Pemikiran Margareth Thatcher selain itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

⁷Widiantari, "Makna Karir Bagi Perempuan Dalam Partai Politik."

⁸Nur Afif, Asep Ubaidillah, Muhammad Sulhan, "Konsep Kesetaraan Gender Persepektif Fatimma Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," 230.

⁹"Agus Salim, Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta;Tiara Wacana Yogya, 2021) - Penelusuran Google," 11.

¹⁰"Adi Prastowo, Metode Penelitian Dalam Persektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, Cetakan Iii 2016). - Penelusuran Google," 22.



Pembahasan

1. Sekilas tentang Margaret Thatcher

Margaret Hilda Roberts yang biasa di kenal dengan sebutan Margaret Thatcher ia lahir di Grantham Lincolnshire pada 13 Oktober tahun 1925. Margaret adalah calon Konservatif dari Dartford, di mana saat pada tahun Pada pemilu 1950 dan 1951 dia banyak menarik perhatian media karena dia adalah kandidat termuda dan satu-satunya perempuan pada pemilu tersebut. Namun sangat di sayangkan dia kalah dua kali berturut-turut dari Norman Dodds. Selama ia pada masa kampanye, Margaret mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya dan juga seseorang yang special menurutnya Denis Thatcher yang dia nikahi pada bulan Desember 1951.

Semasa aktif di dunia politik Margaret Thatcher dijuluki sebagai Iron Lady, hal ini dikarenakan kepemimpinan serta wataknya yang keras. Dia mulai jarang terlihat dan menjalani perawatan stroke pada tahun 2002. Thatcher wafat pada tangga 8 April 2013 dalam usia 87 tahun akibat penyakit stroke yang dialaminya. Ia menjadi sosok pemimpin Inggris yang paling berpengaruh dalam masa modern di panggung internasional. Hingga saat ini, Thatcher adalah satu-satunya perdana menteri perempuan di Inggris. Dia menjadi orang yang paling lama menjadi perdana menteri yakni selama lebih dari 11 tahun sejak 4 Mei 1979 hingga 28 November 1990.¹¹

Margert Thatcher merupakan sosok pemimpin yang tegas berani dan konsisten, ia mengambil resiko besar pada tahun 1982 ia berhasil

¹¹“Profil - Margaret Thatcher.”



merebut kembali kepulaun yang di duduki Argentina.¹² Eksistensi perempuan merupakan tindakan yang di ambil oleh sekelompok orang dengan tujuan mewujudkan kesetaraan gender.¹³ Seperti definisnya bahwa kesetaraan gender merupakan kesaman kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak nya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan politi, ekonomi, sosial budaya.

Konstruksi sosial pada umumnya dapat di artikan sebagai bentuk peratahanan sosial di masyarakat. Konstruksi sosial dalam gender ialah bagaimana peran gender di bentuk dari kebudayaan dan disosialisasikan. Margaret Thatcher ketika menjadi pemimpin di Inggris tentu banyak permasalahan yang di hadapainya, di antara lain seperti pada saat ia mendobrak Konsensus di antara dua partai terbesar dinggris yaitu partai buruh dan partai konservatif¹⁴. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran tinggi di Inggris, dia mengahdapai berbagai desakan untuk berputar haluan namun ia bersiteguh bahwa kebijakan yang di ambil itu benar, dan ia membuktikan pada akhir kepemimpinannya tingkat pengangguran kian menurun. Dari hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa kerangka berfikir Margaret Thatcher seorang pemimpin yang berani dan berpendirian yang kuat, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan.

¹²“Margaret Thatcher, Tipe Pemimpin Yang Didambakan Di Indonesia - Internasional | Universitas Muhammadiyah Malang.”

¹³Nelli, “Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Studi Terhadap Anggota Legislatif Di Provinsi Riau),” 256.

¹⁴“Margaret Thatcher, Tipe Pemimpin Yang Didambakan Di Indonesia - Internasional | Universitas Muhammadiyah Malang.”



Seperti yang sudah di paparkan di atas mengenai Margareth Thatcher adalah sosok perempuan dari amerika yang sangat menginspirasi kaum perempuan, ia adalah sosok perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan bahkan ia mendapat julukan “Manusia Besi”. Dalam filamnya The Iron Lady di ceritakan ia sosok pemimpin yang disegani oleh rakyatnya, selain menjadi pemimpin ia juga pernah menaklukkan beberapa wilayah. Berangkat dari kisah Margaret Teatcher bahwa perempuan bukanlah sosok yang lemah, perempuan juga bisa muncul di ranah publik. Perempuan diidentikkan dengan sifat emosional, lemah lembut, tidak mandiri pasif, ataupun secara garis besar dapat dikatakan dibidang sebagai lawan dari identitas laki-laki yang rasional, agresif, dan mandiri, streotip ini sangat berpengaruh pada cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Namun dari karakternya Margaret Teatcher menggambarkan semua masyarakat tunduk sama perintahnya.¹⁵ Dalam filmnya Margareth Teatcher juga memperlihatkan bagaimana pendapat perempuan sering di pandang sebelah mata. Perempuan selalu dianggap memiliki pengetahuan yang kurang dari laki-laki sehingga perempuan dianggap kurang mampu menyampaikan pemikirannya, perempuan tersebut cenderung dianggap aneh dan di remehkan.

Tidak dapat di pungkiri lagi pada umumnya jika wanita dihadapkan oleh pilihan menjadi perempuan karir, maka secara umum perempuan akan dituntut lebih kuat di banding perempuan lainnya, karena secara ekonomis selain memegang peran sebagai seorang istri

¹⁵ Ni Made Amelika Gitamaharani Arya, Dkk, Representasi Politisi Perempuan Dalam Film The Iron Lady, (Jurnal Amalika).H. 5.



perempuan juga dihadapkan pada karir yang dipilihnya. Peran sebagai politis perempuan tidak menutup kemungkinan perempuan juga harus mendapatkan izin dari seorang suaminya. Sebagai politis dan istri perempuan harus mampu bersikap profesional baik dalam lingkungan kerja maupun rumah tangga. Fenomena yang ada di Indonesia saat ini bahwa partisipasi perempuan sangat di butuhkan lebih banyak di dunia politik, mengingat kebijakan-kebijakan mengenai perempuan, pelecehan, perlindungan anak, melahirkan dan tentunya hal-hal yang menyangkut perempuan harusnya di ambil alih juga oleh perempuan, sebab perempuan lebih mengentahui permasalahan yang pada dirinya sendiri.¹⁶

Berbicara mengenai isu gender yang terjadi diakibatkan oleh adanya perbedaan peran, sifat biologis, hak dan posisi serta kuatnya nilai sosial budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda atau ketidak setaraan. Di Indonesia perempuan saat ini telah ikut andil untuk mewarnai proses demokrasi, gerakan yang mereka suarkan terdiri dari beragam organisasi dan kelompok ikut serta merayakan pesta demokrasi. Kesetaraan gender di Indonesia tidak terlepas dari kultur dan sistem politik yang telah berubah dan hasilnya memunculkan perempuan-perempuan hebat, tokoh-tokoh perempuan yang tentunya mempunyai kiprah di ranah politik terus bertambah hal ini berawal dari ketika DPR mengeluarkan undang-undang baru yang mengharuskan seperempat dari perempuan harus mengisi kepengurusan pada partai, dilihat dari kepemimpinan Margareth

¹⁶“Perempuan Di Politik Antara Karir Dan Rumah Tangga.”



Thatcher bahwa perempuan di Indonesia sudah bisa mendudukkan dirinya di ranah politik.¹⁷

2. Konsep Kesetaraan dalam Pandangan Islam

Membahas definisi gender, berbagai pandangan mengenai hal tersebut namun secara umum gender pada umumnya ialah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender ialah suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, serta kedudukannya di sosial juga yang membedakan hal tersebut perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan ialah tiada lain melainkan mengenai biologis dan kodrat.

Definisi “Gender” ditinjau secara bahasa merupakan asal kata dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”. Terkait definisi gender dalam Islam penulis belum menemukan apa dari arti kata gender dalam Islam secara spesifikasi, namun terkait hal tersebut penulis akan memaparkan gender dalam Islam. Islam mengartikan gender sebagai bentuk keadilan dalam semua aspek kehidupan, namun demikian hal tersebut masih kontroversi sampai saat ini di kalangan Islam.

Ditinjau dari segi sejarahnya pada peradaban Yunani dan Romawi, selain itu timbulnya dua agama besar yaitu Yahudi dan Nasrani. Pada zaman Yunani perempuan di simpan dalam alam bawah tanah, dan di perjual belikan untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki, sehingga pada zaman Yunani pelacuran, dan hubungan seks bebas tidak di anggap

¹⁷Wahyudi, “Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender,” 2018, 69.



sesuatu yang melanggar kesopanan, selanjutnya dalam hal rumah tangga sepenuhnya di bawah genggaman suami, hak sipil kaum perempuan sama sekali tidak di akui, misalnya dalam urusan ahli waris perempuan tidak akan mendapatkan ahli warisnya.

Selanjutnya pada zaman Romawi hak perempuan jatuh kepada ayahnya, sampai pada ketika perempuan sudah menikah maka haknya jatuh kepada suaminya, namun bukan sampai disini hak perempuan masih di anggap tdak berarti apa-apa karena pada saat perempuan sudah menikah, laki-laki yang menjadi suami tidak sepenuhnya atas dasar kasih sayang bahkan bukan lagi mengani pengayoman¹⁸ melainkan kekuasaan atas diri perempuan. Pada dua peradaban ini eksistensi kaum perempuan selalu dalam dunia kecaman yang berkepanjangan. Selanjutnya pada saat agama Yahudi mengemukakan bahwa harkat martabat perempuan hanya sebagai pembantu, ada sebagian orang berpendapat pada zaman ini bahwa seorang ayah berhak menjual anaknya pada saat sebelum baligh, ajaran mereka berpendapat bahwa anak perempuan adalah sumber laknat karena salah satu sumsi dari mereka bahwa Adam di dikeluarkan dari surga karena perempuan yaitu Hawa. Sedangkan ajaran Nasrani berpendapat bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan laki-laki, dan bahwa perempuan tetap akan di anggap di bawah umur maksudnya tidak memiliki ruang publik.

Puncak dari dunia gelap perempuan adalah ketika Islam datang membawa cahaya penerang bagi perempuan, ajaran Islam merupakan rahmat bagi mereka, islam mengajarkan persamaan antara manusia,

¹⁸Siri, "Gender Dalam Perspektif Islam," 2.



baik laki-laki maupun perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang hanya dilihat dari tinggi rendahnya ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.¹⁹

Salah satu misi Islam ialah pembebasan manusia dari berbagai bentuk anarkhi dan ketidakadilan. Pada saat ini kesetaraan gender sudah mulai di rasakan, Islam menempatkan perempuan dan laki-laki di posisi yang sejajar Islam datang merubah budaya dan tradisi patriarkhi umat Muslim dengan cara revolusioner.²⁰ Dalam hal ini pandangan Islam mempunyai peran penting dalam mewujudkan adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender bukan hanya di alami oleh perempuan saja namun laki-laki pun juga mengalami hal demikian, akan tetapi banyak nya kasus yang menunjukan masalah mengenai perempuan seperti subordinasi, streotip, marginalisasi, hingga pada dampak kekerasan.

Salah satu cara Indonesia untuk memperdayakan perempuan ialah melalui peningkatan peran organisasi perempuan dengan cara melakukan pendampingan dan perjuangan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini diyakini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.²¹ Semakin terbukanya akses politik maka semakin besar pula peluang perempuan berkompetesi dengan laki-laki, oleh karena itu pemerintah memberikan kuota kepada perempuan hanya 30% saja.

¹⁹Siri, 4.

²⁰Wahyudi, "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender," 2018, 67.

²¹Wahyudi, 67.



Dengan begitu bukti-bukti mengenai gender sudah tidak menjadi permasalahan lagi di Indonesia.²²

3. Analisis Sosial Cosntruction Terhadap Perempuan Karir

Perempuan karir merupakan perempuan yang bekerja pada ranah profesi-profesi tertentu seperti pada bidang usaha, perkantoran, dan lain sebagainya yang berlandaskan pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan sebuah kemajuan dan jenjang karir yang lebih baik.²³ Di era sekarang bukan hanya laki-laki saja yang berkerja pada ranah publik namun perempuan juga memiliki eskistensi dalam ranah publik, hal ini dapat membuktikan pendapat seseorang yang memandang perempuan sebelah mata hanya di domestik saja.

Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola prilaku manusia kesaharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran, dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak di sekitar kita secara umum masih memperlihatkan secara jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Sebut saja budaya Patriarki, dalam kebudayaan ini memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja, dan menentukan apa saja, di dasari atau tidak semua itu mendapatkan kebenaran. Sebaliknya kaum perempuan dalam budaya patriarki ini berada dalam posisi subordinat. Ia hanya makhluk yang di anggap menggantukkan nasibnya kepada laki-laki.²⁴

²²Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," 157.

²³ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Perempuan Karir*, (Universitas Brawijaya Press 2017).H.93

²⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 21.



Pada era saat ini, beberapa dari perempuan sudah menunjukkan potensi dan kecerdasannya dalam menghadapi kondisi sosial, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan membuka ruang pada setiap masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan peran aktif memajukan peradaban manusia para perempuan sudah berani menerobos segala bentuk tirani patriarki yang sudah berdiri kokoh dalam pikiran masyarakat, sebagian dari mereka ada yang menjadi kokoh besar, ada yang menjadi pengamat dan aktivis pembela perempuan dan bahkan ada yang menjadi penegak hukum. Namun tidak sampai pada perempuan-perempuan itu saja, perempuan modern harus memiliki potensi lebih berkarya serta harus memiliki pengaruh besar di dalam masyarakat, sehingga narasi penindasan dan pengkialiam atas posisi serta status dalam masyarakat dapat benar-benar di hilangkan dari setiap diri masyarakat kita, sekarang dan seterusnya.

Namun keadaan perempuan belakangan ini mulai memperlihatkan perubahan, termasuk keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik, tetapi menjadi persoalan bahwa seringkali aktivitas kaum perempuan di bidang politik menjadi beban yang berat karena mereka tetap dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya di ranah privat yaitu menjalani kodrat sebagai perempuan yaitu mengurus rumah tangga.²⁵

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif pada bidang politik sejak di kelurkannya undang-undang dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan adanya partisipasi dan

²⁵Wahyudi, "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender," 2018, 68.



keterwakilan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan public telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi lembaga pemerintahan masih rendah, hal ini masih sangat di sayangkan karena terjadinya kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal.²⁶

Dari Margareth Thatcher menunjukan bahwa perempuan bergerak pada ranah public tidak lain hanyalah ingin mensejahterakan keluarga, juga mengaktualisasikan diri pada kehidupan sosial masyarakat. Perempuan berada di ranah public atau lain sebagainya untuk mengaktualisasikan kemampuan yang ada dalam dirinya, dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki di bedakan hanya pada jenis kelamin saja dan ketakwaan nya kepada Allah, selebih dari itu perempuan dan laki-laki sama di hadapan Allah, hal ini di jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Nur ayat 31.²⁷

Kesimpulan

Fenomena mengenai perempuan sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan antri patriarki atau kata lain kelompok yang tidak menyetujui perempuan muncul di ranah public. Margareth Thatcher adalah sosok perempuan yang membuktikan bahwa perempuan bukan hanya di peruntutkan pada bidang domestik saja, namun perempuan juga bisa muncul pada bidang public, selama ia memimpin Inggris selama kurang lebih 12 tahun atau 3 periode ia banyak menghasilkan keberhasilan yang

²⁶“Perempuan-Di-Ranah-Politik.Pdf,” 1.

²⁷Intihaulkhiyaroh, “Di Balik Multinya Peran Perempuan Di Ruang Publik Dan Domestik.”



tidak pernah di duga, seperti pada saat ia merebut kembali kepulauan Argentina. Sosok kepemimpinan yang bersiteguh pada pendapatnya merupakan pelajaran yang dapat di aktulisasikan kepada pemimpin-pemimpin Negara saat ini.

Margareth Thatcher adalah sosok perempuan dari amerika yang sangat menginspirasi kaum perempuan, ia adalah sosok perempuan yang memeperjuangkan hak-hak perempuan bahkan ia mendapat julukan “Manusia Besi”. Seperti yang di ketahui pada umumnya perempuan di kenal sebagai makhluk yang lemah lembut, yang harus di jaga oleh laki-laki, namun dengan keberadaan Margareth Thatcher menunjukan bahwa perempuan juga bisa melakukan apa yang di lakukan oleh laki-laki terkecuali mengenai Qodratnya yang telah di berikan oleh Allah.

References

- Adi Prastowo, Metode Penelitian Dalam Persektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, Cetakan III 2016).
- Agus Salim, Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta;Tiara Wacana Yogya, 2021) Ahlan Al-Gouts. Perempuan Terlupakan. Malang: Madza Media, 2022.
- Gusmansyah, Wery. “Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia.” Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak 1, no. 1 (June 1, 2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233>.
- Husein Muhammad, Muhammad. Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender. Lkis Pelangi Aksara, 2001.
- intihaulkhiyaroh. “Di Balik Multinya Peran Perempuan Di Ruang Publik Dan Domestik.” IAI TABAH (blog), September 3, 2022. <https://iai-tabah.ac.id/di-balik-multinya-peran-perempuan-di-ruang-publik-dan-domestik/>.
- <https://www.umm.ac.id/id/international/margaret-thatcher-tipe-pemimpin-yang-didambakan-di-indonesia.html>. “Margaret Thatcher, Tipe Pemimpin Yang Didambakan Di Indonesia - Internasional | Universitas Muhammadiyah Malang.” Accessed November 1, 2022.



- <https://www.umm.ac.id/id/international/margaret-thatcher-tipe-pemimpin-yang-didambakan-di-indonesia.html>.
- “Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam / Mansour Fakih ... [et al.] ; Penyunting, Tim Risalah Gusti | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed November 25, 2022.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=30633>.
- Nelli, Jumni. “Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Studi Terhadap Anggota Legislatif Di Provinsi Riau).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 14, no. 2 (December 1, 2015): 254–76.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629>.
- Nur Afif, Asep Ubaidillah, Muhammad Sulhan. “Konsep Kesetaraan Gender Persepektif Fatimma Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam” Volume 3 No. 02 (n.d.): 230.
- “(PDF) Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan | Journal of Islamic Law (JIL)
- Mata Banua Online. “Perempuan di Politik Antara Karir dan Rumah Tangga,” June 26, 2022. <https://matabanua.co.id/2022/06/26/perempuan-di-politik-antara-karir-dan-rumah-tangga/>.
- “Perempuan-Di-Ranah-Politik.Pdf.” Accessed November 25, 2022.
<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Perempuan-di-Ranah-Politik.pdf>.
- merdeka.com. “Profil - Margaret Thatcher.” Accessed November 1, 2022.
<https://m.merdeka.com/margaret-thatcher/profil/>.
- Siri, Hasnani. “Gender Dalam Perspektif Islam” 07, no. 2 (2014): 20.
- “Syu’bah Asa, Perempuan Di Dalam Dan DiLuar Fiqih, (Surabaya; Risalah Gusti;1996) Wahyudi, Very. “Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83.
<https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.
- . “Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83.
<https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.
- Widiantari, Komang Sri. “Makna Karir Bagi Perempuan Dalam Partai Politik.” Universitas Gadjah Mada, 2015.
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/92165.



AKAR TEOLOGI-POLITIK GERAKAN RADIKALISME ISLAM DAN TERORISME DI INDONESIA

IBI SATIBI

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ibi.satibi@uin-suka.ac.id.

Abstract

The issue of Islamic radicalism and terrorism in Indonesia in the last three decades has become a very serious problem. Not only in Indonesia, the phenomenon of terrorism in the Islamic world appears as an expression of the political movement of some Muslims who make use of Islamic doctrines, political attitudes and political movements that tend to be radical and extremist. By utilizing qualitative research procedures and data collection techniques through library research, this article draws several conclusions. First, international radicalism network named Al-Qaeda and Al-Jama'ah Al-Islamiyyah have influence over terrorist network in Indonesia and other Islamic worlds. The actors are alumni of the Afghan war and a network that been fostered since the 1970s through Al-Jamaah Al-Islamiyyah. Second, contemporary Islamic radicalism and terrorism movements in Indonesia have ideological-political connections with transnational Islamic movements and ISIS in two orientations namely the khilafah and the Islamic daulah. Third, in the socio-political area, a literalist understanding of the texts to fundamentalism. Finally, Islam often becomes a political commodity. Islamic doctrine often become tools to gain power of conversely also become tools to fight against power. This article recommends that the Indonesian government support moderate Islamic movements as counter-radicalism and terrorism measure.

Kata Kunci: Teologi-Politik, Radikalisme Islam, Terorisme, Al-Qaeda dan Al-Jamaah Al-Islamiyyah.

Pendahuluan

Salah satu kajian yang menarik memasuki abad ke-21 adalah tentang aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Tuduhan radikalisme dan terorisme yang dialamatkan kepada Islam, bagi sebagian kalangan sesungguhnya muncul sebagai



akibat dari perilaku sebagian umat Islam. Di samping itu, kesalahpahaman mereka sendiri yang cenderung literalistik dalam memahami teks-teks keagamaan (Alqur'an dan Hadis) telah menambah faktor menguatnya isu radikalisme dan terorisme.¹

Sikap dan ekspresi keagamaan mereka juga cenderung eksklusif dan seringkali menjustifikasi pemahaman keagamaan mereka yang paling benar. Anasir- anasir inilah yang sudah menebar, tidak cuma pertarungan antar pandangan hidup keimanan namun pula membuka dengan cara luas wacana radikalisme serta terorisme di belahan dunia. Terutama dalam konteks global, pasca tumbangnya WTC di USA pada tahun 2001, terorisme yang mendapat dukungan dari gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama kerap menjadi objek dari tuduhan pelaku pengeboman. Tentu saja, fenomena tersebut di satu sisi semakin memperkuat kecurigaan Barat terhadap dunia Islam,² dan di sisi lain dapat dibantah banyak kalangan terutama internal Islam sendiri yang mengatakan bahwa aksi teroris itu tidak mewakili umat Islam.³

Aksi teror di Indonesia sejak tahun 1980-an hingga 2022 tercatat 53 peristiwa. Aksi teror pertama dilakukan oleh kelompok Komando Jihad pada 28 Maret 1981 yang membajak pesawat DC-9 Woyla. Aksi teror ini menewaskan 1 kru pesawat, 1 komando dan 3 teroris. Menurut laporan Kompas (28/04/2022),⁴

¹ Azyumardi Azra, "Fenomena Fundamentalisme Dalam Islam Dalam Ulumul Qur'an Nomor 3," Vol. IV. Jakarta, 1993. Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (Univ of California Press, 2002). Rizal Sukma, "Indonesia's Islam and September 11: Reactions and Prospects," *The New Terrorism: Anatomy, Trends, and Counterstrategies*. London: Times Media Private Ltd, 2002. Kajian-kajian yang pernah dilakukan Azyumardi Azra, Bassam Tibi dan Rizal Sukma mengenai fundamentalisme Islam menarik disimak untuk menjelaskan fenomena radikalisme dan terorisme yang melanda dunia Islam.

² Samuel Huntington, "The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order" (London: Touchstone, 1998).

³ Wendy Dackson, "September 11: Religious Perspectives on the Causes and Consequences" (JSTOR, 2003).

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia>, diakses pada 3 Januari 2023.



beberapa kasus terorisme di Indonesia yang mendapat perhatian dunia setidaknya tertuju pada 7 peristiwa. Pertama, Bom Gereja serentak di malam Natal.

Pada malam Natal tahun 2000, terjadi serangkaian ledakan bom di gereja-gereja di 13 kota Indonesia, termasuk Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan beberapa lainnya. Serangan yang terjadi secara serentak ini menyebabkan 16 orang meninggal dan 96 terluka. Kedua, Bom Bali I. Tiga bom meledak di Bali pada 12 Oktober 2002. Ledakan ini menewaskan 202 orang yang sebagian warga negara asing dan ratusan orang luka. Ledakan pertama terjadi di depan Diskotek Sari Club, Jalan Legian, Kuta. Tidak lama setelah itu, terjadi ledakan kedua di Diskotek Paddy's yang terletak di seberang Sari Club. Kemudian, ledakan ketiga terjadi sekitar 100 meter dari Konsulat Amerika Serikat di wilayah Renon, Denpasar.

Di samping menelan korban jiwa, ledakan bom tersebut juga menyebabkan kerusakan pada bangunan di sekitar tempat kejadian. *Ketiga*, Bom JW Marriot. Bom berdaya ledak mirip dengan ledakan bom Bali meledak di Hotel JW Marriot di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 5 Agustus 2003. Ledakan tersebut menewaskan 14 orang dan membuat 156 orang luka-luka. Ledakan ini merupakan yang kelima selama 2003. *Keempat*, Bom Bali II.

Bom kembali meledak di Bali pada 1 Oktober 2005. Tiga ledakan bom terjadi di R.AJA's Bar and Restaurant, Kuta, serta Menega Cafe dan Nyoman Cafe, Jimbaran. Dalam aksi teror ini, 23 orang tewas termasuk pelaku dan ratusan luka-luka. Ledakan ini juga merusak bangunan-bangunan di sekitar lokasi. *Kelima*, Bom JW Marriot dan Ritz Carlton. Pada pagi tanggal 17 Juli 2009, terjadi serangkaian ledakan bom di dua hotel bintang lima yang terkait dengan jaringan hotel Amerika, yaitu JW Marriot dan Ritz Carlton, yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Jumlah korban yang tewas dalam dua peristiwa tersebut adalah



sembilan orang, dengan enam di antaranya adalah warga negara asing, dan terdapat 53 orang yang mengalami luka-luka. Dari jumlah korban tewas, dua di antaranya adalah pelaku bom bunuh diri. *Keenam*, Bom dan Baku Tempat Thamrin. Aksi teror bom disusul baku tembak antara teroris dan polisi terjadi di depan gedung Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016. Dalam aksi teror tersebut, delapan orang tewas dan 26 orang lainnya luka-luka.

Ledakan bom pertama terjadi di sebuah kedai kopi ternama di kawasan tersebut. Tak berselang lama, terdengar ledakan kedua dari pos polisi tak jauh dari lokasi pertama. Setelah itu, terjadi baku tembak antara dua pelaku dan polisi. Para pelaku bahkan melakukan pelemparan granat yang mereka buat sendiri ke arah petugas kepolisian. Kejadian ini berakhir setelah dua pelaku meninggal akibat ledakan bom yang mereka bawa serta tindakan tembakan dari pihak kepolisian. Dan *ketujuh*, Teror Kelompok Separatis Teroris Papua. Kelompok separatis teroris (KST) di Papua terus melancarkan serangkaian aksi teror hingga saat ini. Salah satu insiden yang mencuri perhatian adalah pertempuran antara prajurit TNI dan KST di distrik Kiwirok pada tanggal 13 September 2021.

Tindakan teror ini seperti pertunjukan yang kasar dan terorganisir dengan buruk dari sebuah proyek global yang merendahkan martabat kemanusiaan. Tidak jarang para pelaku teror tersebut melakukan semua itu untuk memenuhi tuntutan teologi yang mereka pahami. Terutama enam kasus teror pertama, Islam seakan mengajarkan kepada para pengikutnya yang setia dan fanatik untuk melakukan tindakan-tindakan teror itu sebagai wujud dari keimanan. Doktrin teologi mereka bahkan memperjuangkan keyakinan bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam membela agama mereka.⁵

⁵ Machasin, "Fundamentalisme dan Terorisme", dalam A Maftuh Abegebriel dan A Yani Abeveiro, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia* (SR-Ins Pub., 2004), hlm. 791. Omid Safi, *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism* (Simon and Schuster, 2003).



Dalam perkembangannya, kasus-kasus teror di atas di tanah air telah membentuk sebuah opini bahwa Islam—tepatnya umat Islam fundamentalis—telah menjadi “terdakwa” atas berbagai peristiwa radikalisme dan terorisme tersebut. Tuduhan semacam ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi umat Islam. Sejak masa-masa awal ketika hegemoni peradaban Barat semakin menggurita di berbagai belahan dunia Islam, muncul kelompok-kelompok umat Islam yang berupaya melakukan perlawanan secara ideologis terhadap Barat dan tidak jarang dengan cara-cara yang dapat memancing kekerasan. Demikian juga dengan gagasan jihad, sering kali terkait dan bahkan digunakan sebagai pembenaran dalam berbagai kasus yang berujung pada tindakan terorisme.

Artikel ini berusaha menginvestigasi penyebaran gerakan terorisme yang terpengaruh oleh gerakan teologi-politik dan ekstremis agama. Meski tidak mudah menguraikan penjelasan mengenai tema ini, penulis berupaya memotret secara kasuistik di Indonesia dan menghubungkannya dengan gerakan global terorism yang diperankan Al-Jama’ah Al-Islamiyah dan Al-Qaeda, dua organisasi ekstrim yang mengatasnamakan Islam dan sering bertanggung jawab dalam berbagai aksi teror di berbagai belahan dunia, terutama Barat dan Timur Tengah. Perlu diingat bahwa fenomena radikalisme Islam di Indonesia bukanlah hal baru, karena gerakan ini memiliki ikatan historis dengan umat Muslim di negara ini dan mendapat pengaruh dari gerakan fundamentalisme Islam dan terorisme global. Oleh karena itu, isu terorisme terkait dengan fundamentalisme Islam dan bahkan radikalisme Islam tidak dapat dipisahkan.

Studi tentang radikalisme Islam dan terorisme telah banyak dilakukan kalangan sarjana ilmu sosial dan politik. Beberapa peneliti terdahulu yang memiliki



perhatian terhadap tema ini, antara lain: Noorhaidi Hasan,⁶ Akh. Muzakki,⁷ Ramlani Lina Sinaulan,⁸ Susilo Wibisono dkk.,⁹ dan Iffatin Nur dkk.¹⁰ Noorhaidi Hasan mensinyalir bahwa gerakan radikalisme di Indonesia mengalami penguatan karena dipengaruhi iklim politik yang terbuka setelah kejatuhan rezim Soeharto. Seiring dengan kondisi politik itu, situasi sosial keagamaan di Indonesia seringkali dihadapkan pada konflik-konflik yang berbasis pada intoleransi keagamaan. Gerakan radikalisme Islam menurutnya menjadi arena politik untuk memperjuangkan pendirian negara Islam atau pemerintahan khilafah. Mereka termasuk kelompok-kelompok militant Islam, seperti Laskar Jihad, Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir dan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah.

Senada dengan Noorhaidi Hasan, Melalui artikelnya yang berjudul "The Roots, Strategies, And Popular Perception of Islamic Radicalism In Indonesia", Akh. Muzakki melakukan studi tentang radikalisme di Indonesia dari sudut akar dan strategi aksinya. Dengan menempatkan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah sebagai objek kajiannya, ia menuturkan bahwa sumber daya ideologi-politik yang dimobilisir JI menggunakan Jaringan Media Ar-rahmah dan Majalah Jihad. Gerakan dan aksi mereka menemukan konsolidasinya dalam empat dukungan, yaitu represi politik rezim yang berkuasa, perampasan sosio-ekonomi yang krusial, globalisasi dan dukungan kawasan Arab. Berbeda dengan Muzakki, Ramlani Lina dalam risetnya bertitel "Islamic Law and Terrorism in Indonesia" mengungkapkan bahwa jihad

⁶ Noorhaidi Hasan, "Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2008): 23–51.

⁷ Akh Muzakki, "The Roots, Strategies, and Popular Perception of Islamic Radicalism in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 8, no. 1 (2014): 1–22.

⁸ Ramlani Lina Sinaulan, "Islamic Law and Terrorism in Indonesia," *International Journal of Nusantara Islam* 4, no. 1 (2016): 13–28.

⁹ Susilo Wibisono, Winnifred R Louis, and Jolanda Jetten, "A Multidimensional Analysis of Religious Extremism," *Frontiers in Psychology* 10 (2019): 2560.

¹⁰ Iffatin Nur et al., "Embracing Radicalism and Extremism in Indonesia with the Beauty of Islam," *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences* 10, no. 2 (2020): 1–18.



dan terorisme tidaklah sama. Menurutnya, konsepsi jihad dalam perspektif hukum Islam dipandang multi spektrum dalam memahaminya. Namun demikian, gerakan terorisme di Indonesia dan belahan dunia Arab memiliki kesamaan pandangan tentang jihad dan teror. Menurutnya, pemahaman keagamaan inilah yang memberikan sumbangan pada akar ideologi-politik gerakan terorisme ini.

Berbeda dengan para peneliti sebelumnya, Susilo Wibisono dkk., menawarkan perspektif psikologi tentang ekstremisme agama. Menurutnya, ekstremisme agama dapat dianalisis pada empat dimensi yaitu teologi, ritual, sosial dan politik. Dalam beberapa hal, ekspresi kelompok ekstremisme agama dalam bidang ritual dianggap moderat, namun dalam bidang sosial politik ekstrem atau sebaliknya. Ekspresi ini berbanding terbalik dengan Gerakan radikalisme agama yang melampaui fokus pada kekerasan. Penelitian Iffatin Nur dkk. mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi turut memberikan kontribusi terhadap konsolidasi gerakan radikalisme dan ekstrimisme dalam beragama. Realitas perjuangan kelompok ini direspon oleh kelompok-kelompok Islam moderat. Perjumpaan atas perjuangan kedua gerakan keislaman ini pada level dunia global dipotret sebagai bentuk “keindahan Islam”. Artikel ini mengonfirmasi urgensi pengarusutamaan gerakan Islam moderat dalam membendung arus gerakan radikalisme dan ekstremisme dalam beragama.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan prosedur dan cara kerja penelitian kualitatif. Data-data terkait dengan fenomena terorisme di Indonesia diperoleh melalui studi kepustakaan dan laporan-laporan lembaga kompeten dalam bidang gerakan terorisme dan fundamentalisme Islam. Studi ini juga memanfaatkan pendekatan sejarah dalam mengungkap akar-akar radikalisme



Islam terorisme di Indonesia dan dunia Islam lainnya.¹¹ Pendekatan ini memberikan sumbangan keilmuan, terutama penelusuran aspek-aspek ideologis dan politis perkembangan radikalisme Islam dan terorisme di Indonesia.¹² Bahkan, Indonesia kontemporer sekalipun masih sering dihadapkan kasus-kasus bom bunuh diri dan bentuk-bentuk teror lainnya yang dialamatkan kepada para aparatus negara dan pemerintahan.

Fundamentalisme Islam dan Terorisme: Antara *Image* dan Realitas

DALAM dua dasawarsa ini, istilah fundamentalisme, radikalisme dan terorisme sangat lekat dengan dunia Islam. Fenomena ini di satu sisi memberikan dampak negatif dengan posisi yang tersudutkan dan mengganggu Islam dan pemeluknya, di sisi lain istilah ini juga berlaku bagi bentuk-bentuk kejahatan yang pada dasarnya merugikan terhadap kelangsungan sejarah peradaban manusia secara universal. Dalam konteks ini, pendekatan dan metodologi dalam studi keislaman menjadi penyebab utama munculnya berbagai aksi teror. Fenomena ini memang sering terjadi dalam lintasan sejarah umat Islam. Ketika ada perbedaan pendapat, terkadang tindakan teror dianggap sebagai cara untuk "menyelesaikannya". Konsep-konsep yang muncul dalam studi Islam seringkali memicu perdebatan yang akhirnya membesar dan menjadi sumber konflik yang berkelanjutan.

Isu-isu klasik seperti; jihad, qisash, syari'at, khilafah, dan daulah, sering menjadi penyebab munculnya konflik di tengah-tengah umat, apalagi, jika konsep-konsep tersebut dijadikan sebagai agenda perjuangan politik. Hubungan antara

¹¹ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah Kuntowijoyo, "Edisi Baru, Cet 1," Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

¹² Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, "Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia" (Yogyakarta: Galang Press, 2002).



tuduhan teroris terhadap sebagian umat Islam seringkali dikaitkan dengan meningkatnya gerakan radikalisme di beberapa komunitas Muslim.

Padahal, kemunculan fundamentalisme Islam tidak saja dipengaruhi faktor internal umat Islam, tetapi juga muncul dipengaruhi oleh geopolitik global. Banyak kalangan yang mensinyalir bahwa kalangan fundamentalisme Islam kontemporer sesungguhnya hanya melanjutkan dan mengikuti aspirasi gerakan yang diusulkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya merupakan suatu hal yang umum dilakukan. Di sisi lain, para pengamat yang mencermati faktor eksternal dalam fenomena fundamentalisme Islam sering kali mengaitkan akar penyebabnya dengan pandangan atau pendapat tertentu yang mengatakan bahwa kemunculannya ditengarai sebagai bentuk *counter-part* terhadap pemikiran liberal dan Dunia Barat modern.¹³ Chris Wilson mempunyai keyakinan yang kuat bahwa radikalisme dan terorisme di Indonesia saling terkait secara erat dengan jaringan terorisme internasional.¹⁴

Di samping organisasi-organisasi transnasional Islam tersebut, terdapat dua organisasi lain, yaitu al-Qaeda dan al-Jama'ah al-Islamiyyah, yang seringkali terlibat dalam isu-isu radikalisme dan terorisme yang bersifat transnasional. Bahkan, secara struktural, mereka memiliki pos-pos kunci yang mendukung upaya mereka, serta memiliki buku pedoman yang berfungsi sebagai panduan dalam perjuangan mereka.

Kajian historis Murba Abu¹⁵ menyebut sepuluh faktor yang memengaruhi perkembangan gerakan radikalisme di Indonesia. Untuk keperluan artikel ini, penulis meringkasnya menjadi lima faktor. *Pertama*, akibat kekecewaan politik

¹³ Ricard T Antoun, "Memahami Fundamentalisme," Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

¹⁴ Chris Wilson, *Indonesia and Transnational Terrorism* (Department of the Parliamentary Library, 2001).

¹⁵ Murba Abu, "Memahami Terorisme Di Indonesia," dalam A. Maftuh & A. Yani, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004).



pada persoalan “Piagam Jakarta” yang tidak berhasil dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kartosuwiryo, Tokoh Masyumi yang ekstremis mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan mengumumkan proklamasi Negara Islam Indonesia (NII), Agustus 1948. Gejala ini semakin melebar di Aceh yang dipimpin Daud Beureuh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi. Gerakan radikalisme ini dapat ditelusuri hingga ke momen pembentukan DI/TII yang menjadi titik awal dari perjuangan untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia. Selain itu, dampak dari perilaku dan tekanan politik dari rezim Orde Baru juga berperan penting.

Partisipasi politik umat Islam pada era ini dianggap tidak menguntungkan pemerintah dan sebagai akibatnya aparatus negara menutup kran-kran politik umat Islam.¹⁶ Kelompok ini ditekan oleh pemerintah dikarenakan memiliki agenda mengubah asas Pancasila dan mendirikan Negara Islam. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir yang pernah henggang dari tanah air dan hidup di negeri Jiran ditengarai sebagai korban politik Orde Baru. Meski sulit dibuktikan, keduanya melakukan konsolidasi sumber daya dan memobilisasi melalui jaringannya untuk mendapat kesempatan latihan militer di Peshawar Pakistan.

Ketiga, kelompok yang terinspirasi dari Gerakan Revolusi Iran pada tahun 1979 dan gerakan Islam Timur Tengah. Selain inspirasi revolusi yang dipelopori Khomeini di Iran, kelompok ini juga mendapat inspirasi model al-Ikhwan al-Muslimun yang dibentuk Hasan al-Banna di Mesir. Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, kelompok ini melakukan metamorfosis yang variatif, dari partai politik, organisasi sosial keagamaan, hingga gerakan dakwah kampus. Semangat yang diungkapkan oleh kelompok ini berasal dari keputusan umat Islam yang sebagian besar disebabkan oleh sistem politik sekuler yang berasal dari Barat.

¹⁶ Irfan Suharyadi Awwas (Peny.), *Risalah Kongres Mujahidin Dan Penegakkan Syariah Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001).



Sebagai *counter*-nya, mereka mengembangkan kebangkitan Islam yang berbasis pada formalisme Islam dan menyatunya gerakan Islam dan politik.¹⁷ Sejarah Laskar Jihad, sebagai contoh, pernah terlibat atau melibatkan oleh pihak-pihak terkait dalam konflik di Maluku dan Ambon sebagai respons terhadap isu sentimen agama, yaitu kristenisasi.¹⁸

Keempat, kelompok dari pesantren. Kelompok ini muncul sebagai respon peristiwa bombing di berbagai tempat di Indonesia. Para pelaku peristiwa teror ini merupakan alumni beberapa pesantren yang berhaluan kanan. Dampaknya, nama pesantren tercoreng dan Amerika Serikat serta sekutunya menuduh pesantren di Indonesia terduga sebagai sarang teroris. Anggapan global ini sangat sulit diterima, mengingat sejarah pesantren di Indonesia memiliki akar yang kuat dengan tradisionalisme Islam dan dakwah akulturatif yang dilakukan muslim moderat.¹⁹

Kelima, sebagai bagian dari organisasi transnasional Islam. Organisasi ini mengalami diaspora yang subur, jauh sebelum isu terorisme di Indonesia muncul. Beberapa organisasi transnasional Islam ini banyak berkiprah dalam bidang dakwah, seperti Ahmadiyah di India, Darul Arqom di Malaysia, Hizbu al-Da'watil Islamiyah di Iraq, Jama'at Islami di India dan Pakistan, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir, Jam'iyat al-Da'wah al-Islamiyya di Libya, al-Majlisul A'la Shu'un al-Islamiyyah di Mesir, dan Rabitatul 'Alami Islami di Saudi Arabia.²⁰ Sumber daya yang dimiliki organisasi-organisasi ini terbilang sangat kuat, baik dalam bidang

¹⁷ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan* (Noura Books, 2016).

¹⁸ Greg Fealy, "Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?," *Southeast Asian Affairs* 2004, no. 1 (2004): 104–21.

¹⁹ E S Soepriyadi, *Ngruki Dan Jaringan Terorisme: Melacak Jejak Abu Bakar Ba'asyir Dan Jaringanannya Dari Ngruki Sampai Bom Bali* (Almarwadi Prima, 2003). JEMAAH ISLAMIYAH I N SOUTH EAST ASIA, "DAMAGED BUT STILL DANGEROUS," 2003.

²⁰ Muhammad Khalid Masud, *Travellers in Faith: Studies of the Tablighi Jam'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal*, vol. 69 (Brill, 2000).



jaringan maupun *financial supporting* dalam pentas internasional. Tidak semua organisasi-organisasi transnasional ini memiliki karakter radikal dan menganut terorisme. Banyak kalangan menyebut beberapa di antara organisasi-organisasi ini tergolong fundamentalisme Islam.

Al-Qaeda: Aliansi Politik dan Agama

Al-Qaeda dan Al-Jama'ah Al-Islamiyah merupakan dua nama organisasi yang kerap dikaitkan dengan jaringan terorisme transnasional. Laporan ICG (*International Crisis Group*) pimpinan Sidney Jones menyebut kedua organisasi ini disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terjadinya berbagai tindak teror di berbagai belahan dunia. Kedua organisasi ini juga memiliki jaringan yang sangat luas, termasuk Indonesia. Negara yang memiliki latar historis dengan berbagai peristiwa pemberontakan terhadap pemerintah yang mengatasnamakan “Negara Islam” merupakan lahan yang strategis bagi persemaian Islam garis keras. Namun, Sidney Jones menghadapi kesulitan dalam membuktikan keterhubungan langsung dengan Al-Qaeda dan Al-Jama'ah Al-Islamiyah dalam laporannya.

Dalam konteks Indonesia, jatuhnya rezim Orde Baru dianggap sebagai peluang politik bagi perkembangan gerakan Islam fundamentalis dan radikal. Dengan mengatasnamakan sistem demokrasi, organisasi radikal dengan berbagai jaringan yang dimiliki seakan menemukan rumput yang bergoyang dan dapat diperankan guna mengambil simpati umat Islam Indonesia.

Sidney Jones memberikan indikasi mengenai adanya keterkaitan antara tokoh-tokoh Al-Qaeda dengan Indonesia. *Pertama*, laporan ICG Indonesia Breafing: Al-Qaeda in Southeast Asia, 2002 mengatakan bahwa jaringan terorisme di Indonesia telah dimulai sejak 1970-an. Saat itu, kondisi politik Indonesia di bawah rezim Orde Baru menggunakan politik represif terhadap



politik umat Islam. Pada era inilah, nama Abu Bakar Ba'asyir yang dikenal vokal dalam mengkritik Orde Baru ditangkap pemerintah pada 1978. Ba'asyir memandang bahwa rezim Orde Baru tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam hal pemaksanaan Pancasila sebagai prinsip tunggal bagi organisasi dan partai politik.²¹

Peristiwa penangkapan dirinya memberikan inspirasi kepada banyak koleganya, Abdullah Sungkar, Abu Jibril dan lainnya. Tidak lama setelah dibebaskan dari penjara, Ba'asyir dan para koleganya hijrah ke Malaysia. Di negeri Jiran inilah, Ba'asyir melakukan kontak gerakan dan melakukan pengiriman santri-santrinya ke Pesawar, perbatasan Pakistan-Afghanistan. Tujuan pengiriman ini untuk dilatih militer dan pada saatnya akan dilibatkan untuk pengusiran Uni Soviet yang berhaluan komunias dari Pakistan-Afghanistan. Kepentingan dunia Islam dan Barat menemukan kesamaannya, yaitu penghentian invasi Uni Soviet di Afghanistan. Mengenai respons strategis dari jaringan Ba'asyir ini, Sidney Jones menyimpulkan bahwa pintu masuk untuk memahami jaringan Al-Qaeda di Indonesia harus melalui jalur Ngruki dan Majelis Mujahidin.²² Pengakuan Nasir bin Abbas diserahkan oleh Ahmed Al-Moudi. tas berisi uang yang diserahkan oleh Ahmed Al-Moudi. seorang yang berkebangsaan Malaysia--ketika diwawancarai salah satu TV swasta menarik disimak. Ia mengaku bahwa keberadaannya di Pakistan untuk mengikuti latihan militer. Saat itu, ia diberangkatkan dari Malaysia atas sponsor dari Abdullah Sungkar.

²¹ I C G Asia Briefing, "Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the 'Ngruki Network,'" *Indonesia, Jakarta/Brussels* 8 (2002): 1–22.

²² Briefing.



Kedua, analisis Zachary Abuza dalam NBR Analysis yang menggunakan pendekatan *funding*.²³ Menurutny, pendekatan dapat mengungkap aliran dana dan hubungan yang intens antar kedua organisasi yang berkepentingan. Terdapat dua jaringan yang dimanfaatkan Al-Qaeda untuk mendukung gerakan dan operasi bombing di Asia Tenggara dengan modus yang berbeda. Kasus di Filipina, Al-Qaeda mendukung operasi Abu Sayyaf dan MILF melalui lembaga finansialnya yang bernama IRIC (International Relations and Information Center). Lembaga ini dibangun oleh Jamal Khalifah.

Selain jalur pendanaan, jaringan Al-Qaeda juga memanfaatkan jaringan perkawinan sebagai jalur transformasi finansial. Menurut Zachary Abuza, Syekh Bandar yang juga kepala pusat Al-Haramain Foundation dan berkebangsaan Saudi Arabia seringkali datang ke Surabaya Indonesia untuk bertemu istrinya. Melalui jalur inilah, Syekh Bandar sering minta dikirim tas berisi uang yang diserahkan oleh Ahmed Al-Moudi. Selain Syekh Bandar, Abuza mengatakan bahwa Rashid adalah individu yang bertanggung jawab menjadi supplier dana, amunisi dan Bahan peledak dalam gerakan Ji dikaitkan dengan nama Rashid, yang kemungkinan adalah Umar Faruq, menurut Abuza yang paling dicari sebagai aktor teroris di Asia Tenggara.

Ketiga, adanya kesamaan visi dan misi jaringan teroris dengan Al-Qaeda. Setidaknya terdapat dua kata kunci yang menjadi misi Al-Qaeda, yaitu proyek dehumanisasinya dan penegakkan 'khilafah global'. Kedua agenda ini memiliki hubungan dengan latar historis pendirian organisasi ini yaitu merespon Barat yang sekuler. Respon ini dilakukan setelah kebuntuannya untuk mendapat kongsi dengan Barat, karena keberhasilannya memukul mundur Uni Soviet dari tanah

²³ Zachary Abuza, "Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiya," *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 25, no. 2 (2003): 169–99.



Afghanistan. Secara kasuistik, kekalahan Uni Soviet di mata dunia Islam dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa yang berhasil diraih oleh umat Islam dalam menghapus jenis penjajahan, terlebih berhaluan komunias. Sementara itu, bagi AS dan negara Barat lainnya mengungkapkan kepuasannya dalam memanfaatkan umat Islam yang tergabung dalam dua komunitas, Bait al-Anshar pimpinan Usamah bin Laden dan Maktab al-Khidmat (*Service Centre*) pimpinan Abdullah Azam pada tahun yang sama, 1984.

Namun, disayangkan bahwa respon politik yang bersifat jangka pendek tersebut tidak mempertimbangkan konsekuensi dari percampuran agama dan politik dalam jangka panjang di masa depan. *Pertama*, organisasi-organisasi Islam yang sejatinya melakukan pemberdayaan anggotanya dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka yang lebih baik dimanipulasi atau termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan pihak luar. Sebagai akibatnya, organisasi-organisasi Islam yang memiliki kecenderungan keras tersebut memiliki sejarah yang kelam, yang tidak hanya mengurangi makna penting dari "Jihad" yang sebenarnya tetapi juga terjebak dalam permainan politik global, hanyalah dimanfaatkan sebagai rumput yang bisa digoyang oleh kekuatan besar yang bernama Barat dengan segala sumber daya yang dimilikinya.

Kedua, AS dan pihak Barat pun tak bisa lepas dari jeratan dampak dari pecah kongsi dari konspirasi yang tidak menguntungkan semua pihak. Terutama dalam konteks organisasi yang dipimpin oleh Usamah bin Laden, seperti Al-Qaeda, mereka sebenarnya bertindak balas dengan menyerang AS dan negara-negara Barat. Langkah ini terlihat dilakukan setelah menyadari bahwa organisasi dan jaringan mereka hanya dimanfaatkan semata-mata dari persekutuan rahasia tiga negara, Pakistan, Inggris, dan AS.



Serangkaian peristiwa teror di Amerika Serikat dari tahun 1998 hingga 2000-an, seperti serangan bom di WTC dan Pentagon, menunjukkan keterlibatan Al-Qaeda sebagai pelaku pihak yang bertanggung jawab. Virus perselingkuhan inilah yang dimungkinkan menyebar kepada para alumni perang Afghan, tak terkecuali muslim militan Indonesia yang dikirim ke negara tersebut. Nama-nama pelaku teroris di Tanah air seperti Mukhlas, Amrozi, dan lainnya memiliki koneksi dan telah diberi keterampilan militer yang memadai selama berada di Pakistan. Praktik kebencian terhadap Barat dibawa ke Indonesia dan menyusun tindakan-tindakan yang tidak berkeprimanusiaan. Bombing-bombing dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dengan tanpa ada pertanggungjawaban.

menurut Irfan Noor dapat Dalam perkembangannya, Prestasi dan keberadaan Al-Qaeda menjadi kurang mencolok terutama setelah Amerika Serikat melakukan invasi di Afghanistan pada tahun 2005. Media Barat mempublikasikan organ teroris yang berbahaya ini dengan sebutan Taliban. Organisasi ini merupakan bentuk metamorfosis Al-Qaeda. dengan realitas sosial dan politik yang berkembang.

Di mata Barat, melalui organisasi inilah rekrutmen anggota dan penyelenggaraan pelatihan militer dilakukan.

Islam Transnasional dan ISIS Connection

Islam transnasional disebut sebagai jalur bagi aktor-aktor kontemporer dalam gerakan radikalisme Islam dan terorisme di Indonesia. Ikatan dan interaksi mereka terhubung dengan gerakan global jihad di kawasan Timur Tengah yang melintasi perbatasan negara-bangsa. Intensifikasi hubungan mereka dilakukan secara global melalui teknologi media. Penyebaran nilai-nilai, norma dan gagasan gerakan Islam radikal dan terorisme secara massif dilakukan melalui internet. Dua



ideologi-politik yang diperjuangkan mereka yaitu khilafah dan jihad. Kedua ideologi keagamaan ini berkelindan secara historis dengan Al-Qaeda dan Al-Jama'ah Al-Islamiyah, sebagaimana telah diulas pada pembahasan di atas. Menurut Machasin,²⁴ kedua ideologi-politik ini merupakan ideologi transnasional yang sesungguhnya propaganda solidaritas untuk menjadi umat Islam berdasarkan situasi buruk di Timur Tengah. Latar ideologisnya, mereka menawarkan tatanan dunia Islam baru yang akan membebaskan penderitaan umat Islam dari perlakuan zalim yang disebut dominasi Barat. Untuk mengefektifkan pergerakannya, mereka melakukan pertemuan periodik dunia maya dan bahkan merencanakan peristiwa teror untuk satu titik sasaran. Pusat koneksi globalnya adalah jaringan Islamic State Iraq and Suriah (ISIS). Meskipun diberitakan banyak media ISIS di Timur Tengah mengalami kehancuran, sel-sel jaringan ideologis-politis ini masih menghantui dunia Islam, terutama Maroko, Aljazair, Tunis, Afrika Barat, Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Patrick Cockburn menyebut sepak terjang ISIS sebagai pemberontak beraliran Sunni yang menggelorakan politik "jihad". Namun, bagi Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpin ISIS mengklaim politik perjuangannya "Sebuah negara di mana orang Arab dan non-Arab, orang kulit putih dan orang kulit hitam, yang timur dan barat semuanya bersaudara.... Suriah bukan untuk Suriah, dan Irak bukan untuk Irak. Bumi adalah milik Allah."²⁵ ISIS bentukan Al-Baghdadi ini merupakan metamorphosis Gerakan Al-Qaeda di Irak yang ia pimpin sebelumnya. Dengan dalih optimalisasi pengamanan perang saudara di Suriah, Al-Baghdadi berhasil mengonsolidasikan pasukannya masuk ke Suriah dan menggabungkan Al-Qaeda Suriah dengan Al-Qaeda Irak.

²⁴ M M Machasin, "Transnational Ideologies and Religious Local Wisdom," *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 6, no. 2 (2017): 199–220.

²⁵ Patrick Cockburn, *The Jihadis Return: ISIS and the New Sunni Uprising*, (Saqi, 2015).



Ideologi-politik Al-Qaeda dan ISIS memiliki kesamaan, yakni bertujuan mendirikan daulah Islamiyyah atau penegakkan negara Islam. Tujuan ini dipropagandakan melalui instrument media sosial, seperti twitter, telegram, facebook dan pertemuan dunia maya. Pola propaganda ini mendulang sukses dengan terkoneksinya berbagi jaringan Islam radikal dengan ideologi ISIS ini di seluruh dunia. Termasuk Indonesia yang secara historis memiliki irisan-irisan dengan ideologi seperti Darus Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) seakan membangunkan kembali ideologi lama ini dan memanfaatkan momentum kejatuhan Orde Baru. Reformasi yang ditandai dengan liberalisasi politik menjadi arena baru bagi optimalisasi propaganda perjuangan mendirikan negara Islam. Dampak sistemik gerakan radikal dan teroris ini di Indonesia adalah munculnya berbagai peristiwa teror. Laporan RAND Database of Worldview Terrorism Incident menyebut 308 peristiwa teror yang terjadi di Indonesia sejak reformasi. 86 % atau 265 kasus merupakan peristiwa teror berdasarkan agama.

Pelaku peristiwa teror-teror tersebut mayoritas memiliki koneksi dengan JAT (Jama'ah Anshorut Tauhid) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Meskipun organisasi ini tidak secara langsung berhubungan dengan ISIS, irisan-irisan ideologis-politisnya masih tersambung. Respon mereka terhadap politik ISIS dalam kenyataannya membelah kepemimpinan Abu Bakar Ba'asyir pada JAT, antara kelompok-kelompok yang militan mengikuti Ba'asyir dan berbaiat kepada pimpinan ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi.

Mereka yang berbaiat kepada ISIS akhirnya membentuk organisasi baru yang bernama Jama'ah Anshorud Daulah (JAD) pada 2015 di bawah pimpinan Aman Abdurrahman. *Khilafah Minhajin Nubuawah* ditengarai sebagai basis



teologis-politik yang menyatukannya.²⁶ Dampaknya, kurva peristiwa teror di Indonesia semakin meningkat sejak pendulum organisasi ini bergerak melakukan amaliyah. Amaliyah yang dimaksudkan adalah “jihad” melakukan pemboman. Menurut Riset Alfarisy, aksi JAD telah menimbulkan peristiwa teror di Indonesia sebanyak 45 peristiwa sejak 2015-2019. Modus-modus teror pun cukup beragam, dari penyerangan kantor polisi, bom bunuh diri, bom gereja, teror surat, hingga penusukan pejabat negara.²⁷

Riset Alfarisy juga mengonfirmasi bahwa pendanaan kelompok JAD ini diperoleh melalui donasi dalam negeri. Dengan mengutip laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK, 2019), Alfarisy menyebut bahwa periode 2015-2018 merupakan perodesasi meningkatnya transfer untuk pendanaan gerakan terorisme. Untuk donasi JAD di sebuah kabupaten/kota Bekasi misalnya, transfer dalam satu bulan hingga mencapai Rp. 15.000.000,-. Dana JAD ini diperuntukkan menyantuni istri atau janda atau mujahid yang dipenjara thogut. Sebagian lainnya, dana JAD untuk keperluan halaqah dan ‘idad. Di samping donasi kepada JAD, kelompok Islam garis keras ini juga memberlakukan pendanaan sendiri (self-funding). Jenis pendanaan mandiri ini digunakan untuk membiayai aksi amaliyahnya. Cara mereka melakukan pendanaan mandiri ini berasal dari hasil usaha, gaji/pendapatan dan hasil menjual harta milik para anggota JAD. Bahkan, pelaku Bom Gereja di Surabaya dilaporkan menjual mobilnya dan berjualan obat-obatan herbal untuk melaksanakan amaliyahnya.²⁸

²⁶ Joseph Chinyong Liow, “ISIS Goes to Asia,” *Foreign Affairs* 19 (2014). Kirsten E Schulze and Joseph Chinyong Liow, “Making Jihadis, Waging Jihad: Transnational and Local Dimensions of the ISIS Phenomenon in Indonesia and Malaysia,” *Asian Security* 15, no. 2 (2019): 122–39.

²⁷ Riadhy Muhammad Alfarisy, “Gerakan Transnasional Jihadis Di Indonesia: Studi Kasus Pada Jamaah Ansharut Daulah (Jad) 2015-2019,” *Researchgate.Net*, no. April (2022): 2015–19.

²⁸ Alfarisy.



Islam transnasional dan jejaring ISIS yang mengkhawatirkan ini dalam kasus Indonesia direspon cukup beragam kalangan akademisi. Noorhadi Hasan mensinyalir Islam moderat yang diperankan NU dan Muhammadiyah di Indonesia cukup memadai membendung arus radikalisme dan terorisme ini.²⁹ Meski diakui bahwa ideologi transnasional berbasis pada Islam radikal menemukan kesamaan dan kemiripan ideologinya dengan Wahabi dan dakwah Salafi. Dua karakter Islam ini ditengarai menjadi batu sandungan makin menguat dan mendukung Gerakan radikal dan teror ini. Sebaliknya, Irfan Noor dalam sebuah artikelnya menulis bahwa kehadiran organisasi-organisasi Islam radikal transnasional di Indonesia merefleksikan tendensi.³⁰ Setidaknya ada dua tendensi, yaitu pembentukan komunalisme agama bercorak teokratik di atas realitas masyarakat yang majemuk, membentuk eksperimentasi negara Islam lintas bangsa dan bisa menjadi penyebab perpecahan bangsa dan negara. Upaya menangani kelompok-kelompok radikal ini menurut Irfan Noor dapat memanfaatkan pendekatan hukum dan strategi de-radikalisasi yang sistematis.

Kesimpulan

Fenomena radikalisme Islam dan terorisme di Indonesia tidak dipisahkan dari faktor doktrin Islam, sikap politik dan gerakan politik yang diperjuangkan. Banyak faktor yang memengaruhi ekspresi politik umat Islam ketika berhadapan dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Tidak dapat disangkal bahwa peristiwa-peristiwa teror dan kekerasan lainnya telah menyebabkan banyak korban jiwa, yang pada gilirannya menggarisbawahi bahwa radikalisme Islam dan

²⁹ Noorhadi Hasan, "The Failure of the Wahhabi Campaign: Transnational Islam and the Salafi Madrasa in Post-9/11 Indonesia," *South East Asia Research* 18, no. 4 (2010): 675–705.

³⁰ Irfan Noor, "Islam Transnasional Dan Masa Depan NKRI: Suatu Perspektif Filsafat Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 10, no. 1 (2016): 1–21.



terorisme di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengendalikan mobilitasnya. Jaringan radikalisme internasional yang bernama al-Qaeda dan al-Jama'ah al-Islamiyyah disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas fenomena terorisme di dunia. Keduanya tak bisa dilepaskan secara kognitif dari “pohon rindang” pemahaman skripturalistik-verbalis terhadap teks-teks keagamaan yang dipaksakan untuk melegitimasi “violence action”. Jaringan terorisme di Indonesia di mana aktor-aktornya seringkali dilekatkan dengan alumni perang Afghan dan jaringan yang telah dipupuk sejak tahun 1970-an melalui Al-Jamaah Al-Islamiyah. Organisasi bawah tanah ini mendiaspora hingga saat ini dan sel-selnya masih tetap bekerja dan turut merekrut anggota-anggota baru. Bukti kuatnya adalah dalam satu dasarawarsa terakhir ini masih ada peristiwa teror yang mengakibatkan pada kematian pelaku, karena bom bunuh diri dan hilangnya nyawa warga yang tak bersalah serta melukai korban-korban lainnya. Pergerakan mereka sangat eksklusif dan membentuk jejaring baru yang mendapat dukungan dari gerakan radikal kontemporer yang disebut Islam transnasional dan ISIS *Connection*. Upaya-upaya sistematis dan objektif untuk membendung arus ideologi-politik dan pergerakannya adalah memperkuat Islam moderat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

References

- Abegebriel, A Maftuh, and A Yani Abeveiro. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*. SR-Ins Pub., 2004.
- Abu, Murba. “Memahami Terorisme Di Indonesia.” *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*. Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Abuza, Zachary. “Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al



- Qaeda and Jemaah Islamiya." *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 25, no. 2 (2003): 169–99.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. "Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia." Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Alfarisy, Riadhy Muhammad. "Gerakan Transnasional Jihadis Di Indonesia: Studi Kasus Pada Jamaah Ansharut Daulah (Jad) 2015-2019." *Researchgate.Net*, no. April (2022): 2015–19.
- Antoun, Ricard T. "Memahami Fundamentalisme." *Surabaya: Pustaka Eureka*, 2003.
- ASIA, JEMAAH ISLAMIYAH I N SOUTH EAST. "DAMAGED BUT STILL DANGEROUS," 2003.
- Awwas, Irfan Suharyadi. *Risalah Kongres Mujahidin Dan Penegakkan Syariah Islam*. Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Azra, Azyumardi. "Fenomena Fundamentalisme Dalam Islam Dalam Ulumul Qur'an Nomor 3." *Vol. IV. Jakarta*, 1993.
- Briefing, I C G Asia. "Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the 'Ngruki Network.'" *Indonesia, Jakarta/Brussels* 8 (2002): 1–22.
- Cockburn, Patrick. "The Jihadis Return: ISIS and the New Sunni Uprising." (*No Title*), 2014.
- Conboy, Kenneth J. *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*. Equinox Publishing, 2004.
- Dackson, Wendy. "September 11: Religious Perspectives on the Causes and Consequences." JSTOR, 2003.
- Damanik, Ali Said. *Fenomena Partai Keadilan*. Noura Books, 2016.
- Dengel, Holk H. *Darul Islam Dan Kartosuwirjo: Langkah Perwujudan Angan-Angan Yang Gagal*. Pustaka Sinar Harapan, 1995.



- Fealy, Greg. "Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?" *Southeast Asian Affairs* 2004, no. 1 (2004): 104–21.
- Hasan, Noorhaidi. "Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2008): 23–51.
- . "The Failure of the Wahhabi Campaign: Transnational Islam and the Salafi Madrasa in Post-9/11 Indonesia." *South East Asia Research* 18, no. 4 (2010): 675–705.
- Huntington, Samuel. "The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order (London: Touchstone)," 1998.
- Jones, Sidney. "Hambali Adalah Petinggi Al-Qaidah." *Tempo* (3 November 2002), 2002, 52–54.
- Junaedi, Dedi. *Konspirasi Di Balik Bom Bali: Skenario Membungkam Gerakan Islam*. Bina Wawasan Press, 2003.
- Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. "Edisi Baru, Cet 1." *Yogyakarta: Tiara Wacana*, 2013.
- Liow, Joseph Chinyong. "ISIS Goes to Asia." *Foreign Affairs* 19 (2014).
- Machasin, M M. "Transnational Ideologies and Religious Local Wisdom." *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 6, no. 2 (2017): 199–220.
- Masud, Muhammad Khalid. *Travellers in Faith: Studies of the Tablighī Jamā'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal*. Vol. 69. Brill, 2000.
- Maulani, Zaini Azhar, and Abduh Zulfidar Akaha. "Terorisme Dan Konspirasi Anti Islam." *Jakarta: Pustaka Alkautsar*, 2002.
- Muzakki, Akh. "The Roots, Strategies, and Popular Perception of Islamic Radicalism in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 8, no. 1 (2014): 1–22.



- Noor, Irfan. "Islam Transnasional Dan Masa Depan NKRI: Suatu Perspektif Filsafat Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 10, no. 1 (2016): 1–21.
- Nur, Iffatin, A Hasyim Nawawie, Hiba Fajarwati, and Hani Chusna. "Embracing Radicalism and Extremism in Indonesia with the Beauty of Islam." *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences* 10, no. 2 (2020): 1–18.
- Safi, Omid. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. Simon and Schuster, 2003.
- Schulze, Kirsten E, and Joseph Chinyong Liow. "Making Jihadis, Waging Jihad: Transnational and Local Dimensions of the ISIS Phenomenon in Indonesia and Malaysia." *Asian Security* 15, no. 2 (2019): 122–39.
- Sinaulan, Ramlani Lina. "Islamic Law and Terrorism in Indonesia." *International Journal of Nusantara Islam* 4, no. 1 (2016): 13–28.
- Soepriyadi, E S. *Ngruki Dan Jaringan Terorisme: Melacak Jejak Abu Bakar Ba'asyir Dan Jaringanannya Dari Ngruki Sampai Bom Bali*. Almarwadi Prima, 2003.
- Sukma, Rizal. "Indonesia's Islam and September 11: Reactions and Prospects." *The New Terrorism: Anatomy, Trends, and Counterstrategies*. London: Times Media Private Ltd, 2002.
- Tibi, Bassam. *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*. Univ of California Press, 2002.
- Wibisono, Susilo, Winnifred R Louis, and Jolanda Jetten. "A Multidimensional Analysis of Religious Extremism." *Frontiers in Psychology* 10 (2019): 2560.
- Wilson, Chris. *Indonesia and Transnational Terrorism*. Department of the Parliamentary Library, 2001.

